

Bab 1 PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang wajib disusun/ditetapkan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di sebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra PD.

Renstra PD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa

kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2) di jelaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Kualitas penyusunan Renstra akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi serta menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke dalam Renstra. Renstra menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar yakni (a) sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) bagaimana mencapainya; dan (c) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tercapai. Penyusunan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat mempertajam tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan setiap lima tahun yang menggambarkan tujuan dan sasaran, strategi, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat dicapai secara bertahap sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sekretariat Daerah Provinsi Riau merupakan yang salah satu Perangkat Daerah yang diwajibkan menyusun/menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014- 2019.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Riau ini disusun dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 39/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman; dan
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau ini adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder dan seluruh aparatur Sekretariat Daerah

dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2014-2019.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Sekretariat daerah adalah:

1. Mengetahui kinerja Sekretariat Daerah periode sebelumnya;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
3. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Riau yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah.

BAB III Isu Strategis

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau 2014-2019.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD,

BAB VII Penutup

Bab 2 GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dan Lembaga Teknis Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan seluruh SKPD;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas manajerial dan teknis di seluruh SKPD;
- c. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis di seluruh SKPD;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan administratif di lingkungan Sekretariat Daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas teknis di bidang hukum, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kehumasan, keprotokolan dan persandian, pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan pelaksanaan fungsi lainnya yang tidak menjadi tugas SKPD yang lain;
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Setiap asisten dibantu oleh beberapa biro sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Biro Administrasi Kemasyarakatan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada biro dan SKPD yang di bawah koordinasinya;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas teknis yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain pada biro-biro yang di bawah koordinasinya;
- c. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi Biro yang terkait dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

1.1. Biro Administrasi Pemerintahan Umum

Biro Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis sesuai dengan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang meliputi Bagian Kepala Daerah, Hubungan Antar Lembaga dan DPRD, Bagian Dekonsentrasi dan Kerjasama Daerah, Bagian Otonomi Daerah dan Bagian Pemerintahan Umum; serta penyelenggaraan tugas pemerintahan umum lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain;

Biro Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis yang meliputi Bagian Kepala Daerah, Hubungan antar Lembaga dan DPRD, Bagian Dekonsentrasi dan Kerjasama Daerah, Bagian Otonomi Daerah dan Bagian Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain;
- c. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Biro Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Kepala Daerah, Hubungan Antar Lembaga dan DPRD;
- c. Bagian Dekonsentrasi dan Kerjasama Daerah;
- d. Bagian Otonomi Daerah;
- e. Bagian Pemerintahan Umum;
- f. Subbagian-Subbagian.

1.2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis sesuai dengan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf, yang meliputi Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Bagian Pendidikan dan Keagamaan; dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain;

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi tugas

manajerial dan teknis yang meliputi Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Bagian Pendidikan dan Keagamaan;

- b. Penyelenggaraan tugas teknis yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain;
- c. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Bagian Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Bagian Pendidikan dan Keagamaan;
- e. Subbagian-Subbagian.

1.3. Biro Administrasi Kemasyarakatan

Biro Administrasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis sesuai dengan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf, yang meliputi Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Pemuda dan Olahraga, dan Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat; dan pelaksanaan tugas lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain.

Biro Administrasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis yang meliputi Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Pemuda dan Olahraga, dan Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat;
- b. Penyelenggaraan tugas lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain;
- c. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Biro Administrasi Kemasyarakatan, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Bagian Pemuda dan Olahraga;
- d. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat;
- e. Subbagian-Subbagian.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Biro Administrasi Pembangunan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada biro dan SKPD yang di bawah koordinasinya;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas teknis yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain pada biro-biro yang di bawah koordinasinya;
- c. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi Biro yang terkait dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut :

2.1. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis, sesuai dengan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf, yang meliputi Bagian Pengembangan Perekonomian, Bagian Investasi dan Kerjasama Ekonomi, Bagian Sumberdaya Hayati dan Non Hayati, dan Bagian Ekonomi Makro dan Informasi Perekonomian; dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi biro dan SKPD yang lain;

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum di bagian pengembangan perekonomian; bagian investasi dan kerjasama ekonomi; bagian sumber daya Alam serta bagian ekonomi makro dan informasi perekonomian;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi serta diseminasi di bidang pengembangan perekonomian; bagian investasi dan kerjasama ekonomi; bagian sumber daya Alam serta bagian ekonomi makro dan informasi perekonomian;
- c. Penyelenggaraan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bagian pengembangan perekonomian; bagian investasi dan kerjasama ekonomi; bagian sumber daya alam serta bagian ekonomi makro dan informasi perekonomian;
- d. Penyelenggaraan Pembinaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan pengelolaan Sumber Daya Alam;
- f. Penyelenggaraan pembinaan pengembangan kelembagaan perekonomian;
- g. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari;

- a. Bagian Pengembangan Perekonomian;
- b. Bagian Investasi dan Kerjasama Ekonomi;
- c. Bagian Sumberdaya Hayati dan Non Hayati;
- d. Bagian Ekonomi Makro dan Informasi Perekonomian;
- e. Subbagian-Subbagian.

2.2. Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis sesuai dengan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf, yang meliputi Bagian Administrasi dan Perencanaan

Pembangunan, Bagian Administrasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik, Bagian Administrasi Pembangunan Provinsi dan Sektoral dan Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan pelaksanaan tugas teknis lain yang tidak menjadi tugas dan fungsi biro dan SKPD yang lain;

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis yang meliputi Bagian Administrasi dan Perencanaan Pembangunan, Bagian Administrasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik, Bagian Administrasi Pembangunan Provinsi dan Sektoral dan Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Penyelenggaraan tugas teknis lain yang tidak menjadi tugas dan fungsi biro dan SKPD yang lain;
- c. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Biro Administrasi Pembangunan, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Administrasi dan Perencanaan Pembangunan;
- c. Bagian Administrasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik;
- d. Bagian Administrasi Pembangunan Provinsi dan Sektoral;
- e. Bagian Layanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. Subbagian-Subbagian.

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum membawahi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Organisasi, Biro Hubungan Masyarakat, dan Biro Umum. Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada biro dan SKPD yang bawah koordinasinya;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas teknis yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain pada biro-biro yang di bawah koordinasinya;
- c. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi Biro yang terkait dengan Asisten Administrasi umum adalah sebagai berikut :

3.1. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang produk hukum provinsi, pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota, penyuluhan hukum, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, dokumentasi dan naskah hukum daerah.

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dibidang produk hukum provinsi, pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, penyuluhan hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan naskah hukum daerah;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dibidang produk hukum provinsi, dan fasilitasi pembinaan serta pengawasan dibidang produk hukum kabupaten/kota, penyuluhan hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan naskah hukum daerah;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang produk hukum provinsi, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan naskah hukum daerah;
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- a. Bagian Produk Hukum Provinsi;
- b. Bagian Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Hukum;

- c. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Daerah;

3.2. Biro Organisasi

Biro Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis yang meliputi Bagian Kelembagaan, Bagian Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja, Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas, dan Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah; dan penyelenggaraan tugas teknis lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi biro dan SKPD yang lain;

Biro Organisasi mempunyai fungsi;

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis yang meliputi Bagian Kelembagaan, Bagian Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja, Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas, dan Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- b. Penyelenggaraan tugas teknis lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi biro SKPD yang lain;
- c. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Biro Organisasi, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Kelembagaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- c. Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik;
- d. Bagian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi;
- e. Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- f. Subbagian-Subbagian.

3.3. Biro Hubungan Masyarakat

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis yang meliputi Bagian Pengumpulan Informasi, Bagian Penyajian Informasi, dan Bagian Penerangan dan Publikasi; dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi biro dan SKPD yang lain;

Biro Humas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, monitoring, evaluasi dan;
- b. Pelaksanaan tugas teknis lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi Biro dan SKPD yang lain;
- c. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Biro Hubungan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Pengumpulan Informasi;
- c. Bagian Penyajian Informasi;
- d. Bagian Penerangan;
- e. Bagian Publikasi;
- f. Subbagian-Subbagian.

3.4. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, monitoring, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis yang meliputi Bagian Tata Usaha Umum dan Rumah Tangga Pimpinan, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah, dan Bagian Protokol Dan Persandian; dan penyelenggaraan tugas lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain;

Biro Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, monitoring, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis yang meliputi Bagian Tata Usaha Umum dan Rumah Tangga Pimpinan, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah, dan Bagian Protokol Dan Persandian;
- b. Penyelenggaraan dan penyelenggaraan tugas teknis lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi biro dan SKPD yang lain;
- c. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Biro Umum, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Bagian Tata Usaha Umum dan Rumah Tangga Pimpinan;
- c. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
- d. Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah;
- e. Bagian Protokol dan Persandian;
- f. Subbagian-Subbagian.

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenjang kepangkatan, dan termasuk pula persebaran pegawai tersebut dalam berbagai Biro/Unit Kerja. Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, baik yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum menurut golongan. Dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya Sekretariat Daerah Provinsi Riau didukung oleh 551 PNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Seluruh Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Riau

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	SEKRETARIS DAERAH	1
2	ASISTEN SEKDA	3
3	STAF AHLI	5
4	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT	47
5	BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	46
6	BIRO ORGANISASI	42
7	BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	54
8	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA	52
9	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	49
10	BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	51
11	BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN	26
12	BIRO UMUM	165
13	KPU	10
	JUMLAH	551

Sumber : Biro Organisasi (data per Desember 2015)

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Riau terbanyak berada di Biro Umum sebanyak 165 orang atau sekitar 29,94% dari total pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Hal itu dikarenakan bahwa biro umum meliputi beberapa kegiatan teknis yang membutuhkan banyak pegawai karena gabungan dari beberapa fungsi seperti perlengkapan, keuangan dan tata usaha gubernur. Sedangkan pegawai dengan jumlah paling sedikit yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 10 orang.

Tabel 2.2
PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Sekretaris Daerah	1
2	Staf Ahli Gubernur	5
3	Asisten Sekretariat Daerah	3
4	Kepala Biro Sekretariat Daerah	9
5	Kepala Bagian Sekretariat Daerah	34
6	Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah	101

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
7	Staf Sekretariat Daerah	398
	JUMLAH	551

Sumber : Biro Organisasi (data per Desember 2015)

PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan jabatan meliputi Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Biro Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah, dan Staf Sekretariat Daerah. Staf Ahli Gubernur meliputi staf ahli Bidang Hukum dan Politik, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Ekonomi dan Keuangan, serta Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Asisten Sekretariat Daerah meliputi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat membawahi Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dan Biro Administrasi Kemasyarakatan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Sedangkan Asisten Administrasi Umum membawahi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Organisasi, Biro Umum, dan Biro Hubungan Masyarakat.

Bila dilihat dari jenjang pendidikan, maka struktur pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	Strata 3	1	0,18
2	Strata 2	93	16,87
3	Strata 1	232	42,10
4	Diploma 4	19	3,44
6	Diploma 3	37	6,71
7	Diploma 2	1	0,18

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
8	Diploma 1	1	0,18
9	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	149	27,04
10	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	6	1,08
11	Sekolah Dasar	12	2,17
	J U M L A H	551	100%

Sumber : Biro Organisasi (data per Desember 2015)

Pendidikan PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau terbanyak berada pada jenjang Strata 1 (S1) yaitu 232 orang atau 42,10%. Sedangkan PNS berpendidikan rendah seperti SLTP sebanyak 6 orang atau 1,08% dan SD berjumlah 12 orang atau 2,17% dari total jumlah PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Tabel 2.4
PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Golongan IV	69
2	Golongan III	366
3	Golongan II	104
4	Golongan I	12
	J U M L A H	551

Sumber : Biro Organisasi (data per Desember 2015)

PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau terbanyak berada pada golongan III yaitu 366 orang atau 66,42%. Sedangkan PNS dengan golongan I berjumlah paling sedikit yaitu 12 orang atau sekitar 2,18%.

Tabel 2.5
PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Eselon

NO	E S E L O N	JUMLAH (ORANG)
1	Eselon I	1
2	Eselon II	17
3	Eselon III	34
4	Eselon IV	101
5	Staf	398
	J U M L A H	551

Sumber : Biro Organisasi (data per Desember 2015)

PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau terdiri dari eselon I, II, III, IV, serta staf dengan jumlah 398 orang.

2.3. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Sekretariat Daerah Provinsi Riau ditunjang dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut :

1. Staf Ahli

- a. Bidang Hukum dan Politik
- b. Bidang Pemerintahan
- c. Bidang Pembangunan
- d. Bidang Ekonomi dan Keuangan
- e. Bidang Kemasyarakatan dan SDM

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat

a. Biro Administrasi Pemerintahan Umum

1. Bagian Kepala Daerah, Hubungan antar Lembaga dan DPRD
 - a) Sub Bagian Kepala Daerah dan Pembinaan Perangkat
 - b) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga DPRD dan Asosiasi
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro
2. Bagian Dekonsentrasi dan Kerjasama Daerah
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
 - b) Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 - c) Sub Bagian Kerjasama Daerah
3. Bagian Otonomi Daerah
 - a) Sub Bagian Desentralisasi dan Pengembangan Otonomi Daerah
 - b) Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah
 - c) Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah
4. Bagian Pemerintahan Umum

- a) Sub Bagian Penataan Batas Wilayah Administrasi
- b) Sub Bagian Pertanahan
- c) Sub Bagian Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah

b. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

- 1. Bagian Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - a) Sub Bagian Sosial
 - b) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro
- 2. Bagian Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
 - a) Sub Bagian Kesehatan dan Keluarga Berencana
 - b) Sub Bagian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
 - c) Sub Bagian Perlindungan Anak dan Narkoba
- 3. Bagian Pendidikan dan Keagamaan
 - a) Sub Bagian Pendidikan
 - b) Sub Bagian Aktivitas Keagamaan
 - c) Sub Bagian Sarana Dan Prasarana Keagamaan

c. Biro Administrasi Kemasyarakatan

- 1. Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a) Sub Bagian Kesatuan Bangsa
 - b) Sub Bagian Perpolitikan
 - c) Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- 2. Bagian Pemuda dan Olahraga
 - a) Sub Bagian Kepemudaan
 - b) Sub Bagian Keolahragaan
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro
- 3. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat
 - a) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan
 - b) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - c) Sub Bagian Komunitas Adat Terpencil

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

a. Biro Administrasi Pembangunan

1. Bagian Administrasi dan Perencanaan Pembangunan
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan
 - b) Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro
 2. Bagian Administrasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik
 - a) Sub Bagian Pelayanan
 - b) Sub Bagian Pemeliharaan Sistem
 - c) Sub Bagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 3. Bagian Program Provinsi dan Sektoral
 - a) Sub Bagian Pengendalian Proyek APBD
 - b) Sub Bagian Pengendalian Proyek APBN
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan APBD/APBN
 4. Administrasi Layanan Pengadaan Barang atau Jasa
 - a) Sub Bagian Layanan Barang/Jasa
 - b) Sub Bagian Pengaduan dan Sanggah
 - c) Sub Bagian Administrasi dan Umum
- b. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam**
1. Bagian Pengembangan Perekonomian
 - a) Sub Bagian Koperasi dan UMKM dan Ekonomi Kreatif
 - b) Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha dan Industri
 - c) Sub Bagian Lembaga Perekonomian Pemerintahan dan Non Pemerintahan
 2. Bagian Investasi dan Kerjasama Ekonomi
 - a) Sub Bagian Penanaman Modal Dan Promosi
 - b) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah
 - c) Sub Bagian Kerjasama Ekonomi
 3. Bagian Sumberdaya Hayati dan Non Hayati
 - a) Sub Bagian Sumberdaya Hayati
 - b) Sub Bagian Sumberdaya Non Hayati
 - c) Sub Bagian Sumberdaya Buatan
 4. Bagian Makro Ekonomi dan Informasi Perekonomian

- a) Sub Bagian Informasi Perekonomian
- b) Sub Bagian Regulasi dan Kebijakan Makro Ekonomi
- c) Sub Tata Usaha Biro

4. Asisten Administrasi Umum

a. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Bagian Produk Hukum Provinsi
 - a) Sub Bagian Peraturan Daerah
 - b) Sub Bagian Peraturan Gubernur Dan Keputusan Gubernur
 - c) Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Daerah
2. Bagian Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Hukum
 - a) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I
 - b) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II
 - c) Sub Bagian Penyuluhan Hukum
3. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - a) Sub Bagian Litigasi
 - b) Sub Bagian Non Litigasi
 - c) Sub Bagian Hak Asasi Manusia
4. Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Daerah
 - a) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Sekretariat Daerah
 - b) Sub Bagian Naskah Hukum Daerah
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro

b. Biro Organisasi

1. Bagian Kelembagaan, Anjab dan ABK
 - a) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - b) Sub Bagian Analisa Jabatan
 - c) Sub Bagian Analisa Beban Kerja
2. Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik
 - a) Sub Bagian Standarisasi Kerja
 - b) Sub Bagian Sistem dan Prosedur

- c) Sub Bagian Pelayanan Publik
 - 3. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas
 - a) Sub Bagian Reformasi Birokrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - b) Sub Bagian Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi
 - c) Sub Bagian Sistem Informasi Organisasi
 - 4. Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah
 - a) Sub Bagian Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Jabatan Fungsional
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro
- c. Biro Umum**
- 1. Bagian Tata Usaha Umum dan Rumah Tangga Pimpinan
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Gubernur
 - b) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro
 - 2. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah
 - b) Sub Bagian Belanja Pegawai dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah
 - c) Sub Bagian Verifikasi Keuangan Sekretariat Daerah
 - 3. Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah
 - a) Sub Bagian Penatausahaan Barang Sekretaris Daerah
 - b) Sub Bagian Penerimaan, Penyimpanan dan Distribusi Barang Sekretariat Daerah
 - c) Sub Bagian Pengadaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Sekretariat Daerah
 - 4. Bagian Protokol dan Persediaan
 - a) Sub Bagian Protokol
 - b) Sub Bagian Akomodasi dan Transportasi
 - c) Sub Bagian Persediaan
- d. Biro Hubungan Masyarakat**
- 1. Bagian Pengumpulan Informasi

- a) Sub Bagian Pendataan Informasi
- b) Sub Bagian Penyaringan Informasi
- c) Sub Bagian Tata Usaha Biro
- 2. Bagian Penyajian Informasi
 - a) Sub Bagian Hubungan Pers
 - b) Sub Bagian Dokumentasi
 - c) Sub Bagian Distribusi
- 3. Bagian Penerangan
 - a) Sub Bagian Bina Penyuluhan
 - b) Sub Bagian Bina Pemberitaan
 - c) Sub Bagian Bina Penertiban
- 4. Bagian Publikasi
 - a) Sub Bagian Audio Visual
 - b) Sub Bagian Publikasi
 - c) Sub Bagian Editor

2.4. Keuangan

Pada bagian ini menjelaskan anggaran yang ada pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau selama 5 (tiga) tahun dari 2011 - 2015, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah
Provinsi Riau Tahun 2012 – 2015

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH DANA (Rp)			REALISASI KEUANGAN (%)
		BELANJA LANGSUNG (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	TOTAL	
1	2012	254.359.779.539	63.164.054.199	317.523.833.738,00	78,94
2	2013	283.254.339.436	70.375.999.756	353.630.339.192,08	66,47
3	2014	289.194.284.494	76.356.628.200	365.550.912.694	67,89
4	2015	222.265.753.719	64.644.744.323	286.910.498.042	79,10

Sumber: Biro Administrasi Pembangunan (data per September 2016)

2.5. Kinerja Pelayanan

Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai *fasilitator* dan *advisor* dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintah yang mandiri, aman, damai, bersih dan berwibawa, berupaya melaksanakan tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah. Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dalam beberapa tahun ke belakang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2015
Provinsi Riau

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Otonomi Daerah	Predikat LPPD Pemerintah Provinsi	2 Dokumen (LPPD & ILPPD)	2 Dokumen (LPPD & ILPPD)	100%
2	Meningkatnya kualitas Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota	1 Jumlah Produk Hukum Provinsi yang telah di Harmonisasi	900 SK Gubernur 60 Pergub	909 SK Gubernur 111 Pergub	101% 185%
		2 Jumlah Kabupaten/ Kota yang Produk Hukumnya telah di Evaluasi dan Klarifikasi	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100%
		3 Jumlah Naskah Hukum Daerah yang Diharmonisasi	500 MoU	15 MoU	100%
3	Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	51 SKPD	51 SKPD	100%
4	Penguatan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Peningkatan Predikat AKIP Setda	3 Dokumen	3 dokumen	100%
		2 Jumlah SKPD yang telah melaksanakan Pengembangan Management Kinerja Organisasi	51 SKPD	0 SKPD	0%
5	Meningkatkan kualitas Penanganan masalah bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi	Jumlah Kebijakan tentang permasalahan Sosial	1 Kebijakan	1 kebijakan	95%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
6	Meningkatnya Kualitas Penanganan masalah bidang Kesehatan, Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana serta permasalahan perlindungan anak dan narkoba	Jumlah Kebijakan tentang Permasalahan Perlindungan anak dan narkoba	1 kebijakan	0 %	0%
7	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kesatuan bangsa dan politik	Jumlah rekomendasi Kebijakan tentang kesatuan bangsa	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
8	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan komunitas adat	Jumlah Rekomendasi kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
9	Meningkatkan Pengembangan Perekonomian	1 Tingkat pendapatan yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan	7 BUMD	3 BUMD	42,86%
		2 Tingkat pendapatan yang berasal dari industri ekstraktif	2 Penyertaan Modal di Pekanbaru	2 Penyertaan Modal di Pekanbaru	100%
		2 Tingkat pendapatan yang berasal dari industri ekstraktif	1 Laporan	1 Laporan	100%
10	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dari Dana APBD dan APBN	Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD dan APBN Prov Riau	4 Kali Pertemuan	4 Pertemuan	100%
11	Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan dan Akuntabel	1 Tingkat kesesuaian target perencanaan dengan realisasi Jumlah Paket Pengadaan yang di Lelang Melalui ULP dan LPSE	1500 Paket	724 Paket	48.2%
		2 Jumlah Aparatur Pemerintah Provinsi Riau Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa	80 Aparatur	19 Aparatur	23%
12	Meningkatkan layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah persetujuan verifikasi dokumen pertanggung jawaban	100 Paket	90 Paket	90%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
13	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Tata Usaha Umum dan Rumah Tangga Pimpinan	Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	150 Kunjungan	104 kunjungan	69,33%
14	Peningkatan Pelayanan Kehumasan yang cepat, tepat dan akurat	1 Persentase Penyajian Informasi yang Up to date	8 paket Foto Studio	2 paket Foto Studio	25%
			840 hasil liputan	769 hasil liputan	91,55%
			7800 Foto ukuran 4 R dan 10 R	8.081 Foto ukuran 4 R dan 10 R	103,60 %
		2 Persentase Penyebaran Informasi Pemerintah Provinsi Riau yang di Publikasikan Media Massa	12 Bulan	12 Bulan	100%

Dalam meningkatkan capaian kinerjanya Sekretariat Daerah 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dalam mendukung tugas dan fungsi di maksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari:

1. Merumuskan program lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Mengendalikan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertibnya administrasi Pemerintah;
3. Mengatur kegiatan perumusan kebijakan teknis dibidang Perekonomian daerah dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
4. Mengawasi perumusan kebijakan teknis dibidang Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka kepastian hukum;
5. Mengendalikan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Rumah Tangga serta sarana dan Prasarana Pemerintahan Provinsi Riau sesuai dengan Ketentuan dan kebutuhan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
6. Mengawasi perumusan kebijakan dibidang organisasi dan tatalaksana perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Mengkoordinasikan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;

8. Mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, pelayanan dan sarana Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan ketentuan dan kebutuhan;
9. Melakukan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan pengumpulan dan analisis data;
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya baik di tingkat Provinsi maupun Pusat untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
11. Mengatur kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
12. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga sesuai dengan kebutuhan dalam rangka transparansi dan koordinasi pelaksanaan tugas.

2.6. Peluang dan Tantangan

Peluang dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi selalu muncul sehingga bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, peluang-peluang tersebut antara lain adalah :

1. Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mencukupi;
2. Komitmen pimpinan;
3. Adanya kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan *good governance*;
4. Adanya kebijakan Pemerintah untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Sarana dan Prasarana yang tersedia.

Sedangkan hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih rendah;
2. Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah;
3. Tuntutan pelayanan birokrasi menghendaki aparatur yang semakin profesional dan kompeten;
4. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien;
5. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
6. Efisiensi, efektifitas dan produktivitas belum optimal;
7. Transparan dan akuntabilitas birokrasi masih rendah;
8. Disiplin dan kinerja aparatur masih rendah;

9. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan.

Bab 3 **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Riau, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Sekretariat Daerah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2014-2019).

3.1 Identifikasi permasalahan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 01 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Riau, masih terdapat 3 (tiga) permasalahan utama Sekreariat Daerah yang kemudian dijadikan fokus kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud.

Berikut ini pemetaan permasalahan utama Sekretariat Daerah dalam merealisasikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah periode 2014-2019.

Gambar 3.1
Mata Rantai Permasalahan Utama Sekretariat Daerah



Terkait dengan hal tersebut, berikut penjabaran permasalahan utama pembangunan Sekretariat Daerah sebagai kajian dalam merumuskan berbagai program program dan kegiatan.

1. Masih Rendahnya Kualitas Layanan Publik

Kualitas pelayanan publik yang kurang optimal selalu menjadi sorotan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran aparatur daerah dalam melayani masyarakat termasuk minimnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait “**Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik**” telah ditelaah dan disimpulkan terdapat beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan
“Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik”

No	Masalah	Akar Masalah
1.	Tuntutan Pelayanan Publik yang prima belum optimal	Perangkat dan struktur organisasi daerah masih menggunakan pola minimal sehingga belum optimal dalam pelayanan publik
		Meningkatnya tuntutan publik terhadap pemerintah daerah untuk mendapatkan pelayanan yang prima
		Belum optimalnya SOP pelayanan publik
		Minimnya fasilitas pelayanan publik yang berkualitas
		Masih rendahnya kedisiplinan aparatur pemerintah

2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkualitas terletak pada tatanan aparatur daerah yang menjadi subyek pemerintahan dalam pembangunan. Kualitas sumber daya aparatur pemerintah Sekretariat Daerah menjadi suatu permasalahan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Minimnya aparatur daerah yang profesional, berkualitas, dan amanah menjadi “pekerjaan rumah” bagi pemerintah daerah sebagai bagian dari pencapaian *Good Government* melalui Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mengefektifkan kinerja pemerintah daerah, pemerintah belum perlu menambah jumlah PNS atau tidak menambah jumlah PNS, namun meningkatkan kualifikasi PNS dengan memberikan pelatihan dalam hal pelayanan dan kinerja. Aparatur sipil negara yang harus ditingkatkan kualitasnya cukup yang terkait dengan pelayanan dasar kehidupan masyarakat, sedangkan yang terkait administrasi teknis perlu diberdayakan lebih lanjut sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian.

Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait **“Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”** telah ditelaah dan disimpulkan terdapat beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Permasalahan
“Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”

No	Masalah	Akar Masalah
1.	Penyelenggaraan pemerintahan belum berbasis kepada kinerja	Masih rendahnya pemahaman Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
		Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah dalam menyusun LAKIP
		Belum optimalnya pembinaan Provinsi ke Kabupaten/Kota
		Belum optimalnya peran Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam menjalankan Pemerintah Daerah
		Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sering berubah-ubahnya peraturan Pemerintah Pusat

3. Belum Optimalnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dan menyebabkan belum optimalnya laju pertumbuhan ekonomi, diantaranya :

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

b. Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia.

c. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih yang berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas produk.

d. Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan suatu negara. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit serta pendorong proses pembangunan, misalnya sikap kerja keras, jujur, ulet dan sebagainya. Akan tetapi faktor ini juga dapat menjadi penghambat proses pembangunan, misalnya sikap anarkis, egois, boros, KKN dan sebagainya.

e. Faktor Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal yang berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan serta kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait **“Belum Optimalnya Laju Pertumbuhan Ekonomi”** telah ditelaah dan disimpulkan terdapat beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Permasalahan
“Belum Optimalnya Laju Pertumbuhan Ekonomi”

No	Masalah	Akar Masalah
1	Koordinasi/pembinaan terhadap BUMD belum	Belum tertibnya RUPS yang ada di BUMD
		Penyertaan Modal yang belum mencapai target

No	Masalah	Akar Masalah
	optimal	Hanya 7 dari 9 BUMD yang aktif
2	Inflasi daerah masih di tingkat sedang	Tingginya harga barang pada saat-saat tertentu Daya beli masyarakat rendah
3	Rendahnya penyerapan APBD	Lambatnya penandatanganan DPA Lambat melakukan kegiatan Kehati-hatian dalam melaksanakan APBD DAU ditunda Ada jeda waktu antara penetapan APBD dan pelaksanaan kegiatan Lambatnya birokrasi Tidak ada perlindungan hukum terhadap ASN yang terlapor kasus korupsi

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2014-2019 disebutkan bahwa Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau adalah :

“TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU YANG MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING TINGGI, MENURUNNYA KEMISKINAN, TERSEDIANYA LAPANGAN KERJA SERTA PEMANTAPAN APARATUR”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

1. Maju : Tersedia sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan berkualitas serta berteknologi tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Sejahtera : Terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, aman dan nyaman serta merata dari segala aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, dan keamanan.
3. Berdaya : Suatu kondisi pemerintah dan Masyarakat yang tangguh, unggul dan

- Saing memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya, tatanan sosial yang agamis.
4. Menurunnya : Suatu kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hak-kemiskinan hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
 5. Lapangan : Tersedianya peluang dan kesempatan bagi angkatan kerja melalui Kerja kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
 6. Pemantapan : Meningkatkan Profesionalisme dan etos kerja dalam memberikan Aparatur pelayanan prima menjalankan fungsi pemerintahan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 – 2019, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan.
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan.
4. Menurunkan Kemiskinan.
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya.
6. Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa serta Pemantapan Kehidupan Politik.
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan.
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pariwisata.
9. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.

3.2.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi

yang dijalankan akan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau telah menuangkan tentang Tujuan dan Sasaran dari pada masing – masing SKPD, untuk SKPD (Sekretariat Daerah) yang terkait secara langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut:

Misi 5 : Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2013)	KONDISI AKHIR (2018)
	Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik	Terwujudnya Good Governance and clean Government.	Opini BPK	WTP	WTP
			Nilai akuntabilitas	CC	BB
			Skor LPPD	2,02	2,90
			Nilai Keterbukaan informasi	-	46,49
			Nilai Reformasi Birokrasi	na	39,60

Kehidupan Politik

3.3 Telaahan Renstra Kementerian

Sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Sasaran yang ingin dicapai antara lain, *Pertama* Ketersediaan pasokan dan keterjangkauan bahan pangan pokok untuk seluruh lapisan masyarakat, *Kedua* Kelanjutan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, *Ketiga* Pertumbuhan ekonomi perdesaan dalam rangka ketahanan pangan, *Keempat* Peningkatan koordinasi percepatan kebijakan dan sinkronisasi implementasi kebijakan sektor energi, sumber daya mineral dan kehutanan guna mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, *Kelima* Penguatan tata kelola dan akuntabilitas implementasi pengelolaan industri ekstraktif (*Extractive Industries Transparency Initiative/EITI*). *Keenam* Percepatan pertumbuhan industri nasional, peningkatan ekspor non migas yang memiliki nilai tambah tinggi dan nilai inovasi, meningkat dan meratanya pertumbuhan investasi langsung, meningkatnya peran UMKM dan industri jasa termasuk pariwisata, dan *Ketujuh* Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN yang berisi:

- Tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi
- Rencana struktur ruang wilayah provinsi
- Rencana pola ruang wilayah provinsi
- Penetapan kawasan strategis provinsi
- Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi
- Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi

pembangunan jangka panjang provinsi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Saat ini SK Perubahan RTRW yang berlaku di Riau adalah SK Perubahan RTRW Riau bernomor SK.314./MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tertanggal 20 April 2016 yang ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SK ini merupakan revisi dari SK 878/Menhut-II/2014 tertanggal 29 September 2014. Pengaturan Mengenai Keruangan Wilayah Daratan Riau juga termuat dalam Peraturan Daerah No. 10 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Daerah Tingkat I Riau 1994-2009 yang memuat tentang arahan pemanfaatan ruang sebagai Acuan dan Alat koordinasi antar sector dalam membuat kebijakan Pembangunan Provinsi Riau.

Dalam Peraturan Daerah No. 10 tahun 1994 tersebut luas daratan Riau adalah 9.456.160 Ha (masih termasuk Provinsi Kepulauan Riau). RTRWP membagi arahan pemanfaatan Ruang menjadi 2 Klasifikasi Besar yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung meliputi Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Perlindungan Setempat, dan Kawasan yang memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya. Sementara Kawasan Budidaya meliputi Kawasan Hutan Produksi, Perkebunan, Industri, Pariwisata, Pertanian, Pemukiman dan lain-lain, dan kawasan Prioritas. Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sehingga saat diimplementasikan dapat diarahkan dengan baik.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya seperti capaian kinerja rencana strategis, peluang dan tantangan yang dihadapi, permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD dan telaah terhadap visi dan misi Gubernur maka isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat Daerah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan ke depan meliputi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan belum berjalan optimal;

2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efisien dan efektif;
3. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata
4. Masih rendahnya disiplin dan budaya kerja Aparatur dalam melaksanakan tugas pengabdianya sebagai pelayan masyarakat.
5. Belum optimalnya koordinasi antar PD, sehingga pelaksanaan tugas antar PD kurang sinergis dan tidak terkoordinir dengan baik;

Bab 4 **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Visi disini adalah cara pandang jauh kedepan yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan Sekretariat Daerah Provinsi Riau agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang.

Dengan mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada visi Provinsi Riau maka visi Sekretariat Daerah Provinsi Riau, yaitu:

“Terwujudnya Koordinasi, Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Akuntabel dengan Kepastian Hukum”

Penjelasan makna visi:

1. Terwujudnya Koordinasi dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan

- Terwujudnya Koordinasi dalam Arti sebagai Sarana saling berkomunikasi dalam mencapai tujuan kebijakan Pemerintahan Pusat Ke Provinsi, Provinsi Ke Kabupaten, Kabupaten ke Kecamatan dan seterusnya .
- Pelayanan Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Aparatur Pemerintah disini adalah pegawai yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Riau, profesi adalah semua bidang pekerjaan.
- Menciptakan pelayanan yang prima adalah suatu kewajiban bagi aparatur. Pelayanan adalah jasa yang diberikan. Ukurannya adalah rasa, indikatornya adalah tingkat kepuasan yang dilayani.

2. Terwujudnya Profesional dan Akuntabilitas

- Profesional adalah bila melakukan pekerjaan dengan kualitas tinggi, Profesional menuntut sesuatu yang lebih dari sekedar “bekerja” juga menuntut pemenuhan standar tertentu. Menjadi profesional tak hanya membutuhkan keahlian tinggi, juga membutuhkan kesungguhan dalam bekerja. Untuk terwujudnya aparatur yang

profesional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur baik dalam pengetahuan, wawasan maupun keahlian dengan mengikuti pendidikan dan latihan formal, workshop, bimbingan teknis dan lainnya. Disamping itu, menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kedisiplinan yang tinggi didalam diri setiap pegawai untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil adalah hal yang dianggap penting. Dengan diterapkannya hal tersebut diatas diharapkan aparatur yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Riau mampu menjadi profesional dalam pelaksanaan tugasnya pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

- Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan konsep filosofis inti dalam manajemen sektor publik. Dalam konteks organisasi pemerintah, sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

3. Meningkatkan Kepastian Hukum

- Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

Visi dan Misi Sekretariat Daerah memiliki konsistensi untuk menjabarkan Visi Misi Provinsi Riau khususnya misi ke-5 (lima) yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik. Konsistensi dokumen strategis Sekretariat daerah diharapkan juga didukung dengan kemampuan merumuskan kebijakan dan melaksanakan pelayanan kepada perangkat daerah.

Kesinambungan Visi dan Misi Provinsi Riau dengan Visi Misi Sekretariat Daerah 2014-2019, sebagai berikut.

Tabel 4.1

Kesinambungan RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau 2014-2019

VISI PROVINSI RIAU	VISI SEKRETARIAT DAERAH
“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020.”	“Mewujudkan Koordinasi dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Akuntabel dengan Kepastian Hukum”
MISI PROVINSI RIAU	MISI SEKRETARIAT DAERAH
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalisasikan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian administrasi pembangunan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel. 2. Optimalisasi penataan dan pembinaan sektor ekonomi dan SDA Daerah serta pelayanan administrasi perekonomian pada setiap sektor ekonomi. 3. Menyelenggarakan pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat secara Profesional, efektif, efisien dan akuntabel yang didukung dengan teknologi. 4. Memberikan pelayanan informasi secara professional, efektif, efisien, dan akuntabel. 5. Menetapkan kebijakan pengembangan Kesejahteraan Rakyat yang sinergis dan terpadu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, dengan pemerintah kabupaten/kota. 6. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. 7. Menyelenggarakan tugas dan pelayanan umum pemerintahan yang bersinergi dan terkoordinasi.

	<p>8. Meningkatkan Kualitas Organisasi Pemerintahan menjadi terdepan sesuai dengan Reformasi Birokrasi.</p> <p>9. Menetapkan kebijakan dan koordinasi pengembangan Kemasyarakatan yang sinergis dan terpadu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, dengan pemerintah kabupaten/kota.</p>
--	---

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Tujuan dan sasaran adalah sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Di sini, visi dan misi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD dan RPJMD.

Berikut keterkaitan antara visi, misi dengan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah :

1. Meningkatkan pengendalian pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan pengadaan yang akuntabel dan transparan.
2. Mewujudkan optimalisasi perekonomian daerah.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah.
4. Mewujudkan transparansi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
5. Mewujudkan kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan rakyat.
6. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Hukum dan HAM.
7. Mewujudkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan administrasi dan kebijakan pemerintah
8. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
9. Mewujudkan kebijakan pemerintah terkait kemasyarakatan.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang akan dicapai untuk mewujudkan 9 (sembilan) misi Sekretariat Daerah Provinsi Riau adalah sebanyak 9 (sembilan) tujuan dan 30 (tiga puluh) sasaran. Misi, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Misi :

Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian administrasi pembangunan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel.

Misi ini bertujuan Meningkatkan pengendalian pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan pengadaan yang akuntabel dan transparan.

Sasaran:

- a. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dari Dana APBD dan APBN
- b. Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan dan Akuntabel

2. Misi :

Optimalisasi penataan dan pembinaan sektor ekonomi dan SDA Daerah serta pelayanan administrasi perekonomian pada setiap sektor ekonomi.

Misi ini bertujuan Mewujudkan optimalisasi perekonomian daerah.

Sasaran:

- a. Meningkatkan Pengembangan Perekonomian
- b. Meningkatkan Investasi dan Kerjasama Ekonomi
- c. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan
- d. Penguatan Ekonomi Makro dan Informasi Perekonomian

3. Misi :

Menyelenggarakan pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat secara Profesional, efektif, efisien dan akuntabel yang didukung dengan teknologi.

Misi ini bertujuan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah.

Sasaran:

- a. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah

- b. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik
- c. Terwujudnya Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
- d. Terwujudnya Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum se Provinsi Riau
- e. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

4. Misi :

Memberikan pelayanan informasi secara professional, efektif, efisien, dan akuntabel.

Misi ini bertujuan Mewujudkan transparansi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Sasaran:

- a. Peningkatan Pelayanan Kehumasan yang Cepat, Tepat dan Akurat

5. Misi :

Menetapkan kebijakan pengembangan Kesejahteraan Rakyat yang sinergis dan terpadu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, dengan pemerintah kabupaten/kota.

Misi ini bertujuan Mewujudkan kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan rakyat.

Sasaran:

- a. Meningkatkan Kualitas Penanganan masalah bidang sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi
- b. Meningkatnya Kualitas Penanganan masalah bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta permasalahan perlindungan anak dan narkoba.
- c. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan pemahaman nilai-nilai Keagamaan

6. Misi :

Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Misi ini bertujuan Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Hukum dan HAM.

Sasaran:

- a. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota
- b. Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Hukum
- c. Meningkatnya Fasilitas Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- d. Tersedianya Dokumentasi dan Naskah Hukum Daerah

7. Misi :

Menyelenggarakan tugas dan pelayanan umum pemerintahan yang bersinergi dan terkoordinasi.

Misi ini bertujuan Mewujudkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan administrasi dan kebijakan pemerintah.

Sasaran:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan
- b. Meningkatkan Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah
- c. Meningkatkan Tertib Administrasi kebutuhan barang Sekretariat Daerah
- d. Meningkatkan Peran Protokol dan Persandian

8. Misi :

Meningkatkan Kualitas Organisasi Pemerintahan menjadi terdepan sesuai dengan Reformasi Birokrasi.

Misi ini bertujuan Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sasaran:

- a. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah
- b. Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
- c. Penguatan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Meningkatkan Pemantapan Road Map Reformasi Birokrasi

9. Misi :

Menetapkan kebijakan dan koordinasi pengembangan Kemasyarakatan yang sinergis dan terpadu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, dengan pemerintah kabupaten/kota.

Misi ini bertujuan Mewujudkan kebijakan pemerintah terkait kemasyarakatan.

Sasaran:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kesatuan bangsa dan politik
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran Pemuda dan Olahraga
- c. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat

Tabel 4.2
Misi dan Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Misi	Tujuan
1. Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian administrasi pembangunan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel.	1. Meningkatkan pengendalian pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan pengadaan yang akuntabel dan transparan
2. Optimalisasi penataan dan pembinaan sektor ekonomi dan SDA Daerah serta pelayanan administrasi perekonomian pada setiap sektor ekonomi.	2. Mewujudkan optimalisasi perekonomian daerah.
3. Menyelenggarakan pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat secara Profesional, efektif, efisien dan akuntabel yang didukung dengan teknologi.	3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah.
4. Memberikan pelayanan informasi secara professional, efektif, efisien, dan akuntabel.	4. Mewujudkan transparansi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
5. Menetapkan kebijakan pengembangan Kesejahteraan Rakyat yang sinergis dan terpadu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, dengan pemerintah kabupaten/kota.	5. Mewujudkan kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan rakyat.
6. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.	6. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Hukum dan HAM.
7. Menyelenggarakan tugas dan pelayanan umum pemerintahan yang bersinergi dan terkoordinasi.	7. Mewujudkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan administrasi dan kebijakan pemerintah

Misi	Tujuan
8. Meningkatkan Kualitas Organisasi Pemerintahan menjadi terdepan sesuai dengan Reformasi Birokrasi.	8. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
9. Menetapkan kebijakan dan koordinasi pengembangan Kemasyarakatan yang sinergis dan terpadu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, dengan pemerintah kabupaten/kota.	9. Mewujudkan kebijakan pemerintah terkait kemasyarakatan.

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan pengendalian pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan pengadaan yang akuntabel dan transparan	1. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dari Dana APBD dan APBN 2. Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan dan Akuntabel
2. Mewujudkan optimalisasi perekonomian daerah.	1. Meningkatkan Pengembangan Perekonomian 2. Meningkatkan Investasi dan Kerjasama Ekonomi 3. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan 4. Penguatan Ekonomi Makro dan Informasi Perekonomian
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah.	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah 2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Terwujudnya Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota se Provinsi Riau 4. Terwujudnya Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum se Provinsi Riau 5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
4. Mewujudkan transparansi pelaksanaan kebijakan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelayanan Kehumasan yang Cepat, Tepat dan Akurat
5. Mewujudkan kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan rakyat.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Penanganan masalah bidang sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi 2. Meningkatnya Kualitas Penanganan masalah bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta permasalahan perlindungan anak dan narkoba. 3. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan pemahaman nilai-nilai Keagamaan
6. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Hukum dan HAM.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota 2. Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Hukum 3. Meningkatnya Fasilitas Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Tersedianya Dokumentasi dan Naskah Hukum Daerah
7. Mewujudkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan administrasi dan kebijakan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan 2. Meningkatkan Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan Tertib Administrasi kebutuhan barang Sekretariat Daerah 4. Meningkatkan Peran Protokol dan Persandian
8. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah 2. Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 3. Penguatan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Meningkatkan Pemantapan Road Map Reformasi Birokrasi
9. Mewujudkan kebijakan pemerintah terkait kemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kesatuan bangsa dan politik 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran Pemuda dan Olahraga 3. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat

Tabel 4.4

Sasaran dan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatkan pengendalian pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan pengadaan yang akuntabel dan transparan	1. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dari Dana APBD dan APBN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD Provinsi Riau 2. Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBN Provinsi Riau 3. Tingkat kesesuaian target perencanaan dengan realisasi
	2. Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Paket Pengadaan yang di Lelang Melalui ULP dan LPSE 2. Jumlah Aparatur Pemerintah Provinsi Riau Yang Mengikuti Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

		3. Jumlah SKPD Yang Melaksanakan Proses Pengadaan Melalui LPSE.
2. Mewujudkan optimalisasi perekonomian daerah.	1. Meningkatkan Pengembangan Perekonomian	1. Jumlah Data dan Rekomendasi kebijakan KUMKM dan ekonomi kreatif serta Dunia Usaha dan Dunia Industri 2. Jumlah data dan rekomendasi penataan non pemerintah
	2. Meningkatkan Investasi dan Kerjasama Ekonomi	1. Tercapainya kesesuaian dan pendapatan aset kekayaan yang dipisahkan 2. Jumlah data dan rekomendasi kebijakan tentang pengelolaan aset kekayaan yang dipisahkan 3. Jumlah data dan analisis kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Promosi Daerah
	3. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan	1. Jumlah data dan rekomendasi Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan Provinsi Riau 2. Tingkat pendapatan yang berasal dari industri ekstraktif
	4. Penguatan Ekonomi Makro dan Informasi Perekonomian	1. Jumlah Data dan analisis pengembangan perekonomian per sektor ekonomi 2. Rekomendasi kebijakan di bidang inflasi
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah.	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1. Nilai Predikat LPPD 2. Persentase Predikat LPPD Sangat Tinggi Pemerintah Kab/Kota 3. Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti Oleh Kab/Kota
	2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	1. Indeks Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Meningkat
	3. Terwujudnya Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota se Provinsi Riau	1. Jumlah Segmen Batas mengenai Kesepakatan garis Batas antar Kabupaten/Kota yang berbatasan
	4. Terwujudnya Tahapan Persiapan Pengadaan	1. Jumlah Rekomendasi terkait Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

	Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum se Provinsi Riau	Untuk Kepentingan Umum se Provinsi Riau
	5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Program Anggaran DEKON dan TUBAN 2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pelayanan Umum Pemerintahan
4. Mewujudkan transparansi pelaksanaan kebijakan pemerintah.	1. Peningkatan Pelayanan Kehumasan yang Cepat, Tepat dan Akurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Penyediaan Informasi yang Update berupa <ol style="list-style-type: none"> a. Photo b. Buku c. DVD d. CD e. Majalah 2. Jumlah Penyebaran Informasi Provinsi Riau yang di publikasikan di Media massa melalui TV, Radio, Koran, dan Online
5. Mewujudkan kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan rakyat.	1. Meningkatkan Kualitas Penanganan masalah bidang sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kebijakan tentang permasalahan Sosial 2. Jumlah kebijakan tentang permasalahan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2. Meningkatnya Kualitas Penanganan masalah bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta permasalahan perlindungan anak dan narkoba.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kebijakan tentang permasalahan Kesehatan dan KB 2. Jumlah Kebijakan tentang permasalahan Pemberdayaan Perempuan 3. Jumlah Kebijakan tentang permasalahan perlindungan anak dan narkoba.
	3. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan pemahaman nilai-nilai Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penerima bantuan sarana prasarana ibadah 2. Jumlah peserta MTQ Nasional/Internasional yang berprestasi 3. Jumlah Mahasiswa penerima bantuan pendidikan pada masyarakat kurang mampu
6. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Hukum dan HAM.	1. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Produk Hukum Provinsi yang Telah di Harmonisasi 2. Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Diharmonisasi
	2. Meningkatnya Kualitas Pembinaan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentasi Masyarakat yang Mendapat Penyuluhan Hukum

	Pengawasan dan Penyuluhan Hukum	
	3. Meningkatnya Fasilitas Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Jumlah Gugatan/Perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara di Pengadilan yang di Tangani 2. Jumlah Permasalahan HAM
	4. Tersedianya Dukumentasi dan Naskah Hukum Daerah	1. Jumlah Produk Hukum yang di Publikasikan melalui JDIH dan CD 2. Jumlah Naskah Hukum Daerah yang diharmonisasi
7. Mewujudkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan administrasi dan kebijakan pemerintah	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan	1. Jumlah Tamu Pemerintah Daerah yang terlayani 2. Jumlah distribusi surat masuk dan keluar
	2. Meningkatkan Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	1. Jumlah SPM yang diterbitkan 2. Jumlah persetujuan verifikasi dokumen pertanggungjawaban
	3. Meningkatkan Tertib Administrasi kebutuhan barang Sekretariat Daerah	1. Jumlah Inventarisasi Rencana Kebutuhan Barang (RKB). 2. Jumlah jasa service telepon, air dan Listrik.
	4. Meningkatkan Peran Protokol dan Persandian	1. Jumlah Acara / Event / Resepsi Jamuan Tamu 2. Jumlah Kawat Masuk / SANDI
8. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1. Prosentase SKPD yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran
	2. Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah SKPD yang dilakukan Pembinaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Jumlah Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun dan diterapkan oleh SKPD Provinsi Secara Efektive 4. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun dan diterapkan oleh SKPD Kab/Kota Secara Efektive 5. Jumlah Naskah Dinas Elektronik yang diterapkan oleh SKPD Provinsi 6. Jumlah Naskah Dinas Elektronik yang diterapkan oleh SKPD Kab/ Kota 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang oleh SKPD Provinsi 8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

		<p>terhadap Pelayanan Publik yang oleh SKPD Kab/Kota</p> <p>9. Jumlah SKPD Provinsi yang Punya Kepatuhan Predikat yang Tinggi Terhadap SPP yang diterapkan oleh SKPD Provinsi</p> <p>10. Jumlah SKPD Kab/Kota yang Punya Kepatuhan Predikat yang Tinggi Terhadap SPP yang diterapkan oleh SKPD Kab/Kota</p> <p>11. Jumlah Analisis Jabatan ANJAB yang disusun oleh SKPD Provinsi</p>
	3. Penguatan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<p>1. Nilai AKIP</p> <p>2. Pengembangan Management Kinerja Organisasi</p>
	4. Meningkatkan Pemantapan Road Map Reformasi Birokrasi	<p>1. Jumlah SKPD yang melaksanakan 8 area perubahan</p>
9. Mewujudkan kebijakan pemerintah terkait kemasyarakatan.	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kesatuan bangsa dan politik	<p>1. Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Kesatuan bangsa dan politik</p>
	2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran Pemuda dan Olahraga	<p>1. Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Kepemudaan</p> <p>2. Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Olahraga</p>
	3. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat	<p>1. Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Pemberdayaan Masyarakat.</p>

Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini tentang Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai berikut.

Tabel 4.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Tahun 2014 - 2019

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
			1	2	3	4	5
Meningkatkan pengendalian pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan pengadaan yang akuntabel dan transparan.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dari Dana APBD dan APBN	- Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD Provinsi Riau		80 %	80 %		
		- Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBN Provinsi Riau		80 %	80 %		
		- Tingkat kesesuaian target perencanaan dengan realisasi		85 %	85 %		
	Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan dan Akuntabel	- Jumlah Paket Pengadaan yang di Lelang Melalui ULP dan LPSE		1500 Paket	1500 Paket		
		- Jumlah Aparatur Pemerintah Provinsi Riau Yang Mengikuti Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa		80 Aparatur	80 Aparatur		
		- Jumlah SKPD Yang Melaksanakan Proses Pengadaan Melalui LPSE.		44 SKPD	43 SKPD		
Mewujudkan optimalisasi perekonomian daerah	Meningkatkan Pengembangan Perekonomian	- Jumlah Data dan Rekomendasi kebijakan KUMKM dan ekonomi kreatif serta Dunia Usaha dan Dunia Industri		1 Dokumen dan 1 Rekomendasi	Data dan 1 Rekomendasi		
		- Jumlah data dan rekomendasi penataan non pemerintah		1 Dokumen dan 1 Rekomendasi	1Data dan Rekomendasi		
	Meningkatkan Investasi dan Kerjasama Ekonomi	- Tercapainya kesesuaian dan pendapatan aset kekayaan yang dipisahkan		65 %	1Data dan Rekomendasi		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
			1	2	3	4	5
		- Jumlah data dan rekomendasi kebijakan tentang pengelolaan aset kekayaan yang dipisahkan		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi dan deviden 175.700.000.0000		
		- Jumlah data dan analisis kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Promosi Daerah		1 Dokumen dan Kebijakan	1 Rekomendasi		
	Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan	- Jumlah data dan rekomendasi Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan Provinsi Riau		1 Dokumen dan Rekomendasi	Data dan 1 Rekomendasi		
		- Tingkat pendapatan yang berasal dari industri ekstraktif		65 %	Data dan 1 Rekomendasi		
	Penguatan Ekonomi Makro dan Informasi Perekonomian	- Jumlah Data dan analisis pengembangan perekonomian per sektor ekonomi		1 Dokumen	1 Rekomendasi dari 9 sektor perekonomian		
		- Rekomendasi kebijakan di bidang inflasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi dan Kebijakan		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah.	- Nilai Predikat LPPD		2 Dokumen (LPPD & ILPPD)	10 besar		
		- Persentase Predikat LPPD Sangat Tinggi Pemerintah Kab/Kota			1 dokumen (laporan)		
		- Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti Oleh Kab/Kota			1 dokumen (laporan)		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
			1	2	3	4	5
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	- Indeks Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Meningkat			100 %		
	Terwujudnya Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota se Provinsi Riau	- Jumlah Segmen Batas mengenai Kesepakatan garis Batas antar Kabupaten/Kota yang berbatasan			4 segmen batas Kabupaten/Kota (Kab. Siak – Kab. Kampar, Kab. Siak – Kab. Rohul, Kab. Kampar – Kab. Pelalawan, Kab. Rohul – Kab. Rohil)		
	Terwujudnya Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum se Provinsi Riau	- Jumlah Rekomendasi terkait Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum se Provinsi Riau			1 dokumen (laporan)		
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	- Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Program Anggaran DEKON dan TUBAN					
		- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pelayanan Umum Pemerintahan					
Mewujudkan transparansi pelaksanaan kebijakan pemerintah.	Peningkatan Pelayanan Kehumasan yang Cepat, Tepat dan Akurat	- Jumlah Penyediaan Informasi yang Update berupa a. Photo b. Buku c. DVD d. CD e. Majalah		85 %	a. 6 paket studio foto 1200 Foto, 10 R 2160 Foto, 4R b. 3300 c. 247 d. 100 e. 12 Edisi, 2000 Eksemplar		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
			1	2	3	4	5
		- Jumlah Penyebaran Informasi Provinsi Riau yang di publikasikan di Media massa melalui TV, Radio, Koran, dan Online		- 7.680 m ² dan 8 set baleho untuk hari-hari besar - 1.440 m ² spanduk - 179 advertorial	- 12 Bulan, 263 Galeri Foto		
Mewujudkan Kebijakan Pemerintah terkait kesejahteraan rakyat	Meningkatkan Kualitas Penanganan masalah bidang sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi	- Jumlah kebijakan tentang permasalahan Sosial.		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		
		- Jumlah kebijakan tentang permasalahan Tenaga Kerja dan Transmigrasi		2 Rekomendasi	1 Rekomendasi		
	Meningkatnya Kualitas Penanganan masalah bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta permasalahan perlindungan anak dan narkoba.	- Jumlah Kebijakan tentang permasalahan Kesehatan dan KB		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		
		- Jumlah Kebijakan tentang permasalahan Pemberdayaan Perempuan		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		
		- Jumlah Kebijakan tentang permasalahan perlindungan anak dan narkoba.		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan pemahaman nilai-nilai Keagamaan	- Jumlah penerima bantuan sarana prasarana ibadah		3000 Sarana Ibadah	3000 Sarana Ibadah		
		- Jumlah peserta MTQ Nasional/Internasional yang berprestasi		12 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
			1	2	3	4	5
		- Jumlah Mahasiswa penerima bantuan pendidikan pada masyarakat kurang mampu		4000 Mahasiswa	2000 Mahasiswa		
Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Hukum dan HAM.	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota	- Jumlah Produk Hukum Provinsi yang Telah di Harmonisasi		60 Pergub, 900 SK Gubernur	60 Pergub, 900 SK Gubernur		
		- Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Diharmonisasi		10 Ranperda	19 Perda		
	Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Hukum	Prosentasi Masyarakat yang Mendapat Penyuluhan Hukum		100 orang			
	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia	- Jumlah Gugatan/Perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara di Pengadilan yang di Tangani		10 Perkara	20 Perkara		
		- Jumlah Permasalahan HAM		75 %	15 Kasus		
	Tersedianya Dokumentasi dan Naskah Hukum Daerah	- Jumlah Produk Hukum yang di Publikasikan melalui JDIH dan CD		65 %	90 Produk, 90 Peraturan		
		- Jumlah Naskah Hukum Daerah yang diharmonisasi		75 %	500 naskah		
Mewujudkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan administrasi dan kebijakan pemerintah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan	- Jumlah Tamu Pemerintah Daerah yang terlayani		150 Kunjungan			
		- Jumlah distribusi surat masuk dan keluar		1000 Materai 604 kg paket 576 kg paket dokumen			
	Meningkatkan Layanan	- Jumlah SPM yang diterbitkan		2500 SPM	3500 SPM		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
			1	2	3	4	5
	Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	- Jumlah persetujuan verifikasi dokumen pertanggungjawaban		2500 Persetujuan	3500 Persetujuan		
	Meningkatkan Tertib Administrasi kebutuhan barang Sekretariat Daerah	- Jumlah Inventarisasi Rencana Kebutuhan Barang (RKB).		1 Dokumen	2 Dokumen		
		- Jumlah jasa service telepon, air dan Listrik.		175 Rekening x 12 bulan, 1 paket	180 Rekening x 12 bulan, 1 paket		
	Meningkatkan Peran Protokol dan Persandian	- Jumlah Acara / Event / Resepsi Jamuan Tamu		100 Kedatangan	175 Kedatangan		
		- Jumlah Kawat Masuk / SANDI		1500 Kawat	2000 Kawat		
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase SKPD yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran		65 %	43 SKPD		
	Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	- Jumlah SKPD yang dilakukan Pembinaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)			14 SKPD		
		- Jumlah Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		15 Bidang SPM	6 Bidang SPM		
		- Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun dan diterapkan oleh SKPD Provinsi Secara Efektive		51 SKPD			
		- Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun dan diterapkan oleh SKPD Kab/Kota Secara Efektive		12 Kab/Kota			
		- Jumlah Naskah Dinas Elektronik yang diterapkan oleh SKPD Provinsi		2 SKPD			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
			1	2	3	4	5
		- Jumlah Naskah Dinas Elektronik yang diterapkan oleh SKPD Kab/ Kota		12 Kabupaten/ Kota			
		- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang oleh SKPD Provinsi		51 SKPD			
		- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang oleh SKPD Kab/Kota		12 Kabupaten/ Kota			
		- Jumlah SKPD Provinsi yang Punya Kepatuhan Predikat yang Tinggi Terhadap SPP yang diterapkan oleh SKPD Provinsi		5 SKPD	5 SKPD		
		- Jumlah SKPD Kab/Kota yang Punya Kepatuhan Predikat yang Tinggi Terhadap SPP yang diterapkan oleh SKPD Kab/Kota		12 Kab/Kota	12 Kab/Kota		
		- Jumlah Analisis Jabatan ANJAB yang disusun oleh SKPD Provinsi					
	Penguatan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	- Nilai AKIP		C	B		
		- Pengembangan Management Kinerja Organisasi		65 %			
	Meningkatkan Pemantapan Road Map Reformasi Birokrasi	- Jumlah SKPD yang melaksanakan 8 area perubahan			43 SKPD		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
			1	2	3	4	5
Mewujudkan Kebijakan Pemerintah terkait kemasyarakatan	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kesatuan bangsa dan politik	- Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Kesatuan bangsa dan politik		2 Rekomendasi	1 Dokumen		
	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran Pemuda dan Olahraga	- Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Kepemudaan		1 Rekomendasi	1 Dokumen		
		- Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Olahraga		1 Rekomendasi	1 Dokumen		
	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat	- Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Pemberdayaan Masyarakat.		1 Rekomendasi	1 Dokumen		

4.3 Strategi Dan Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

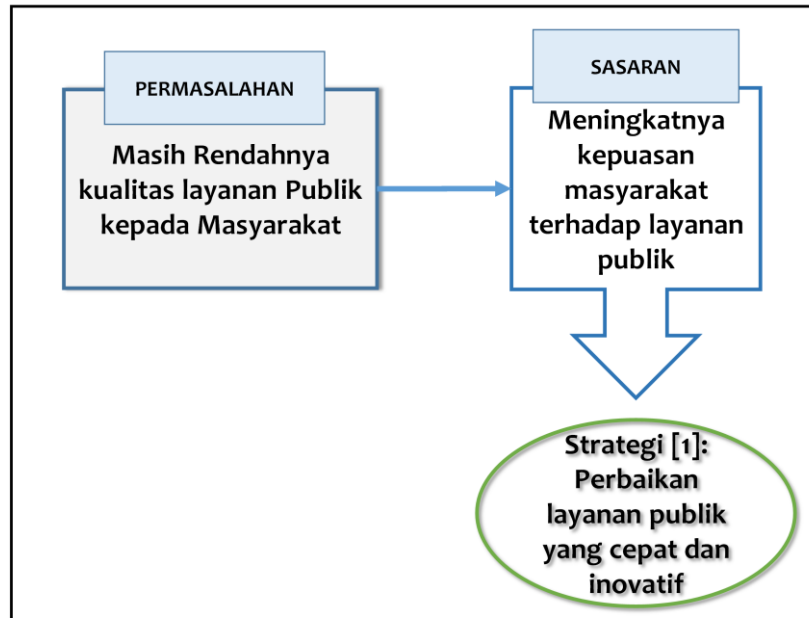
Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra PD dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbaikan Layanan Publik yang Cepat dan Inovatif

Dewasa ini tuntutan kualitas pelayanan publik yang praktis, inovatif, akuntabel dan profesional semakin dibutuhkan. Citra pelayanan di sejumlah lembaga pemerintahan yang terkesan lambat dan berbelit-belit menjadi perhatian khusus dalam program percepatan reformasi birokrasi. Oleh karenanya, tuntutan pelayanan publik yang cepat dan inovatif terus diupayakan sebagai salah satu dari tuntutan reformasi birokrasi.

Gambar 4.1
Perbaikan Layanan Publik yang Cepat dan Inovatif

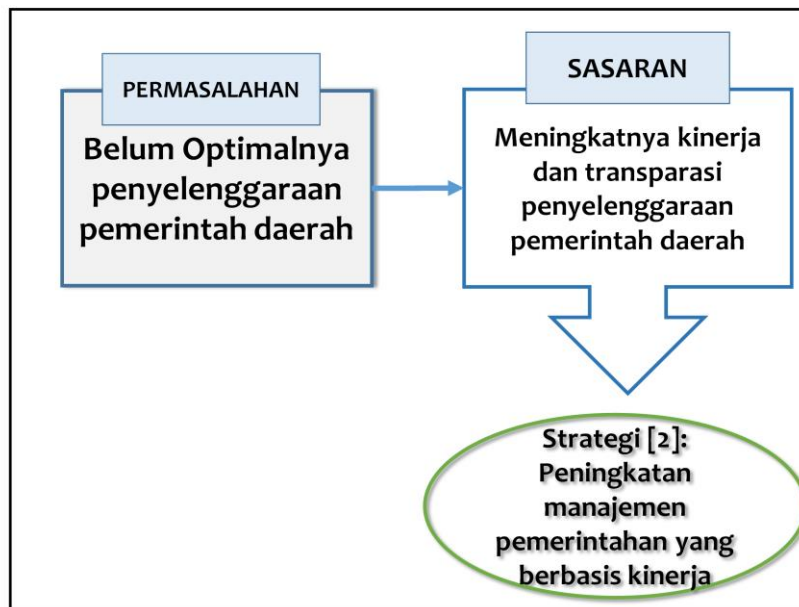


Peningkatan pelayanan publik adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 disebutkan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel. Untuk meningkatkan pelayanan, masyarakat diupayakan terlibat dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik, serta penyampaian keluhan, pengaduan dan apresiasi. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat ini akan mendukung penyempurnaan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

2. Peningkatan Manajemen Pemerintahan yang Berbasis Kinerja

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kinerja. Upaya Sekretariat Daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan adalah dengan memprioritaskan pada area perubahan seluruh aspek pemerintahan. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah yang berorientasi kinerja dan hasil.

Gambar 4.2
Peningkatan Manajemen Pemerintahan yang Berbasis Kinerja



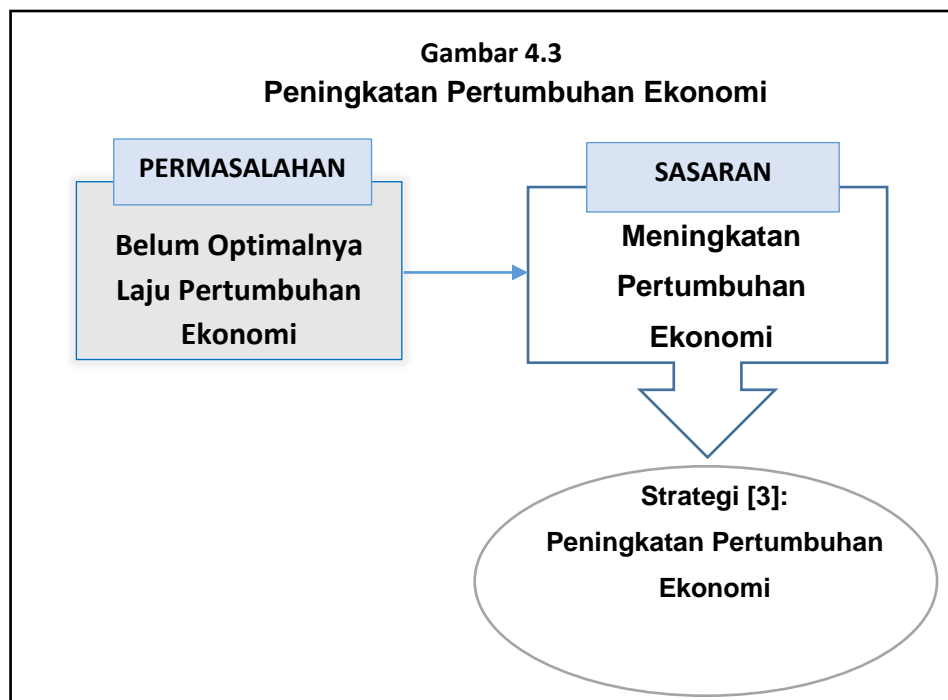
Penambahan kapasitas aparatur yang berkualitas juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja birokrasi, untuk mewujudkan kinerja aparatur yang baik memerlukan koordinasi dan manajemen yang kooperatif sehingga pelayanan dapat berjalan dengan optimal.

Selanjutnya diperlukan upaya percepatan penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja agar reformasi birokrasi dapat segera terwujud. Selain itu, kualitas manajemen kinerja harus didukung oleh sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidangnya serta penguatan kelembagaan dan

akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi akan merealisasikan berbagai inovasi manajemen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan.

3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dalam upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan ekonomi dilakukan melalui beberapa strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Provinsi Riau yaitu dengan melakukan koordinasi atau pembinaan terhadap BUMD, mengontrol laju inflasi, dan melakukan optimalisasi penyerapan APBD. Selain itu pengendalian dan pengelolaan aset daerah Provinsi Riau secara efektif akan mendorong percepatan pembangunan daerah dari segi infrastruktur dan layanan masyarakat.



Satu diantara berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan melakukan tata kelola terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbasis teknologi dengan menerapkan sistem keterbukaan informasi. Pengelolaan BUMD nantinya diharapkan melakukan penerapan teknologi menjadi indikator sistem terintegrasi menggunakan IT. Sehingga manajemen

pengelola perusahaan milik pemerintah selama ini yang hanya fokus memberikan laporan pelaksanaan perusahaan kepada pemegang saham tapi juga bisa diakses publik.

Pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi Riau bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau juga telah membuat program pengendalian inflasi dalam road map, dengan sasaran mengawal pencapaian sasaran inflasi yang rendah dan stabil, dalam rapat high level meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Riau dengan tema peningkatan infrastruktur dan tata niaga bahan pangan untuk stabilisasi harga.

Optimalisasi penyerapan APBD dilakukan melalui Pengesahan APBD dilakukan lebih awal sehingga bisa mendorong organisasi Perangkat Daerah untuk lebih mengoptimalkan kinerja dan penyerapan anggaran. Optimalisasi penyerapan anggaran merupakan hal yang sangat penting mengingat hal ini dapat mendorong perekonomian masyarakat.

Setelah perumusan strategi kemudian dijabarkan kedalam kebijakan yang lebih terperinci. Kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Berikut ini keterkaitan strategi dan kebijakan pembangunan Sekretariat Daerah.

Tabel 4.6
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan
Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Perbaikan layanan publik yang cepat dan inovatif kepada masyarakat	Optimalisasi perangkat dan struktur organisasi dalam memberikan pelayanan publik
			Perbaikan SOP layanan publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya kinerja dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja	Peningkatan pemahaman PD dalam menyusun dokumen perencanaan dan IKU
			Peningkatan peran provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam membina peningkatan kinerja kab/kota
Meningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Mewujudkan keberhasilan pembangunan ekonomi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Melakukan koordinasi atau pembinaan terhadap BUMD
			Mengontrol laju inflasi
			Optimalisasi penyerapan APBD

Bab 5 **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Sekretariat Daerah Provinsi Riau untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Adapun rincian program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Riau terdapat pada Tabel 5.1.

TABEL 5.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
Meningkatkan pengendalian pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan pengadaan yang akuntabel dan transparan.	1. Terselenggara-ranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dari Dana APBD dan APBN 2. Terselenggara-ranya Proses Pengadaan	1. Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD Provinsi Riau 2. Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBN Provinsi Riau 3. Tingkat	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tercapainya pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkup sekretariat daerah Prov. Riau	n/a	7%	446	30%	1406	53%	1460	4 dokumen	1463,242	100%	1460	100%	6.235	biro adm. Pembangunan

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
	Barang dan Jasa yang Transparan dan Akuntabel	kesesuaian target perencanaan dengan realisasi 4. Jumlah Paket Pengadaan yang di Lelang Melalui ULP dan LPSE 5. Jumlah Aparatur Pemerintah Provinsi Riau Yang Mengikuti Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 6. Jumlah SKPD Yang Melaksanakan Proses Pengadaan Melalui LPSE.	Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya Renja Setda Prov. Riau dan LAKIP Biro Adm. Pembangunan		100%	250	1 Dok. Draft Awal Renja Setda, 1 Dok.Draft Akhir Renja Setda, 1 Dokumen Renja Setda, 1 Dokumen LAKIP Biro	500	1 Dok. Draft Awal Renja Setda, 1 Dok. Draft Akhir Renja Setda, 1 Dokumen Renja Setda, 1 Dokumen LAKIP Biro	500	1 Dok. Draft Awal Renja Setda, 1 Dok. Draft Akhir Renja Setda, 1 Dokumen Renja Setda, 1 Dokumen LAKIP Biro	500	1 Dok. Draft Awal Renja Setda, 1 Dok. Draft Akhir Renja Setda, 1 Dokumen Renja Setda, 1 Dokumen LAKIP Biro	500	4 Dok. Draft Awal Renja Setda, 4 Dok. Draft Akhir Renja Setda, 4 Dokume n Renja Setda, 4 Dokume n LAKIP Biro	2.250	biro adm. Pembangunan
			Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Setda Provinsi Riau	Sinkronisasi Program/Kegi atan Perencanaan		100%	196	100%	400	100%	450	100%	450	100%	450	100%	1.946	biro adm. Pembangunan
			Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Setda Provisi Riau	Terkoordinasi nya penyusunan dokumen perencanaan lingkup setda Provisi Riau				1 Kali Pertemuan, 1 Dok. Draft Renja Setda,1 Dok. Renja Setda	400	1 Kali Pertemuan, 1 Dok. Draft Renja Setda,1 Dok. Renja Setda	400	1 Kali Pertemuan, 1 Dok. Draft Renja Setda,1 Dok. Renja Setda	400	1 Kali Pertemuan, 1 Dok. Draft Renja Setda,1 Dok. Renja Setda	400	1 Kali Pertemuan, 1 Dok. Draft Renja Setda,1 Dok. Renja Setda	4 Kali Pertemu an, 4 Dok. Draft Renja Setda, 4 Dok.	1.600

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
															Renja Setda			
			Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelaksanaan APBD/APBN Lingkup Setda Prov. Riau	Terlaksananya Penyerapan Anggaran APBD/APBN Lingkup Setda Prov. Riau			4 kali pertemuan	106	4 kali pertemuan	110	4 kali pertemuan	113,242	4 kali pertemuan	110	16 kali pertemuan	439	biro adm. Pembangunan	
			PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Persentase Pencapaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian kebijakan kepala daerah	n/a	16%	12.736	38%	17.177	58%	16.452	79%	16.477	100%	16.502	100%	79.344	biro adm. Pembangunan
			Pengendalian kegiatan APBD Provinsi Riau di 12 Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau	Tersedianya data realisasi fisik dan keuangan kegiatan per triwulan		3 Dokumen	500	3 Dokumen	650	3 Dokumen	650	3 Dokumen	650	3 Dokumen	650	15 Dokumen	3.100	biro adm. Pembangunan

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pengendalian kegiatan APBN Provinsi Riau di 12 Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau	Tersedianya Data Perkembanga n Pelaksanaan Program/Kegi atan APBN di Kab/Kota se- Prov. Riau		3 Dokumen	300	3 Dokumen	400	3 Dokumen	400	3 Dokumen	400	3 Dokumen	400	15 Dokume n	1.900	biro adm. Pembangunan
			Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau	Tersedianya buku laporan akhir pelaksanaan APBD		100 buku	342	100 buku	200	100 buku	200	100 buku	200	100 buku	200	500 Buku	1.142	biro adm. Pembangunan
			Promosi dan Publikasi LPSE	Tersebarluasn ya informasi LPSE		1 media cetak dan 1 media elektronik	150	1 media cetak dan 1 media elektronk	300	1 media cetak dan 1 media elektronik	300	1 media cetak dan 1 media elektronik	300	1 media cetak dan 1 media elektronik	300	5 media cetak dan 5 media elektroni k	1.350	biro adm. Pembangunan
			Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data realisasi fisik dan keuangan Kegiatan APBD Prov. Riau secara online		1 sistem	531	1 sistem	400	1 sistem	400	1 sistem	400	1 sistem	400	5 sistem	2.131	biro adm. Pembangunan

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Rapat Koordinasi Tim Pengelola LPSE se-Provinsi Riau	Meningkatnya Kemampuan Pengelola LPSE Se-Provinsi Riau		100%	150	100%	150	100%	150	100%	150	100%	150	100%	750	biro adm. Pembangunan
			Sosialisasi Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dari dana APBN	Meningkatnya pemahaman aparatur tentang peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan APBN		250 aparatur	150	250 aparatur	250	250 aparatur	250	250 aparatur	250	250 aparatur	250	1,250 aparatur	1.150	biro adm. Pembangunan
			Penyusunan Pedoman Umum dan Juknis Pelaksanaan Kegiatan APBN	Pelaksanaan Kegiatan APBN sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	500	biro adm. Pembangunan
			Percepatan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran APBD	Tersedianya data percepatan penyerapan anggaran		1 Sistem Teppa, 12 Buku Laporan	552	1 Sistem Teppa, 12 Buku Laporan	600	1 Sistem Teppa, 12 Buku Laporan	600	1 Sistem Teppa, 12 Buku Laporan	600	1 Sistem Teppa, 12 Buku Laporan	600	5 Sistem Teppa, 60 Buku Laporan	2.952	biro adm. Pembangunan

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Provinsi Riau	APBD SKPD dan Kab/Kota se-Prov. Riau														
			Penyusunan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang bersumber dana dari APBD Provinsi Riau	Tersedianya Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang bersumber dana dari APBD Provinsi Riau		200 buku juknis APBN dan 200 buku juknis APBN	200	200 buku juknis APBN dan 200 buku juknis APBN	300	200 buku juknis APBN dan 200 buku juknis APBN	300	200 buku juknis APBN dan 200 buku juknis APBN	300	200 buku juknis APBN dan 200 buku juknis APBN	300	1000 buku juknis APBN dan 1000 buku juknis APBN	1.400	biro adm. Pembangunan
			Pembinaan Jasa Usaha Pembangunan	Terlaksananya koordinasi antara Pemerintah dengan pihak ketiga		4 kali pertemuan	125	4 kali pertemuan	150	4 kali pertemuan	150	4 kali pertemuan	150	4 kali pertemuan	150	20 kali pertemuan	725	biro adm. Pembangunan
			Evaluasi Pelaksanaan Program APBN	Tersedianya buku rekapitulasi laporan kemajuan fisik dan keuangan		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	500	biro adm. Pembangunan

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				APBN TAHUN 2014														
			Pengembangan dan Penataan LPSE Provinsi Riau	Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui e-Procurement		100%	442	100%	442	100%	442	100%	442	100%	442	100%	2.210	biro adm. Pembangunan
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan LPSE se-Propinsi Riau	Tersedianya Data LPSE se-Propinsi Riau		1 laporan movev	137	1 laporan movev	250	1 laporan movev	250	1 laporan movev	250	1 laporan movev	250	5 laporan movev	1.137	biro adm. Pembangunan
			Penguatan Sekretariat Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Provinsi Riau	Terlaksananya Penguatan Sekretariat Percepatan Pemabngunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Provinsi Riau		1 Tim Pokja Provinsi	696	1 Tim Pokja Provinsi	500	1 Tim Pokja Provinsi	500	1 Tim Pokja Provinsi	500	1 Tim Pokja Provinsi	500	5 Tim Pokja Provinsi	2.696	biro adm. Pembangunan
			Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terlaksananya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		SKPD 1 Tahun Anggaran	3.761	SKPD 1 Tahun Anggaran	5.160	SKPD 1 Tahun Anggaran	5.160	SKPD 1 Tahun Anggaran	5.160	SKPD 1 Tahun Anggaran	5.160	SKPD 5 Tahun Anggara	24.401	biro adm. Pembangunan

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			(ULP)	(ULP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau											n			
			Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan	Terlaksananya evaluasi terhadap hasil litbang bidang Pembangunan		2 kali pertemuan	300	2 kali pertemuan	300	2 kali pertemuan	300	2 kali pertemuan	300	2 kali pertemuan	300	10 kali pertemuan	1.500	biro adm. Pembangunan
			Rakortek Pengelola LPSE Se Provinsi Riau dan Rapat Koordinasi Wilayah LPSE Se Sumatera	Terlaksananya Rakortek Pengelola LPSE Se Provinsi Riau dan Rapat Koordinasi Wilayah LPSE Se Sumatera		1 kali Pertemuan	750	1 kali Pertemuan	750	1 kali Pertemuan	750	1 kali Pertemuan	750	1 kali Pertemuan	750	5 kali Pertemuan	3.750	biro adm. Pembangunan
			Partisipasi Setda Prov Riau pada Pameran Pembangunan Riau Expo	Tersedianya wadah bagi Biro di Lingk. Setda Prov.Riau untuk menyebarluaskan hasil program		1 event	350	1 event	350	1 event	350	1 event	350	1 event	350	5 event	1.750	biro adm. Pembangunan

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Rapat Koordinasi ULP se-Provinsi Riau	Terlaksananya Rapat Koordinasi ULP se-Provinsi Riau		1 kali pertemuan	200	1 kali pertemuan	200	1 kali pertemuan	200	1 kali pertemuan	200	1 kali pertemuan	200	5 kali pertemuan	1.000	biro adm. Pembangunan
			Fasilitasi Penyelesaian Sanggah Banding Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Riau	Terselesaikannya masalah sanggah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Riau		1 tahun anggaran	250	1 tahun anggaran	250	1 tahun anggaran	250	1 tahun anggaran	250	1 tahun anggaran	250	5 tahun anggaran	1.250	biro adm. Pembangunan
			Pelaksanaan dan Penataan LPSE Provinsi Riau.	Tersedianya Sistem Lelang secara online		1 sistem (LPSE)	950	1 sistem (LPSE)	950	1 sistem (LPSE)	950	1 sistem (LPSE)	950	1 sistem (LPSE)	950	1 sistem (LPSE)	4.750	biro adm. Pembangunan
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan aparatur	n/a	11%	2.649	31%	4.703	54%	5.503	76%	4.369	100%	5.293	100%	22.517	biro adm. Pembangunan
			Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa bagi	Jumlah Aparatur yang profesional dalam		80 Aparatur	300	80 Aparatur	326	80 Aparatur	351	80 Orang	245,865	80 Orang	401	400 Orang	1.623,865	biro adm. Pembangunan

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pengelola Kegiatan Dana APBD/APBN	pengada an barang/jasa pemerintah di setiap SKPD														
			Bimtek Manajemen Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tersedianya Aparatur yang Mampu dalam Penye- lesaian masalah Sengketa		100 orang	250	100 orang	267	100 orang	267	100 orang	267	100 orang	267	500 orang	1.318	biro adm. Pembangunan
			Bimtek Pernyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan HPS	Peningkatan Profesionalis me Aparatur di Bidang Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan HPS		100%	250	100%	250	100%	250	100%	250	100%	250	100%	1.250	biro adm. Pembangunan
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) LPSE Prov. Riau	Tersedianya pedoman bekerja bagi pegawai Biro Administrasi		100%	150	100%	150	100%	150	100%	150	100%	150	100%	750	biro adm. Pembangunan

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Pembangunan														
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara LPSE	Meningkatnya Kemampuan Teknis Aparatur Penyelenggara LPSE Prov. Riau		75 Orang	200	75 Orang	300	75 Orang	300	75 Orang	300	75 Orang	300	75 Orang	1.400	biro adm. Pembangunan
			Partisipasi Pada Pameran Pembangunan Riau Expo	Terlaksananya keikutsertaan pada event pameran pembangunan Riau Expo		100%	269	100%	269	100%	269	100%	269	100%	269	100%	1.345	biro adm. Pembangunan
			Peningkatan kapasitas Aparatur Biro Administrasi Pembangunan	Meningkatnya kapasitas pegawai Biro Administrasi Pembangunan				60 orang	611	60 orang	611	60 orang	611	60 orang	611	240 orang	2.444	biro adm. Pembangunan
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangan Terkait Pengadaan	Aparatur yang memiliki pengetahuan lebih terkait Kebijakan dan Peraturan Perundangan				120 orang	200	120 orang	200	120 Orang	143,473	120 Orang	200	480 Orang	743,473	biro adm. Pembangunan

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Barang/Jasa	Terkait Pengadaan Barang/Jasa														
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN	persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan	n/a	13%	6.205	34%	10.467	56%	10.705	78%	8.362	100%	10.545	100%	46.284	biro adm. Pembangunan
			Pelayanan administrasi dan ketatausahaan biro	Tersedianya sarana pendukung kelancaran ketaausahaan biro				12 Bulan	371	12 Bulan	371					48 Bulan	742	biro adm. Pembangunan
			Standarisasi LPSE Provinsi Riau	Tercapainya standarisasi LPSE Prov. Riau				1 LPSE	500	1 LPSE	500	1 LPSE	500	1 LPSE	500	1 LPSE	2.000	biro adm. Pembangunan
			Penyusunan SOP Pelelangan melalui ULP	Tersedianya pedoman pelaksanaan Lelang melalui ULP Provinsi Riau				1 dokumen	150	1 dokumen	150	1 dokumen	150	1 dokumen	150	4 dokumen	600	biro adm. Pembangunan

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik							1 Tahun Anggaran	74.421	1 Tahun Anggaran	75.461	12 Bulan	149.882	biro adm. Pembangunan	
			Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan Biro	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan							1 Tahun Anggaran	188	1 Tahun Anggaran	371	12 Bulan	559	biro adm. Pembangunan	
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase sistem laporan capaian dan keuangan yang meningkat							4 Dokumen	403,8969	4 Dokumen	900	12 Bulan	1.304	biro adm. Pembangunan	
			Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan							3 Dokumen	209,822	3 Dokumen	500	4 Dokumen	709,822	biro adm. Pembangunan	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) Setda Provinsi Riau							1 Dokumen	194,0749	1 Dokumen	400	4 Dokumen	594,0749	biro adm. Pembangunan	
			PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah								6.535,663		12.410,000		18.946	biro adm. Pembangunan	
			Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah							1 pengembangan sistem	180	1 pengembangan sistem	400	2 pengembangan sistem	580	biro adm. Pembangunan	
			Penyusunan Pedoman Umum dan Petunjuk	Jumlah Buku Petunjuk Pelaksanaan							200 Buku	137,765	200 Buku	400	400 Buku	538	biro adm. Pembangunan	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang bersumber dana dari APBN dan APBD Provinsi Riau	Kegiatan Pembangunan yang bersumber dana dari APBD dan APBN Provinsi Riau														
			Pelaksanaan dan Penataan LPSE Provinsi Riau	Jumlah Layanan Internet pada LPSE Provinsi Riau							1 Tahun Layanan Internet	679,11	1 Tahun Layanan Internet	950	2 Tahun Layanan Internet	1.629	biro adm. Pembangunan	
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan LPSE se- Provinsi Riau.	Jumlah Data Laporan LPSE se- Provinsi Riau							1 Laporan Monev	133,540	1 Laporan Monev	250	2 Laporan Monev	384	biro adm. Pembangunan	
			Penguatan Sekretariat Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Provinsi Riau	Jumlah Pertemuan Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi, dan Supervisi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan							11 Pertemuan	215,063	11 Pertemuan	500	22 Pertemuan	715	biro adm. Pembangunan	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Sanitasi Pemukiman (PPSP) di 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau														
			Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau	Jumlah SKPD yang melakukan proses pengadaan di Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau							SKPD 1 Tahun Anggaran	2.809,837	SKPD 1 Tahun Anggaran	5.160	SKPD 1 Tahun Anggaran	7.970	biro adm. Pembangunan	
			Partisipasi Setda Prov Riau pada Pameran Pembangunan Riau Expo	Jumlah event yang diikuti pada Pelaksanaan Pameran Tahunan							1 Event	184,542	1 Event	350	2 Event	535	biro adm. Pembangunan	
			Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran APBD	Jumlah Laporan data penyerapan APBD Provinsi							12 Laporan	304,914	12 Laporan	600	24 Laporan	905	biro adm. Pembangunan	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Provinsi Riau	dan Kabupaten/kota se Provinsi Riau Per Bulan														
			Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Riau di 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau	Jumlah Dokumen data Perkembangan dan pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Riau di 12 Kabupaten/Kota Per Semester							3 Dokumen	278,051	3 Dokumen	650	6 Dokumen	928	biro adm. Pembangunan	
			Pengendalian Kegiatan APBN Provinsi Riau di 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau	Jumlah Dokumen laporan Perkembangan dan Pelaksanaan program/kegiatan APBN (Dekonsentrasi dan tugas							2 Dokumen	292,842	2 Dokumen	400	2 Dokumen	693	biro adm. Pembangunan	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				pembantuan) di 12 Kabupaten/Kota se Prov. Riau														
			Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD di Provinsi Riau	Jumlah Buku laporan akhir pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Riau							100 Buku	100	100 Buku	200	200 Buku	300	biro adm. Pembangunan	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan								243,786		500		743,786	biro adm. Pembangunan	
			Standarisasi LPSE Provinsi Riau	Jumlah dokumen standarisasi LPSE Prov. Riau							4 Dokumen Standarisasi LPSE	243,786	4 Dokumen Standarisasi LPSE	500	8 Dokumen Standarisasi LPSE	743,786	biro adm. Pembangunan	
Mewujudkan optimalisasi perekonomian daerah	1. Meningkatkan Pengembangan Perekonomian	1.Jumlah Data dan Rekomendasi kebijakan KUMKM dan ekonomi kreatif serta Dunia Usaha dan	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN	Persentase Pencapaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian	n/a	16%	12.736	38%	17.177	58%	16.452	79%	16.477	100%	16.502	100%	79.344	biro adm. Perekonomian & SDA

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
	2. Meningkatkan Investasi dan Kerjasama Ekonomi, 3. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan	Dunia Industri 2.Jumlah data dan rekomendasi penataan non pemerintah 3.Tercapainya kesesuaian dan pendapatan aset kekayaan yang dipisahkan 4.Jumlah data dan rekomendasi kebijakan tentang pengelolaan aset kekayaan yang dipisahkan 5.Jumlah data dan analisis kebijakan akan di bidang Penanaman Modal dan Promosi Daerah 6.Jumlah data dan rekomendasi Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya	KEBIJAKAN KDH	kebijakan kepala daerah														
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Beras Miskin se Provinsi Riau	Terlaksananya Koordinasi, monitoring dan evaluasi, desinasi penyaluran raskin		100%	550	227.656 RTS-PM di 12 Kab/Kota	650	227.656 RTS-PM di 12 Kab/Kota	500	227.656 RTS-PM di 12 Kab/Kota	500	227.656 RTS-PM di 12 Kab/Kota	500	227.656 RTS-PM di 12 Kab/Kota	2.700	biro adm. Perekonomian & SDA
			Penyusunan Program dan Pelaporan Biro Administrasi Perekonomian	Tersedianya Data Rencana Program, Kegiatan Bidang Perekonomian dan Tersedianya Laporan Akhir Tahun Biro Administrasi Perekonomian		100%	200	1 laporan	800	1 laporan	200	1 laporan	200	1 laporan	200	5 laporan	1.600	biro adm. Perekonomian & SDA
	4. Penguatan Ekonomi		Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi Koperasi	Tersedianya informasi dan koordinasi		100%	150	1 Rekomendasi dan Kebijakan	625	1 Rekomendasi dan Kebijakan	650	1 Rekomendasi dan Kebijakan	675	1 Rekomendasi dan Kebijakan	700	5 Rekomendasi dan Kebijakan	2.800	biro adm. Perekonomian & SDA

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
	i Makro dan Informasi Perekonomian	Buatan Provinsi Riau 7. Tingkat pendapatan yang berasal dari industri ekstraktif 8. Jumlah Data dan analisis pengembangan perekonomian per sektor ekonomi 9. Rekomendasi kebijakan di bidang inflasi	Rekonsialisasi Pengelolaan Penerimaan Daerah dari Kekayaan yang dipisahkan	Tersedianya data penyertaan Modal dan Kontribusi pendapatan Daerah dan Kekayaan Daerah		100%	500	7 BUMD dan 2 Penyertaan Modal di Pekanbaru	500	7 BUMD dan 2 Penyertaan Modal di Pekanbaru	500	7 BUMD dan 2 Penyertaan Modal di Pekanbaru	500	7 BUMD dan 2 Penyertaan Modal di Pekanbaru	500	7 BUMD dan 8 Penyertaan Modal di Pekanbaru	2.500	biro adm. Perekonomian & SDA
Fasilitasi Inflasi Daerah (TPID)			Tersedianya informasi dan rekomendasi dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Riau		100%	300	Terbentukan TPID di 2 Kab/Kota	500	Terbentukan TPID di 2 Kab/Kota	500	Terbentukan TPID di 2 Kab/Kota	500	Terbentukan TPID di 2 Kab/Kota	500	Terbentukan TPID di 2 Kab/Kota	2.300	biro adm. Perekonomian & SDA	
Rekonsiliasi Penataan Usaha Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Industri Ekstraktif			Tersedianya Data Kontribusi/Hasil Pendapatan Daerah yang bersumber dari Industri Ekstraktif				1 Laporan	850	1 Laporan	850	1 Laporan	850	1 Laporan	850	4 Laporan	3.400	biro adm. Perekonomian & SDA	
Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan			Terlaksananya Kooordinasi, Pemantauan,				1 Laporan	500	1 Laporan	500	1 Laporan	500	1 Laporan	500	4 Laporan	2.000	biro adm. Perekonomian &	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pentaaan Lembaga Ekonomi Pemerintah dan Non Pemerintah	Evaluasi dan Penataan Lembaga Ekonomi Pemerintah dan Non Pemerintah													SDA	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMD DAN LEMBAGA KEUANGAN DAERAH	persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Daerah	n/a	25%	1.150	25%	0	50%	1.150	75%	1.150	100%	1.150	100%	4.600	biro adm. Perekonomian & SDA
			Pembinaan, koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BUMD/	Terciptanya Koordinasi dan Pemantauan antara Pemerintah Provinsi, Kab/Kota dalam Peningkatan Pengelolaan		100%	650			100%	650	100%	650	100%	650	100%	2.600	biro adm. Perekonomian & SDA

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				BUMN/ Perusahaan Daerah														
			Penyusunan Ranperda Tata Kelola BUMD Provinsi Riau	Tersusunnya Peraturan Daerah BUMD yang akan digunakan sebagai pedoman tambahan modal bagi BUMD dan Investasi Riau		100%	500			100%	500	100%	500	100%	500	100%	2.000	biro adm. Perekonomian & SDA
			PROGRAM OPTIMALISASI KERJASAMA PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIA N DENGAN MEWUJUDKAN KERJASAMA YANG BAIK ANTARA PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH PUSAT, SWASTA	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan optimalsisasi kerjasama pembangu- nan bidang perekonomi- an dengan mewujudkan kerjasama yang baik antara pemerintah	n/a	8%	1.250	25%	2.530	50%	3.780	75%	3.780	100%	3.780	100%	15.120	biro adm. Perekonomian & SDA

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			DAN MASYARAKAT	daerah, pemerintah pusat, swasta dan masyarakat														
			Koordinasi dan Fasilitasi Pemantapan Perekonomian Daerah	Tersedianya Informasi dan rekomendasi dalam rangka pengembangan perekonomian Provinsi Riau		100%	250			100%	250	100%	250	100%	250	100%	1.000	biro adm. Perekonomian & SDA
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Industri dan Perdagangan se Provinsi Riau	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan rekomendasi pengembangan industri dan perdagangan Provinsi Riau		100%	250			100%	250	100%	250	100%	250	100%	1.000	biro adm. Perekonomian & SDA
			Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan Perekonomian Pedesaan	Tersedianya Bahan dan Data Tentang Perekonomian Pedesaan		100%	250			100%	250	100%	250	100%	250	100%	1.000	biro adm. Perekonomian & SDA

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah	Tersedianya Data dan Infromasi Sumber Daya Alam Se Provinsi Riau.		100%	250			100%	250	100%	250	100%	250	100%	1.000	biro adm. Perekonomian & SDA
			Koordinasi Pemantauan dan Pembinaan Perekonomian Perkotaan se Provinsi Riau	Tersedianya data dan Informasi tentang Pembinaan Perekoniman Perkotaan		100%	250			100%	250	100%	250	100%	250	100%	1.000	biro adm. Perekonomian & SDA
			PROGRAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PEREKONOMIA N.	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perekonomi-	n/a	20%	950	40%	950	60%	950	80%	950	100%	950	100%	4.750	biro adm. Perekonomian & SDA

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				an														
			Pengelolaan Sistem Data dan informasi Perekonomian Provinsi Riau	Tersedianya Data dan informasi Perekonomian di Provinsi Riau		100%	400	100%	400	100%	400	100%	400	100%	400	100%	2.000	biro adm. Perekonomian & SDA
			Penyusunan Buletin Perekonomian Riau	Tersusunnya buletin perekonomian Riau secara Periodik		100%	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%	1.500	biro adm. Perekonomian & SDA
			Identifikasi dan Penyusunan Starategi bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Peningkatan Perekonomian Daerah	Tersusunnya Data dan Dokumen Ekonomi kreatif dan Strategi Pengembangannya Pembangunan Pedesaan terintegrasi		100%	250	100%	250	100%	250	100%	250	100%	250	100%	1.250	biro adm. Perekonomian & SDA

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF KUKM.	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUKM	n/a	16%	1.075	37%	1.425	58%	1.425	79%	810	100%	900	100%	5.635	biro adm. Perekonomian & SDA
			Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan Ekonomi Kerakyatann (KUMKM) Provinsi Riau	Diketahuinya perkembangan KUMKM dengan segala permasalahan nya sebagai bahan untuk menyusun kebijakan percepatan dan perluasan pengembangan KUMKM Provinsi Riau		1 Laporan	450	1 Laporan	600	1 Laporan	600	1 Laporan	600	1 Laporan	600	5 Laporan	2.850	biro adm. Perekonomian & SDA
			Pemantapan Pelaksanaan Program Ekonomi Kab/	Terbentuknya Forum Pengembangan n Ekonomi		1 Dokumen	625	1 Dokumen	825	1 Dokumen	825	Kab/Kota	210	Kab/Kota	300	5 Dokume n	2.785	biro adm. Perekonomian & SDA

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Kota se Provinsi Riau	Daerah di Kab/kota Se Provinsi Riau														
			PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi	n/a	0	0	25%	1.500	50%	1.500	75%	600	100%	1.200	100%	4.800	biro adm. Perekonomian & SDA
			Pengelolaan Sitem Data dan Informasi Perekonomian Provinsi Riau	Menyelaraskan program/kegiatan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan propinsi Riau				1 Laporan	750	1 Laporan	750	12 Kab / Kota	300	12 Kab / Kota	300	2 Laporan , 12 Kab/Kota	2.100	biro adm. Perekonomian & SDA
			Penyusunan Buletin Perekonomian Riau	Terdistribusinya Buletein Perekonomian secara periodik				9 Edisi (400x9) Exemplar	750	9 Edisi (400x9) Exemplar	750	100%	300	100%	900	36 Edisi (400x9) Exemplar	2.700	biro adm. Perekonomian & SDA

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pencapaian Pelaksanaan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	n/a	2%	800	25%	8.450	50%	9.150	75%	7.142	100%	7.830	100%	33.372	biro adm. Perekonomian & SDA, biro organisasi, biro hukum & HAM
			Koordinasi dan Fasilitasi Pemantapan Perekonomian Daerah	Tersedianya Informasi dan rekomendasi dalam rangka pengembangan perekonomian Provinsi Riau				1 laporan	500	1 laporan	500	1 laporan	500	1 laporan	500	4 laporan	2.000	biro adm. Perekonomian & SDA
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Industri dan Perdagangan se Provinsi Riau	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan rekomendasi pengembangan industri dan perdagangan Provinsi Riau				1 laporan	500	1 laporan	500	1 laporan	500	1 laporan	500	4 laporan	2.000	biro adm. Perekonomian & SDA
			Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan	Tersedianya data dan Informasi				1 laporan	500	1 laporan	500					2 laporan	1.000	biro adm. Perekonomian &

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati	tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Se Provinsi Riau													SDA	
			Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah Non Hayati	Tersedianya data dan Informasi tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Non Hayati Se Provinsi Riau				1 laporan	500	1 laporan	500					2 laporan	1.000	biro adm. Perekonomian & SDA
			Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pentaan Sumber Daya Buatan	Tersedianya data dan informasi tentang pengembangan Sumber Daya Alam buatan se Provinsi Riau				1 laporan	500	1 laporan	500	1 laporan	500	1 laporan	500	4 laporan	2.000	biro adm. Perekonomian & SDA
			Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian	Kesepakatan dan Rekomendasi arah dan				1 laporan	900	1 laporan	900	Dokumen dan Data	300	Dokumen dan Data	400	4 laporan	2.500	biro adm. Perekonomian & SDA

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Provinsi Riau	pengembangan Perekonomian Riau rangka Pengendalian Perekonomian Provinsi Riau														
			Studi Pola Pembiayaan Pembangunan Daerah Melalui Public Private Partnership	Tersedianya data strategi, model dan tingkat resiko pembiayaan yang mungkin dilakukan olem Pemda melalui Public private Partnership			1 Dokumen	850	1 Dokumen	850	1 Dokumen	850	1 Dokumen	850	4 Dokumen	3.400	biro adm. Perekonomian & SDA	
			Studi Keunggulan Komperatif dan Kompetitif Potensi Ekonomi Daerah bagi Perecepatan Pembangunan Daerah	Teridetifikasin ya Sumber Daya Alam , Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Buatan yang mampu menjadi pengendali kegiatan			1 Dokumen	850	1 Dokumen	850	1 Dokumen	850	1 Dokumen	850	4 Dokumen	3.400	biro adm. Perekonomian & SDA	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				daerah bagi percepatan pembangunan Daerah														
			Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	Terlaksananya koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Penanaman Modal				1 Laporan	500	1 laporan	500	1 laporan	500	1 laporan	500	4 laporan	2.000	biro adm. Perekonomian & SDA
			Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Kerjasama Ekonomi Riau	Tersedianya data, Informasi, Hasil evaluasi kerjasama Ekonomi Riau				1 Laporan	500	1 laporan	500	Dokumen	145	Dokumen	300	2 laporan dan dokume n	1.445	biro adm. Perekonomian & SDA
			Analisis Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Bidang Penanaman Modal di Daerah	Tersedianya Analisa Kebijakan Pemberian Insentif dan Penaman Modal di Daerah				1 Dokumen	600	1 Dokumen	600	1 Dokumen	600	1 Dokumen	600	4 Dokume n	2.400	biro adm. Perekonomian & SDA

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Sumber Daya Alam							12 kab/kota	250	12 kab/kota	400	12 kab/kota	650	biro adm. Perekonomian & SDA	
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pencapaian Pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	n/a	8%	630	31%	1.899	54%	1.899		1.150	100%	1.050	100%	6.628	biro adm. Perekonomian & SDA
			Pembinaan, koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	1. Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi dan Pemanataan BUMD/Perusahaan Daerah Di Provinsi Riau 2. Rekomendasi dalam rangka				2 Regulasi	750	2 Regulasi	750	75 orang, Unit Kerja Terkait Pemerintah Pusat dan Pemerintah	400	75 orang, Unit Kerja Terkait Pemerintah Pusat dan Pemerintah	300	4 Regulasi, 75 orang, Unit Kerja Terkait Pemerintah Pusat dan Pemerintah	2.200	biro adm. Perekonomian & SDA

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Pengembangan BUMD/Perusahaan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2015 3. Terlaksananya Rakor BUMD/Perusahaan Daerah Se Provinsi Riau Tahun											ah			
			Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda Tata Kelola BUMD Provinsi Riau	Tersusunnya Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah BUMD			1 Dokumen	750	1 Dokumen	750	1 Dokumen	750	1 Dokumen	750	4 Dokumen	3.000	biro adm. Perekonomian & SDA	
			PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan								6.536		12.410		18.946	Perekonomian & SDA	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Kepala Daerah														
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Beras Miskin se Provinsi Riau	Terlaksananya penyaluran RASKIN sampai ke penerima manfaat.							12 kab/kota	300	12 kab/kota	750	12 kab/kota	1.050		
			Penyusunan Program dan Pelaporan Biro Administrasi Perekonomian	Menyelaraskan program/kegiatan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan propinsi Riau							12 kab/kota	175	12 kab/kota	300	12 kab/kota	475		
			Rekonsiliasi Penataan Usahaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Industri Ekstraktif	Tercapainya Penerimaan dari Bidang Industri Ekstraktif							7 BUMD dan 2 Penyertaan Modal	145	7 BUMD dan 2 Penyertaan Modal	900	7 BUMD dan 2 Penyertaan Modal	1.045		

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	1. Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Riau. 2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Riau. 3. Rekomendasi dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pro							Dokumen dan Data	350	Dokumen dan Data	300	Dokumen dan Data	650		
			Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pentaan Lembaga Ekonomi Pemerintah dan	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Penataan Lembaga Ekonomi Pemerintah dan Non							12 kab/kota	250	12 kab/kota	300	12 kab/kota	550		

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Non Pemerintah	Pemerintah.														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah.	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1. Nilai Predikat LPPD 2. Persentase Predikat LPPD Sangat Tinggi Pemerintah Kab/Kota 3. Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti Oleh Kab/Kota 4. Indeks Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Meningkat 5. Jumlah Segmen Batas mengenai Kesepakatan garis Batas antar	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN	persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan	n/a	13%	6.205	34%	10.467	56%	10.705	78%	8.362	100%	10.545	100%	46.284	biro adm. Pemerintahan umum
	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 3. Terwujudnya Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten /Kota se Provinsi Riau 4. Terwujudnya Tahapan		Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan Biro Tata Pemerintahan	- Tersusunnya PENJA, RENJA, LAKIP, RKA Biro Administrasi Pemerintahan Umum , - Tertatanya administrasi pada Biro Administrasi Pemerintahan Umum, - Terlaksananya administrasi kinerja secara e-government		4, Dokumen (Penja, Renja, RKA, Lakip) dan 60 orang peserta inhouse training	195	4, Dokumen (Penja, Renja, RKA, Lakip) dan 60 orang peserta inhouse training	850	4, Dokumen (Penja, Renja, RKA, Lakip) dan 60 orang peserta inhouse training	850	4, Dokumen (Penja, Renja, RKA, Lakip) dan 60 orang peserta inhouse training	850	4, Dokumen (Penja, Renja, RKA, Lakip) dan 60 orang peserta inhouse training	850	20 Dokumen (Penja, Renja, RKA, Lakip) dan 300 orang peserta inhouse training	3.595	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
	5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	6. Jumlah Rekomendasi terkait Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum se Provinsi Riau	Fasilitasi Penanganan Konflik se Provinsi Riau	Terlaksananya inventarisasi konflik seProv. Riau dan Terpetakan konflik seProvinsi Riau (Kampar, Siak dan Pelalawan) serta Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam fasilitasi penanganan konflik		100%	490	100%	490	100%	490	100%	490	100%	490	100%	2.450	biro adm. Pemerintahan umum
		7. Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Program Anggaran DEKON dan TUBAN																
		8. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pelayanan Umum Pemerintahan	Fasilitasi dan Monitoring Kerja sama daerah	terciptanya hubungan kerja sama yang baik di wilayah perbatasan dalam rangka peningkatan,p emanfaatan SDM untuk kepentingan masyarakat dan.		100%	210	100%	210	100%	210	100%	210	100%	210	100%	1.050	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Terwujudnya kesepakatan kerjasama daerah antar Kab/Kota dan antar Provinsi Tetangga														
			Penyusunan LKPJ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran		100%	700	1 paket dokumen LKPJ	700	1 paket dokumen LKPJ	700	Terakurnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau	450	Terakurnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau	700	Terakurnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau	3.250	biro adm. Pemerintahan umum
			Penyusunan LPPD Provinsi Riau	1. Meningkatkan kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam membuat dan menyusun LPPD, IKK LPPD dan ILPD Provinsi Riau		100%	400	2 Dokumen (LPPD & ILPPD)	400	2 Dokumen (LPPD & ILPPD)	400	1. Tersusunnya Buku LPPD Provinsi Riau Tahun 2016 2. Tersusunnya Buku IKK LPPD Provinsi	350	1. Tersusunnya Buku LPPD Provinsi Riau Tahun 2016 2. Tersusunnya Buku IKK LPPD Provinsi	1000	8 Dokumen (LPPD & ILPPD)	2.550	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Tahun 2016 2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah daerah dalam rangka mendukung Pencapaian tujuan penyelenggaraan Otonomi							Riau Tahun 2016 3. Tersusunnya Rangkuman LPPD Kab/Kota Provinsi Riau Tahun 2016 4. Tersajinya ILPPD Provinsi Riau Tahun 2016 kepada Masyarakat melalui media cetak dan		Riau Tahun 2016 3. Tersusunnya Rangkuman LPPD Kab/Kota Provinsi Riau Tahun 2016 4. Tersajinya ILPPD Provinsi Riau Tahun 2016 kepada Masyarakat melalui media cetak dan					
			Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Provinsi Riau	Terpenuhinya kewajiban Pemerintah Daerah dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan		100%	300	1 paket dokumen IKK LPPD	300	1 paket dokumen IKK LPPD	300	1 paket dokumen IKK LPPD	300	1 paket dokumen IKK LPPD	300	4 paket dokumen IKK LPPD	1.500	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Daerah Provinsi Riau kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.														
			Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Izin Keluar Negeri Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Anggota DPRD Provinsi Riau dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau	Terfasilitasi dan terkoordinasin ya pengurusan dan penerbitan izin keluar negeri bagi pejabat negara dan legislatif		100%	174	100%	174	100%	174					100%	522	biro adm. Pemerintahan umum
			Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian	Terkelolanya Administrasi Pengesahan Pengangkatan , Pemberhentia		100%	308	100%	308	100%	308	100%	308	100%	308	100%	1.540	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			anggota DPRD Provinsi Riau	n anggota DPRD Provinsi Riau														
			Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau	Terkelolanya Administrasi Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau		100%	145	100%	145	100%	145	100%	145	100%	145	100%	725	biro adm. Pemerintahan umum
			Penyelenggara Pembinaan Otonomi Daerah	Terselenggaranya Seminar Penyelenggaraan Pembinaan dan Penataan Otda.		45 orang peserta seminar, 1 kali pertemuan dan 1 paket dokumen laporan	138	45 orang peserta seminar, 1 kali pertemuan dan 1 paket dokumen laporan	200	45 orang peserta seminar, 1 kali pertemuan dan 1 paket dokumen laporan	200	Seminar penyelenggaraan otonomi daerah dan upacara memperingatan hari otonomi daerah serta Malam Penganugerahan Kab/Kota	250	Seminar penyelenggaraan otonomi daerah dan upacara memperingatan hari otonomi daerah serta Malam Penganugerahan Kab/Kota	350	225 orang peserta seminar, 5 kali pertemuan dan 5 paket dokumen laporan	1.138	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
												Terbaik dalam Penyelenggaraan pengembangan Otonomi Daerah tahun 2017		Terbaik dalam Penyelenggaraan pengembangan Otonomi Daerah tahun 2018				
			Sosialisasi dan monitoring pemilihan Umum anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau	Terwujudnya ketentraman, ketertiban dan pelaporan penyelenggaraan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan kabupaten /kota		100%	238			100%	238	100%	238	100%	238	100%	952	biro adm. Pemerintahan umum
			Pembinaan Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau	Terselenggara nya Pembinaan Penyelenggar aan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Se Provinsi Riau		40 orang peserta seminar, 1 kali pertemuan /rapat, monev di 12 kab/kota dan 1 paket dokumen	151	40 orang peserta seminar, 1 kali pertemuan /rapat, monev di 12 kab/kota dan 1 paket	200	40 orang peserta seminar, 1 kali pertemuan /rapat, monev di 12 kab/kota dan 1 paket dokumen	200	terlaksanan ya fasilitasi penyelengg araan pemerintah an daerah kab/kota se provinsi riau	250	terlaksanan ya fasilitasi penyelengg araan pemerintah an daerah kab/kota se provinsi riau	410	terlaksan anya fasilitasi penyelen ggaraan pemerint han daerah kab/kota se	1.211	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
						laporan		dokumen laporan		laporan						provinsi riau		
			Fasilitasi konsolidasi hubungan antar lembaga dan asosiasi pemerintah daerah	Terfasilitasi dan Terkonsolidasi nya Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Pemerintahan Daerah		60 orang peserta, 1 kali pertemuan /rakor dan 1 paket dokumen laporan	210	60 orang peserta, 1 kali pertemuan /rakor dan 1 paket dokumen laporan	300	60 orang peserta, 1 kali pertemuan /rakor dan 1 paket dokumen laporan	300	60 orang peserta, 1 kali pertemuan /rakor dan 1 paket dokumen laporan	176,973	60 orang peserta, 1 kali pertemuan /rakor dan 1 paket dokumen laporan	400	300 orang peserta, 5 kali pertemuan /rakor dan 5 paket dokume n laporan	1.386,973	biro adm. Pemerintahan umum
			Fasilitasi Penunjang dan penguatan Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah	1. Terwujudnya inventarisasi data-data permasalahan Kabupaten/Ko ta se Provinsi Riau. 2. Terwujudnya penyelenggar aan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi		80 orang peserta, 1 kali pertemuan /rakor, monev di 12 kab/kota dan 1 paket dokumen laporan	193	80 orang peserta, 1 kali pertemuan /rakor, monev di 12 kab/kota dan 1 paket dokumen laporan	275	80 orang peserta, 1 kali pertemuan /rakor, monev di 12 kab/kota dan 1 paket dokumen laporan	275	12 kab/kota, terlaksanan ya rapat pembinaan penyelengg araan pemerintah an daerah dalam rangka tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah	500	12 kab/kota, terlaksanan ya rapat pembinaan penyelengg araan pemerintah an daerah dalam rangka tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah	750	12 kab/kota , terlaksan anya rapat pembina an penyelen ggaraan pemerint ahan daerah dalam rangka tugas	1.993	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi. 3. Terwujudnya pe							Pusat di daerah.		Pusat di daerah.		Gubernu r sebagai wakil pemerintah Pusat di daerah.			
			Rapat koordinasi penyelenggaraa n pemerintahan umum Provinsi Riau	Terselenggara nya wadah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta se Provinsi Riau		50 orang peserta, 1 kali pertemuan / rakor dan 1 Dokumen laporan	175	50 orang peserta, 1 kali pertemuan / rakor dan 1 Dokumen laporan	250	50 orang peserta, 1 kali pertemuan / rakor dan 1 Dokumen laporan	250	50 orang peserta, 1 kali pertemuan / rakor dan 1 Dokumen laporan	250	50 orang peserta, 1 kali pertemuan / rakor dan 1 Dokumen laporan	250	250 orang peserta, 5 kali pertemu an/ rakor dan 5 Dokume n laporan	1.175	biro adm. Pemerintahan umum
			Penguatan Implementasi Pencapaian IPM sebagai Indikator Otonomi Daerah	Terlaksananya Penguatan Implementasi Pencapaian IPM sebagai Indikator Otonomi Daerah		50 orang peserta, 1 kali pertemuan /rakor dan 1 paket dokumen laporan	175	50 orang peserta, 1 kali pertemuan /rakor dan 1 paket dokumen laporan	250	50 orang peserta, 1 kali pertemuan /rakor dan 1 paket dokumen laporan	250	50 orang peserta, 1 kali pertemuan /rakor dan 1 paket dokumen laporan	250	50 orang peserta, 1 kali pertemuan /rakor dan 1 paket dokumen laporan	250	250 orang peserta, 5 kali pertemu an/rakor dan 5 paket dokume n	1.175	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
															laporan			
			Monitoring dan evaluasi penyelenggaraa n desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penyelengga-raan desentralisasi dan pengembang-an otonomi daerah		10 orang peserta (12 kali rapat), monev di 12 kab/kota dan 1 paket Dokumen laporan	160	10 orang peserta (12 kali rapat), monev di 12 kab/kota dan 1 paket Dokumen laporan	200	10 orang peserta (12 kali rapat), monev di 12 kab/kota dan 1 paket Dokumen laporan	200	10 orang peserta (12 kali rapat), monev di 12 kab/kota dan 1 paket Dokumen laporan	200	10 orang peserta (12 kali rapat), monev di 12 kab/kota dan 1 paket Dokumen laporan	200	50 orang peserta (12 kali rapat), monev di 12 kab/kota dan 5 paket Dokume n laporan	960	biro adm. Pemerintahan umum
			Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forkopimda dalam Fungsi Keamanan Daerah, Sosial Budaya dan Kesbangpol dan Penanggulangan	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forkopimda dalam Fungsi Keamanan Daerah, Sosial Budaya dan Kesbangpol		100%	1.844	100%	1.844	100%	1.844	100%	1.844	100%	1.844	100%	9.220	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Bencana	dan Penanggulang an Bencana														
			Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dalam Fungsi Keamanan Daerah, Sosial Budaya dan Kesbangpol dan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya rapat koordinasi pemerintah daerah dan instansi vertikal / Unsur Forkopimda			65 orang peserta, 2 kali pertemuan /rapat , monev di 12 kab/kota dan 1 paket dokumen laporan	2.000	65 orang peserta, 2 kali pertemuan /rapat , monev di 12 kab/kota dan 1 paket dokumen laporan	2.000	Pelaksanaa n Rapat Koordinasi pemerintah daerah dan instansi vertikal / unsur Forkopimda	300	Pelaksanaa n Rapat Koordinasi pemerintah daerah dan instansi vertikal / unsur Forkopimda	850	130 orang peserta, pertemu an/rapat , monev di 12 kab/kota dan 2 paket dokume n laporan	5.150	biro adm. Pemerintahan umum	
			Rapat Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Sumatera Barat dan Provinsi Jambi	Terselenggara nya wadah kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi			1 kali pertemuan /rapat, 1 paket dokumen MOU/Kerja sama	350	1 kali pertemuan /rapat, 1 paket dokumen MOU/Kerja sama	350	1 kali pertemuan /rapat, 1 paket dokumen MOU/Kerja sama	350	1 kali pertemuan /rapat, 1 paket dokumen MOU/Kerja sama	350	4 kali pertemu an/rapat , 4 paket dokume n MOU/Ke rjasama	1.400	biro adm. Pemerintahan umum	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pelayanan administrasi dan ketatausahaan biro	1. Menyusun perencanaan PENJA, RENJA, LAKIP, RKA Biro Administrasi Pemerintahan Umum 2. Tersedianya data dan ketatausahaa n Biro Administrasi Pemerintahan Umum							1.Tersusun nya perencanaan n PENJA, RENJA, LAKIP, RKA Biro Administras i Pemerintah an Umum 2. Terpenuhih nya data dan ketatausah aan Biro Administras i Pemerintah an Umum	135,0292	1.Tersusun nya perencanaan n PENJA, RENJA, LAKIP, RKA Biro Administras i Pemerintah an Umum 2. Terpenuhih nya data dan ketatausah aan Biro Administras i Pemerintah an Umum	850	1.Tersusunnya perencanaan naan PENJA, RENJA, LAKIP, RKA Biro Administ rasi Pemerint ahan Umum 2. Terpenu hinya data dan ketataus ahaan Biro Administ rasi Pemerint ahan Umum	985,029	biro adm. Pemerintahan umum	
			Rapat Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi Riau Dengan Pemerintah	Terwujudnya tahapan persiapan kesepakatan kerjasama daerah antara provinsi riau							75 Aparatur Negara 12 Kabupaten /Kota	375	75 Aparatur Negara 12 Kabupaten /Kota	450	150 Aparatur Negara 12 Kabupat	825,000	biro adm. Pemerintahan umum	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Lainnya	dengan pemerintah provinsi lain yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan kerjasama daerah selanjutnya											en /Kota			
			PROGRAM PENGADAAN TANAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pemerintah Provinsi Riau	n/a	25%	#####	25%	0	50%	260.533	75%	260.813	100%	260.813	100%	1.042.692	biro adm. Pemerintahan umum
			Fasilitasi persiapan Pengadaan tanah se- Provinsi Riau	Terlaksaananya penetapan lokasi Pengadaan tanah se- Provinsi Riau		100%	533			100%	533	100%	533	100%	533	100%	2.132	biro adm. Pemerintahan umum
			Perencanaan Pengadaan Tanah untuk	Terlaksananya Perencanaan Pengadaan		100%	223			100%	223	100%	223	100%	223	100%	892	biro adm. Pemerintahan

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pelayanan Umum Pemerintahan, Pemberdayaan Ekonomi Lokal/Kawasan Bisnis, Kawasan Hijau dan Sarana Bangunan Sosial Lainnya	Tanah untuk Pelayanan Umum Pemerintahan Pemberdayaan Ekonomi Lokal/Kawasan Bisnis, Kawasan Hijau dan Sarana Bangunan Sosial Lainnya													umum	
			Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pelayanan Umum Pemerintahan, Pemberdayaan Ekonomi Lokal/Kawasan Bisnis, Kawasan Hijau dan Sarana Bangunan Sosial Lainnya	Terlaksananya Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pelayanan Umum Pemerintahan Pemberdayaan Ekonomi Lokal/Kawasan Bisnis, Kawasan Hijau dan Sarana Bangunan Sosial Lainnya		100%	1.120			100%	1.120	100%	1.120	100%	1.120	100%	4.480	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Pelayanan Umum Pemerintahan, Pemberdayaan Ekonomi Lokal/Kawasan Bisnis, Kawasan Hijau dan Sarana Bangunan Sosial Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Tanah untuk Pelayanan Umum Pemerintahan Pemberdayaan Ekonomi Lokal/ Kawasan Bisnis, Kawasan Hijau dan Sarana Bangunan Sosial Lainnya		100%	#####			100%	258.657	100%	258.657	100%	258.657	100%	1.034.628	biro adm. Pemerintahan umum
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	n/a	25%	140	25%	0	50%	140	75%	140	100%	140	100%	560	biro adm. Pemerintahan umum
			Fasilitasi Pemantapan Administrasi	Meningkatnya kinerja penyelengara-		100%	140			100%	140	100%	140	100%	140	100%	560	biro adm. Pemerintahan

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pemerintahan Daerah Bidang Kependudukan	an administrasi kependudukan di Provinsi Riau													umum	
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	n/a	12%	12.600	33%	20.955	55%	22.605	78%	17.650	100%	17.750	100%	91.560	biro adm. Pemerintahan umum, biro umum
			Rapat Sinkronisasi Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Riau	Terwujudnya persamaan persepsi kabupaten/ kota dan Pemerintah Provinsi Riau dalam pelaksanaan Dekon & TP		100	175			100	175	100	175	100	175	100	700	biro adm. Pemerintahan umum
			Fasilitasi pembinaan penerapan	Terwujudnya tertib kegiatan Dekon & TP		100	175			100	175	100	175	100	175	100	700	biro adm. Pemerintahan

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			regulasi kegiatan Dekonsentrasi & TP Kabupaten/ Kota 2014	sesuai regulasi dan Pelaporan													umum	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	n/a	25%	2.339	25%	0	50%	2.339	75%	1.747	100%	1.747	100%	8.172	biro adm. Pemerintahan umum
			Fasilitasi Pembinaan Perangkat Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Riau		100%	175			100%	175	100%	175	100%	175	100%	700	biro adm. Pemerintahan umum
			Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Camat se-Provinsi Riau	Terwujudnya aparatur pemerintahan Kecamatan yang		100%	450			100%	450	100%	450	100%	450	100%	1.800	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				berkualitas dan meningkatnya motivasi Camat dalam melaksanakan pelayanan prima.														
			Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Bupati/Walikota Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten /kota se-Provinsi Riau.		100%	420			100%	420	100%	420	100%	420	100%	1.680	biro adm. Pemerintahan umum
			Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 12 Kab/Kota Se-Provinsi Riau	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terhadap masyarakat di Kecamatan dan mendekatkan pelayanan administrasi kepada		100%	158			100%	158	100%	158	100%	158	100%	632	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				masyarakat.														
			Penguatan Pengelolaan Data Kearsipan dan Informasi Biro Tata Pemerintahan Secara Elektronik	Tersedianya sumber informasi penyelenggaraan pemerintahan se-Provinsi Riau		100%	124			100%	124	100%	124	100%	124	100%	496	biro adm. Pemerintahan umum
			Penilaian Kinerja Penyelenggara n Pemerintahan Kecamatan (EKK)	Terwujudnya aparatur pemerintahan Kecamatan yang berkualitas dan meningkatnya motivasi Camat dalam melaksanakan pelayanan prima		100%	593			100%	593					100%	1.186	biro adm. Pemerintahan umum
			Workshop Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Mewujudkan dan Meningkatkan Kualitas Kerja Aparatur		100%	175			100%	175	100%	175	100%	175	100%	700	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Pemerintahan														
			Fasilitasi penataan wilayah administrasi dan Penguatan Kapasitas Aparat Kecamatan Dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah	Terfasilitasi nya penataan wilayah administrasi dan Penguatan Kapasitas Aparat Kecamatan Dalam Penyelengga- raan Pemerintahan Daerah		100%	245			100%	245	100%	245	100%	245	100%	980	biro adm. Pemerintahan umum
			PROGRAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemerintahan yang baik	n/a	25%	420	25%	0	50%	420	75%	280	100%	280	100%	1.400	biro adm. Pemerintahan umum
			Fasilitasi Percepatan Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur	Terpenuhinya nama rupa bumi unsur alami Provinsi		100%	280			100%	280	100%	280	100%	280	100%	1.120	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Alami Provinsi Riau	Riau														
			Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah		100%	140			100%	140					100%	280	biro adm. Pemerintahan umum
			PROGRAM PERCEPATAN IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH	Persenase pencapaian pelaksanaan kegiatan percepatan implementasi otonomi daerah	n/a	25%	617	25%	0	50%	617	75%	617	100%	617	100%	2.468	biro adm. Pemerintahan umum
			Pembayaran Utang Pekerjaan Fisik Pembangunan Tugu Gerbang Batas Provinsi Riau-Provinsi Sumatera Barat (di Kabupaten Kuantan Singingi)	Terlaksananya Pembayaran Utang Pekerjaan Fisik Pembangunan Tugu Gerbang Batas Provinsi Riau-Provinsi Sumatera Barat (di Kabupaten Kuantan Singingi)		100%	249			100%	249	100%	249	100%	249	100%	996	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Singingi)														
			Pembayaran Utang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Gerbang Batas Provinsi Riau-Provinsi Sumatera Barat (di Kabupaten Kuantan Singingi)	Terlaksananya Pembayaran Utang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Gerbang Batas Provinsi Riau-Provinsi Sumatera Barat (di Kabupaten Kuantan Singingi)		100%	18			100%	18	100%	18	100%	18	100%	72	biro adm. Pemerintahan umum
			Fasilitas Rapat Koordinasi Penyelesaian Konflik dan Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Dalam Rangka Mewujudkan Rencana Aksi Penanganan Gangguan	Terfasilitasi nya Rapat Koordinasi Penyelesaian Konflik dan Batas Daerah Antar Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau Dalam Rangka Mewujudkan Rencana Aksi		100%	350			100%	350	100%	350	100%	350	100%	1.400	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Keamanan Dalam Negeri Provinsi Riau Tahun 2014	Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Riau Tahun 2014														
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERCEPATAN OTONOMI DAERAH	Persenase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas penyelengga- raan pemerintahan daerah dan percepatan otonomi daerah	n/a	0%	0	25%	5.250	50%	5.250	75%	4387,725	100%	5245	100%	20.133	biro adm. Pemerintahan umum
			Fasilitasi Pembinaan Perangkat Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan perangkat pemerintah daerah 12 Kab/Kota se Provinsi Riau				80 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat, monev di 12 kab/kota dan 1 paket	250	80 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat, monev di 12 kab/kota dan 1 paket	250	80 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat, monev di 12 kab/kota dan 1 paket dokumen	250	80 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat, monev di 12 kab/kota dan 1 paket dokumen	250	320 orang peserta, 4 kali pertemu an/rapat , monev di 12 kab/kota dan 4	1.000	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
								dokumen laporan		dokumen laporan		laporan		laporan		paket dokumen laporan		
			Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Camat se-Provinsi Riau	Pembinaan aparatur pemerintah kecamatan se Provinsi Riau				187 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat, 1 paket dokumen laporan	450	187 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat, 1 paket dokumen laporan	450	1. terselenggara ranya pembinaan aparatur pwemerintah kecamatan se provinsi riau 2. meningkatnya kompetensi dan kapasitas camat terhadap pelayanan pemerintahan kecamatan se provinsi riau. 2. 2. meningkatnya	239,762	1. terselenggara ranya pembinaan aparatur pwemerintah kecamatan se provinsi riau 2. meningkatnya kompetensi dan kapasitas camat terhadap pelayanan pemerintahan kecamatan se provinsi riau. 2. 2. meningkatnya	350	1. terselenggaranya pembinaan aparatur pwemerintah kecamatan se provinsi riau 2. meningkatnya kompetensi dan kapasitas camat terhadap pelayanan pemerintahan kecamatan se	1.490	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
												kompetensi dan kapasitas camat terhadap pelayana		kompetensi dan kapasitas camat terhadap pelayana		provinsi riau. 2. 2. meningkatnya kompetensi dan kapasitas camat terhadap pelayana		
			Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Bupati/Walikota Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraa n Pemerintahan	Pembinaan dan koordinasi pembangunan dengan pemerintah kab/kota se prov. Riau				120 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat, monev di 12 kab/kota, 1 paket dokumen laporan	600	120 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat, monev di 12 kab/kota, 1 paket dokumen laporan	600	Terselengg aranya pembinaan dan pembangun an kab/kota	247,9 63	Terselengg aranya pembinaan dan pembangun an kab/kota	600	Terselen ggaranya pembina an dan pemban gunan kab/kota	2.048	biro adm. Pemerintahan umum
			Penilaian Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Kecamatan (Evaluasi Kinerja Kecamatan)	Melaksanakan penilaian kinerja penyelenggar aan pemerintahan				monev pelaksanaaa n penilaian EKK di 12 kab/kota dan1 paket dokumen	500	monev pelaksanaaa n penilaian EKK di 12 kab/kota dan1 paket dokumen	500	Terlaksana nya kualitas pelayanan prima di Kecamatan se Provinsi	200	Terlaksana nya kualitas pelayanan prima di Kecamatan se Provinsi	595	monev pelaksan aan penilaian EKK di 12 kab/kota dan4	1.795	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				kecamatan				laporan penilaian EKK		laporan penilaian EKK		Riau		Riau		paket dokumen laporan penilaian EKK		
			Workshop Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Terselenggaranya Penilaian dan Seminar Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau				225 orang peserta, 3 kali pertemuan /rapat, dan 1 paket dokumen laporan	250	225 orang peserta, 3 kali pertemuan /rapat, dan 1 paket dokumen laporan	250	225 orang peserta, 3 kali pertemuan /rapat, dan 1 paket dokumen laporan	250	225 orang peserta, 3 kali pertemuan /rapat, dan 1 paket dokumen laporan	250	900 orang peserta, 12 kali pertemuan /rapat, dan 4 paket dokumen laporan	1.000	biro adm. Pemerintahan umum
			Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Seminar Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se Prov Riau				65 orang peserta 1 kali pertemuan /rapat dan 1 paket dokumen laporan	200	65 orang peserta 1 kali pertemuan /rapat dan 1 paket dokumen laporan	200	65 orang peserta 1 kali pertemuan /rapat dan 1 paket dokumen laporan	200	65 orang peserta 1 kali pertemuan /rapat dan 1 paket dokumen laporan	200	260 orang peserta 4 kali pertemuan /rapat dan 4 paket dokumen laporan	800	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Dana Operasional Pembentukan Provinsi Riau Pesisir	Terlaksananya Fasilitas Pembentukan Provinsi Riau Pesisir				100%	3.000	100%	3.000	100%	3.000	100%	3.000	100%	12.000	biro adm. Pemerintahan umum
			Fasilitasi Sinkronisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Riau	Tercapainya sinkronisasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan se Provinsi Riau								12 Kabupaten/ Kota	300	12 Kabupaten/ Kota	250	12 Kabupaten/ Kota	550	biro adm. Pemerintahan umum
			E-Tata Kelola Pemerintahan	1. Terselenggaranya rapat sosialisasi E-Tata Kelola Pemerintahan yang baik 2. Pembuatan Aplikasi Pemeliharaan Website Biro Administrasi Pemerintahan								1. 12 Kabupaten/ Kota 2. Terlaksananya publikasi dan pengembangan web dan aplikasi di Biro Administrasi	196,810	1. 12 Kabupaten/ Kota 2. Terlaksananya publikasi dan pengembangan web dan aplikasi di Biro Administrasi	500	1. 12 Kabupaten/ Kota 2. Terlaksananya publikasi dan pengembangan web dan aplikasi di Biro	696,810	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Umum 3. Publikasi di Website dan Media Sosial							Pemerintah an Umum		Pemerintah an Umum		Administ rasi Pemerint ahan Umum			
			Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah	Terselenggara nya rapat peningkatan kapasitas pemerintahan daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau							12 Kabupaten/ Kota	200	12 Kabupaten/ Kota	250	12 Kabupat en/Kota	450,000	biro adm. Pemerintahan umum	
			Fasilitasi Pembinaan Penerapan Regulasi Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota	Tercapainya pembinaan dan pengawasan pada pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan							12 Kabupaten/ Kota	200	12 Kabupaten/ Kota	250	12 Kabupat en/Kota	450,000	biro adm. Pemerintahan umum	
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan	n/a	0%	0	25%	3.450	50%	3.450	75%	2750	100%	2750	100%	12.400	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			PEJABAT KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN LEGISLATIF	peningkatan pelayanan kedinasan pejabat kepala daerah / wakil kepala daerah dan legislatif														
			Rapat Sinkronisasi Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Riau	Terselenggaranya wadah perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan se Provinsi Riau			80 orang peserta 1 kali pertemuan /rapat, monev di 12 kab/kota, dan 1 paket dokumen laporan	250	80 orang peserta 1 kali pertemuan /rapat, monev di 12 kab/kota, dan 1 paket dokumen laporan	250	80 orang peserta 1 kali pertemuan /rapat, monev di 12 kab/kota, dan 1 paket dokumen laporan	250	80 orang peserta 1 kali pertemuan /rapat, monev di 12 kab/kota, dan 1 paket dokumen laporan	250	320 orang peserta 4 kali pertemuan /rapat, monev di 12 kab/kota, dan 1 paket dokumen laporan	1.000	biro adm. Pemerintahan umum	
			Fasilitasi pembinaan penerapan regulasi kegiatan Dekosentrasi & TP Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan penerapan terhadap regulasi Peraturan Gubernur No 66 Tahun			80 orang peserta 1 kali pertemuan /rapat, monev di 12 kab/kota,	250	80 orang peserta 1 kali pertemuan /rapat, monev di 12 kab/kota,	250	80 orang peserta 1 kali pertemuan /rapat, monev di 12 kab/kota,	250	80 orang peserta 1 kali pertemuan /rapat, monev di 12 kab/kota,	250	320 orang peserta 4 kali pertemuan /rapat, monev di 12	1.000	biro adm. Pemerintahan umum	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			2014	2012 se-Provinsi Riau				dan 1 paket dokumen laporan		dan 1 paket dokumen laporan		dan 1 paket dokumen laporan		dan 1 paket dokumen laporan		kab/kota , dan 1 paket dokume n laporan		
			Pembekalan dan Pengantar Tugas Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau	Terwujudnya peningkatan kapasitas anggota DPRD				65 orang peserta dan1 kali pertemuan /rapat bimtek	250	65 orang peserta dan1 kali pertemuan /rapat bimtek	250	65 orang peserta dan1 kali pertemuan /rapat bimtek	250	65 orang peserta dan1 kali pertemuan /rapat bimtek	250	260 orang peserta dan 4 kali pertemu an/rapat bimtek	1.000	biro adm. Pemerintahan umum
			Fasilitasi Pengurusan Izin Keluar Negeri Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Anggota DPRD Provinsi Riau dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Administrasi Pejabat Negara				1 paket dokumen/s urat rekomenda si izin	150	1 paket dokumen/s urat rekomenda si izin	150					2 paket dokume n/surat rekomen dasi izin	300	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			se Provinsi Riau															
			Monitoring dan Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau	Terselenggara nya Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau				1 paket dokumen laporan hasil pelaksanaaan pilkada Kab. Inhu	500	1 paket dokumen laporan hasil pelaksanaaan pilkada Kab. Inhu	500	1 paket dokumen laporan hasil pelaksanaaan pilkada Kab. Inhu	500	1 paket dokumen laporan hasil pelaksanaaan pilkada Kab. Inhu	500	4 paket dokumen laporan hasil pelaksanaan pilkada Kab. Inhu	2.000	biro adm. Pemerintahan umum
			Monitoring dan Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	Terselenggara nya Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau				1 paket dokumen laporan hasil pelaksanaaan pilkada Kab. Bengkalis	500	1 paket dokumen laporan hasil pelaksanaaan pilkada Kab. Bengkalis	500	1 paket dokumen laporan hasil pelaksanaaan pilkada Kab. Bengkalis	500	1 paket dokumen laporan hasil pelaksanaaan pilkada Kab. Bengkalis	500	4 paket dokumen laporan hasil pelaksanaan pilkada Kab. Bengkalis	2.000	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Monitoring dan Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Dumai Provinsi Riau	Terselenggaranya Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Dumai Provinsi Riau				1 paket dokumen laporan hasil pelaksanaan pilkada Kota Dumai	500	1 paket dokumen laporan hasil pelaksanaan pilkada Kota Dumai	500	1 paket dokumen laporan hasil pelaksanaan pilkada Kota Dumai	500	4 paket dokumen laporan hasil pelaksanaan pilkada Kota Dumai	2.000	biro adm. Pemerintahan umum		
			Monitoring dan Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau	Terselenggaranya Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau				1 paket dokumen laporan hasil pelaksanaan pilkada Kab. Kep. Meranti	500	1 paket dokumen laporan hasil pelaksanaan pilkada Kab. Kep. Meranti	500	1 paket dokumen laporan hasil pelaksanaan pilkada Kab. Kep. Meranti	500	4 paket dokumen laporan hasil pelaksanaan pilkada Kab. Kep. Meranti	2.000	biro adm. Pemerintahan umum		
			Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau	Terwujudnya Administrasi Pejabat negara				1 paket dokumen laporan penyusunan tata tertib DPRD	150	1 paket dokumen laporan penyusunan tata tertib DPRD	150			2 paket dokumen laporan penyusunan tata tertib	300	biro adm. Pemerintahan umum		

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
																DPRD		
			Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengambilan Sumpah/Janji Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota	Terwujudnya Administrasi Pejabat negara				1 paket dokumen keputusan/surat pemberhentian dan pengangkatan Bupati/Wali kota	400	1 paket dokumen keputusan/surat pemberhentian dan pengangkatan Bupati/Wali kota	400					2 paket dokumen keputusan/surat pemberhentian dan pengangkatan Bupati/Walikota	800	biro adm. Pemerintahan umum
			PROGRAM FASILITASI ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN WILAYAH ADMINISTRASI	Perentase pencapaian pelaksanaan kegiatan fasilitasi administrasi pertanahan dan wilayah administrasi	n/a	0%	0	25%	1.900	50%	1.900	75%	1400	100%	1900	100%	7.100	biro adm. Pemerintahan umum
			Fasilitasi Persiapan Pengadaan Tanah se	tersedianya tanah bagi pembangunan untuk				1 paket dokumen laporan	800	1 paket dokumen laporan	800	100 Persen, 12 kab/kota	500	100 Persen, 12 kab/kota	800	100 Persen, 12	2.900	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Provinsi Riau	kepentingan umum dan pemerintah provinsi riau												kab/kota		
			Fasilitasi Penataan Wilayah Administrasi dan Penguatan Kapasitas Aparat Kecamatan Dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah	terlaksananya rapat teknis penyelesaian penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antar kab/kota seprovinsi riau				188 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat 1 paket dokumen dan monev di 12 kab/kota	350	188 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat 1 paket dokumen dan monev di 12 kab/kota	350	100 Persen, 12 kab/kota	150	100 Persen, 12 kab/kota	350	100 Persen, 12 kab/kota	1.200	biro adm. Pemerintahan umum
			Rapat Teknis Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se Provinsi Riau	Terlaksananya rapat teknis penyelesaian penegasan batas daerah secara pasti di lapangan antar kab/kota se Provinsi Riau				24 kali pertemuan /rapat segmen batas, 12 segmen batas di 12 kab/kota, 48 orang peserta, dan 1 paket dokumen (penerbitan permendag	500	24 kali pertemuan /rapat segmen batas, 12 segmen batas di 12 kab/kota, 48 orang peserta, dan 1 paket dokumen (penerbitan permendag	500	12 Kab/Kota	500	12 Kab/Kota	500	12 Kab/Kota	2.000	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
								ri)		ri)								
			Sosialisasi Permendagri Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se Provinsi Riau	Tersedianya wadah pertemuan/rapat dalam rangka peningkatan pemahaman aparatur daerah tentang Permendagri Batas Daerah antar Kabupaten/ Kota			72 orang peserta, 4 kali pertemuan /rapat sosialisasi (3 kab/kota x 4 kali pertemuan /rapat)	250	72 orang peserta, 4 kali pertemuan /rapat sosialisasi (3 kab/kota x 4 kali pertemuan /rapat)	250	72 orang peserta, 4 kali pertemuan /rapat sosialisasi (3 kab/kota x 4 kali pertemuan /rapat)	250	72 orang peserta, 4 kali pertemuan /rapat sosialisasi (3 kab/kota x 4 kali pertemuan /rapat)	250	288 orang peserta, 16 kali pertemuan /rapat sosialisasi (3 kab/kota x 4 kali pertemuan /rapat)	1.000	biro adm. Pemerintahan umum	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PENYELENGGAR AAN	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dan	n/a	0%	0	25%	1.194	50%	1.194	75%	1244	100%	1194	100%	4.826	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SERTA TOPONIMI	penyelengga- raan administrasi pemerintahan umum serta topomini														
			Pembinaan PATEN Kecamatan Provinsi Riau	Terlaksana nya pembinaan PATEN				65 orang peserta, 1 kali pertemuan /rakor, monev di 12 kab/kota, dan 1 paket dokumen laporan	250	65 orang peserta, 1 kali pertemuan /rakor, monev di 12 kab/kota, dan 1 paket dokumen laporan	250	65 orang peserta, 1 kali pertemuan /rakor, monev di 12 kab/kota, dan 1 paket dokumen laporan	250	65 orang peserta, 1 kali pertemuan /rakor, monev di 12 kab/kota, dan 1 paket dokumen laporan	250	260 orang peserta, 4 kali pertemu an/rakor , monev di 12 kab/kota , dan 1 paket dokume n laporan	1.000	biro adm. Pemerintahan umum
			Fasilitasi Penataan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dalam Provinsi Riau	Terfasilitasi nya penataan kode wilayah				78 orang peserta, 6 kali pertemuan /rakor, 1 paket dokumen Kode dan Data	300	78 orang peserta, 6 kali pertemuan /rakor, 1 paket dokumen Kode dan Data	300	78 orang peserta, 6 kali pertemuan /rakor, 1 paket dokumen Kode dan Data	300	78 orang peserta, 6 kali pertemuan /rakor, 1 paket dokumen Kode dan Data	300	312 orang peserta, 24 kali pertemu an/rakor , 4 paket dokume n Kode	1.200	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
								wilayah Adm. Pemerintahan di Prov. Riau		wilayah Adm. Pemerintahan di Prov. Riau		wilayah Adm. Pemerintahan di Prov. Riau		wilayah Adm. Pemerintahan di Prov. Riau		dan Data wilayah Adm. Pemerintahan di Prov. Riau		
			Seminar Pemekaran Kecamatan dalam Provinsi Riau prediksi s/d 2025	- Terselenggara Seminar Pemekaran Kecamatan Provinsi Riau - Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja Grand Design Pemekaran Kecamatan Provinsi Riau prediksi s/d 2025				40 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat seminar pemekaran, 1 paket dokumen kerangka acuan kerja (KAK) tentang rencana pemekaran dalam Provinsi Riau	172	40 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat seminar pemekaran, 1 paket dokumen kerangka acuan kerja (KAK) tentang rencana pemekaran dalam Provinsi Riau	172	40 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat seminar pemekaran, 1 paket dokumen kerangka acuan kerja (KAK) tentang rencana pemekaran dalam Provinsi Riau	172	40 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat seminar pemekaran, 1 paket dokumen kerangka acuan kerja (KAK) tentang rencana pemekaran dalam Provinsi Riau	172	160 orang peserta, 4 kali pertemuan/rapat seminar pemekaran, 4 paket dokumen kerangka acuan kerja (KAK) tentang rencana pemekaran dalam Provinsi Riau	688	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Seminar Pemekaran Daerah Kab/Kota dalam Provinsi Riau Prediksi s/d 2025	- Terlaksananya seminar Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Riau			40 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat seminar pemekaran, dan 1 paket dokumen kerangka acuan kerja (KAK) tentang rencana pemekaran daerah kab/kota dalam Prov. Riau	172	40 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat seminar pemekaran, dan 1 paket dokumen kerangka acuan kerja (KAK) tentang rencana pemekaran daerah kab/kota dalam Prov. Riau	172	40 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat seminar pemekaran, dan 1 paket dokumen kerangka acuan kerja (KAK) tentang rencana pemekaran daerah kab/kota dalam Prov. Riau	172	40 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat seminar pemekaran, dan 1 paket dokumen kerangka acuan kerja (KAK) tentang rencana pemekaran daerah kab/kota dalam Prov. Riau	172	160 orang peserta, 4 kali pertemuan /rapat seminar pemekaran, 4 paket dokumen kerangka acuan kerja (KAK) tentang rencana pemekaran dalam Provinsi Riau	688	biro adm. Pemerintahan umum	
			Rakor TOPONIMI Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan dalam Provinsi Riau	terselenggara nya rakor toponimi pembakuan nama rupabumi unsur buatan			48 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat rakor Toponimi, rumusan	300	48 orang peserta, 1 kali pertemuan /rapat rakor Toponimi, rumusan	300	12 kab/kota se provinsi riau	350	12 kab/kota se provinsi riau	300	12 kab/kota se provinsi riau	1.250	biro adm. Pemerintahan umum	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				provinsi riau				rapat		rapat								
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terkelolanya administrasi pengurusan izin keluar negri anggota DPRD Provinsi Riau dan anggota DPRD kabupaten/kota se Provinsi Riau												0	biro adm. Pemerintahan umum	
			Fasilitasi Pengurusan Izin Keluar Negeri Anggota DPRD Provinsi Riau dan Anggota DPRD Kabupaten / Kota se Provinsi Riau	Terwujudnya administrasi izin keluar negri anggota DPRD Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau							1 Paket dokumen surat Rekomendasi Gubernur terkait izin keluar negri anggota DPRD Provinsi Riau dan DPRD Kabupaten / Kota se Provinsi	77	1 Paket dokumen surat Rekomendasi Gubernur terkait izin keluar negri anggota DPRD Provinsi Riau dan DPRD Kabupaten / Kota se Provinsi	200	2 Paket dokumen surat Rekomendasi Gubernur terkait izin keluar negri anggota DPRD Provinsi Riau dan DPRD	277	biro adm. Pemerintahan umum	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
											Riau		Riau		Kabupat en / Kota se Provinsi Riau			
			Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau	Terselenggara nya Sosialisasi peraturan Pemerintah terbaru tentang tata tertib DPRD							1 Paket dokumen laporan Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Tertib DPRD - 1 Paket dokumen laporan Pelaksanaan n Tata Tertib DPRD Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau	125	1 Paket dokumen laporan Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Tertib DPRD - 1 Paket dokumen laporan Pelaksanaan n Tata Tertib DPRD Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau	400	2 Paket dokume n laporan Sosialisa si Peratura n Pemerint ah tentang Tata Tertib DPRD - 2 Paket dokume n laporan Pelaksan aan Tata Tertib DPRD Kabupat en/Kota	525	biro adm. Pemerintahan umum	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
															se Provinsi Riau			
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Terkelolanya Administrasi Pengurusan Izin Keluar Negeri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												0	biro adm. Pemerintahan umum	
			Fasilitasi Pengurusan Izin Keluar Negeri Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota	Terkelolanya Administrasi Pengurusan Izin Keluar Negeri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							1 paket dokumen Surat Rekomendasi izin keluar negeri dari Gubernur Riau kepada Menteri Dalam	87,2	1 paket dokumen Surat Rekomendasi izin keluar negeri dari Gubernur Riau kepada Menteri Dalam	200	2 paket dokumen Surat Rekomendasi izin keluar negeri dari Gubernur Riau kepada Menteri	287	biro adm. Pemerintahan umum	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
												Negeri RI		Negeri RI		Dalam Negeri RI		
			Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengambilan Sumpah/Janji Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota	Terwujudnya Administrasi Pejabat Negara								1 paket dokumen SK pengesahan pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota	315	1 paket dokumen SK pengesahan pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota	400	2 paket dokumen SK pengesahan pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota	715	biro adm. Pemerintahan umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
Mewujudkan transparansi pelaksanaan kebijakan pemerintah.	Peningkatan Pelayanan Kehumasan yang Cepat, Tepat dan Akurat	1. Jumlah Penyediaan Informasi yang Update berupa a.Photo b.Buku c.DVD d.CD e.Majalah	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	n/a	17%	53.345	38%	63.773	58%	64.647	79%	74.421	100%	75.461	100%	331.647	biro humas
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan berupa surat kabar dan majalah		12 bulan	1.095	12 bulan	1.045	12 bulan	1.045	12 bulan	1.000	12 bulan	1.000	60 bulan	5.185	biro humas
			Penyediaan Jasa Pendukung Peningkatan Jasa Kehumasan	Tersedianya operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas Biro		27 paket perawatan alat audio visual 24 kali coffee morning dgn wartawan ATK Biro Humas	528			27 paket perawatan alat audio visual 24 kali coffee morning dgn wartawan ATK Biro Humas	528	27 paket perawatan alat audio visual 24 kali coffee morning dgn wartawan ATK Biro Humas	528	27 paket perawatan alat audio visual 24 kali coffee morning dgn wartawan ATK Biro Humas	528	108 paket perawat an alat audio visual 96 kali coffee morning dgn wartawa n ATK Biro Humas	2.112	biro humas
		2. Jumlah Penyebaran Informasi Provinsi Riau yang di publikasikan di Media massa melalui TV, Radio, Koran, dan Online																

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan SKPD	Tersedianya jasa pendukung kinerja kehumasan pada Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau				27 paket perawatan alat audio visual 24 kali coffee morning dgn wartawan, ATK Biro Humas	528	27 paket perawatan alat audio visual 24 kali coffee morning dgn wartawan, ATK Biro Humas	528	12 bulan	312,639	12 bulan	355,194	12 bulan	1.723,833	biro humas
			PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	n/a	12%	6.624	29%	9.282	53%	12.791	76%	7.274	100%	11.090	100%	47.061	biro humas
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Buku Saku Informasi Riau)	Tersedianya buku saku informasi Riau dibidang Pemerintahan , Pembangunan ,Kamasyarakat an dan umum		1500 eks	253	1500 eks	187	1500 eks	187	1000 eks	198,3645	1000 eks	210	6500 eks	1.035	biro humas

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Perencanaan dan pengembangan kebijakan Komunikasi dan Informasi (Forum dan workshop Kehumasan)	Pembinaan hubungan dan koordinasi kebijakan kehumasan se Provinsi Riau		60 org	0			60 org	200	0	0	0	0	120 org	200	biro humas
			Penyusunan Naskah / presentasi dan ekspose Gubernur Riau	Penyusunan Naskah/Prese ntasi dan ekspose Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau		2.800 buku	395	2.800 buku	457	2.800 buku	457	3.320 Buku	440	3.320 Buku	484	15.040 buku	2.233	biro humas
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Bulletin dan Poster)	Tersedianya informasi bagi masyarakat berupa bulletin dan poster		300 bulletin; 3000 poster	235			300 bulletin; 3000 poster	235	300 bulletin; 3000 poster	235	300 bulletin; 3000 poster	235	1200 bulletin; 12000 poster	940	biro humas
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Tersedianya informasi bagi masyarakat terutama kaum		6 edisi	116	6 edisi	181	6 edisi	181					30 edisi	478	biro humas

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			(Majalah Puan)	perempuan/ibu PKK selama 6 edisi														
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Riau Makmur)	Terdistribusikan informasi pembangunan berupa bahan bacaan dan media cetak selama 12 bulan		6 edisi	166	6 edisi	181	6 edisi	181					30 edisi	528	biro humas
			Pendistribusian Informasi Pembangunan se Provinsi Riau	Terdistribusikan Media Cetak dan Bahan Bacaan se Provinsi Riau		12 kab/kota	219	12 kab/kota	225	12 kab/kota	225	12 Kab/kota dan 48 SKPD	200,671	12 Kab/kota dan 48 SKPD	330	12 Kab/kota dan 48 SKPD	1.199,671	biro humas
			Peliputan kegiatan pemerintah se Provinsi Riau	Petugas peliputan dan pendampingan kegiatan pemerintah Provinsi Riau		8 paket foto studio 840 hasil liputan 7.800 foto 4R dan 10R	979	8 paket foto studio 840 hasil liputan 7.800 foto ukuran 4 R dan 10 R	1.559	8 paket foto studio 840 hasil liputan 7.800 foto ukuran 4 R dan 10 R	1.559	0	0	0	0	40 paket foto studio 4200 hasil liputan 39.000foto ukuran 4 R dan 10	4.097	biro humas

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
															R			
			Penyusunan buku agenda dan kalender	Tersedianya buku kerja/agenda dan kalender Provinsi Riau Tahun 2018		2000 buku kerja 6000 kalender meja & dinding	455	2000 buku kerja 6000 kalender meja & dinding	250	2000 buku kerja 6000 kalender meja & dinding	250	1000 buku kerja dan 3000 kalender	250	1000 buku kerja dan 3000 kalender	250	8.000 buku kerja 24.000 kalender meja & dinding	1.455	biro humas
			Pembuatan dokumentasi/vis ualisasi hasil liputan kegiatan Pemprov Riau	Terdokumentasinya Hasil Liputan Kegiatan Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk DVD, CD Foto dan buku kegiatan Gub dan Wagub		250 DVD 100 CD	186	190 DVD & 170 CD serta 1000 buku gub dan wagub	199	190 DVD & 170 CD serta 1000 buku gub dan wagub	199	250 DVD,150 CD dan 1000 bh Buku	199	250 DVD,150 CD dan 1000 bh Buku	199	1130 DVD & 740 CD serta 4000 buku gub dan wagub	982	biro humas
			Penyusunan dan tatakelola database informasi kehumasan	Tersedianya Informasi Melalui Sistem Elektronik		1 paket	547	1 paket	320	1 paket	320	1 paket	430	1 paket	530	5 paket	2.147	biro humas

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pembuatan Sisitem Teknologi Informasi biro humas provinsi riau	Meningkatnya layanan informasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau		1 paket desain 2 komputer 2 unit UPS 1 unit server 1 pkt instalasi 1 unit printer	564			1 paket desain 2 komputer 2 unit UPS 1 unit server 1 pkt instalasi 1 unit printer	564	1 paket desain 2 komputer 2 unit UPS 1 unit server 1 pkt instalasi 1 unit printer	564	1 paket desain 2 komputer 2 unit UPS 1 unit server 1 pkt instalasi 1 unit printer	564	4 paket desain 8 kompute r 8 unit UPS 4 unit server 4 pkt instalasi 4 unit printer	2.256	biro humas
			Pembuatan Buku Gubernur Riau dari Masa ke masa	Tersedianya Buku Gubernur Riau dari berdirinya Provinsi riau		100%	185			100%	185	100%	185	100%	185	100%	740	biro humas
			Pembuatan Profil Gubernur Riau	Tersedianya Buku Profil Gubernur Riau terpilih		100%	732			100%	732	100%	732	100%	732	100%	2.928	biro humas
			Lomba Karya Tulis Media	Terciptanya karya tulis media yang berkualitas		45 orang	219			45 orang	219	45 orang	219	45 orang	219	180 orang	876	biro humas

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pers Tour Jurnalistik	Tersosilaisasi ya hasil pembangunan didaerah kepada masyarakat		22 orang	234			22 orang	234	22 orang	234	22 orang	234	88 orang	936	biro humas
			Koran masuk desa se-Provinsi Riau	Tersedianya koran masuk desa se-Provinsi Riau		12 kab/kota	1.140			12 kab/kota	1.140	12 kab/kota	1.140	12 kab/kota	1.140	12 kab/kota	4.560	biro humas
			Forum Group Discussion (FGD) Media Massa	Terlaksananya FGD membahas aktual pembangunan dan pemerintahan serta pemantauan hasil pembangunan ke Kab/Kota				70 orang	204	70 orang	204	82 Orang	169	82 Orang	296,280	304 orang	873,280	biro humas
			Updating Teknologi Informasi Kehumasan	Tersedianya Publikasi Melalui Teknologi Informasi				1 paket	350	1 paket	350	1 Kegiatan	175,529	1 Kegiatan	193,081	2 paket dan 2 Kegiatan	1.068,610	biro humas

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Monitoring Isu Publik pada Media Massa	Dokumen laporan dan analisa isu media				12 laporan	130	12 laporan	130	1 paket	118,7844	1 paket	250	24 laporan dan 2 paket	629	biro humas
			Pengadaan Peralatan Audio Visual	Tersedianya peralatan audio visual				7 paket kamera foto dan 7 paket kamera vidio	3.800	7 paket kamera foto dan 7 paket kamera vidio	3.800	20 Unit, 3 set	544,444	20 Unit, 3 set	3.800	14 paket kamera foto dan 14 paket kamera vidio, 40 Unit, 6 set	11.944	biro humas
			Pembangunan I-Media	Tersedianya media informasi yang interaktif				100%	1.239	100%	1.239	100%	1.239	100%	1.239	100%	4.956	biro humas
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Majalah Puan dan Riau Makmur)	Tersedianya Informasi Pembangunan dalam bentuk Majalah Puan dan Majalah Riau Makmur								Majalah Puan 6 Edisi (@1000 eksemplar) , Majalah Riau Makmur 6 Edisi (@1000 eksemplar)	338,807	Majalah Puan 6 Edisi (@1000 eksemplar) , Majalah Riau Makmur 6 Edisi (@1000 eksemplar)	351,603	Majalah Puan 12 Edisi (@2000 eksemplar) , Majalah Riau Makmur 12 Edisi (@2000 eksemplar)	690	biro humas

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
															ar)			
			Peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur	Tersedianya foto dan kaset Video hasil liputan kegiatan Pimpinan Pemerintah Provinsi Riau							Dokumen hasil peliputan (CD, Foto , kaset)	1.030,020	Dokumen hasil peliputan (CD, Foto , kaset)	1.550,000	Dokumen hasil peliputan (CD, Foto , kaset)	2.580	biro humas	
			PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Jumlah masyarakat dan aparatur yang memahami komunikasi dan informatika	n/a	4%	323	8%	257	39%	2.219	69%	1.962	100%	1.962	100%	6.723	biro humas
			Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Teknis Peliputan Bagi Petugas Peliput se Provinsi Riau ke STMM-MMTC Yogyakarta	Terciptanya penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik		100%	323			100%	323	100%	323	100%	323	100%	1.292	biro humas

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pelaksanaan workshop dan pelatihan penulisan naskah pidato/makalah Pemprov Riau	Terciptanya peningkatan profesionalisme SDM Aparatur daerah		100%	0			100%	200	100%	200	100%	200	100%	600	biro humas
			Pelatihan Penerbitan Media Internal Pemerintah daerah	Meningkatnya wawasan Aparatur Humas		100%	0			100%	1.239	100%	1.239	100%	1.239	100%	3.717	biro humas
			Workshop Penyelenggaraan Pemerintah untuk Jurnalistik	Meningkatnya wawasan Jurnalis tentang penyelenggaraan pemerintah		100%	0			100%	200	100%	200	100%	200	100%	600	biro humas
			Peningkatan dan Pemantapan Kemampuan Teknis Tenaga Peliput se Provinsi Riau	Tersedianya 18 Orang tenaga Peliputan dan yang telah di sertifikasi				16 Orang	257	16 Orang	257	18 Org Tenaga Peliputan	0	18 Org Tenaga Peliputan	0	68 Orang	514	biro humas

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Forum dan Workshop Kehumasan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan aparatur pejabat yang menangani kehumasan							75 Org Aparatur	134,7011	75 Org Aparatur	250	150 Org Aparatur	385	biro humas	
			PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Jumlah kerjasama dengan media massa	n/a	21%	19.687	41%	18.666	60%	18.666	80%	6.335	100%	11.889	100%	75.243	biro humas
			Publikasi Media cetak baleho	Tersedianya informasi pembangunan dan kemasyarakatan dimedia cetak baleho selama 12 bulan		6.912 m2 baleho 6 set baleho hari khusus 36 unit baleho promosi kab/kota 1440m2 spanduk 8 standing baleho	2.525	4000 m2 dan 6 paket baleho untuk hari2 besar	3.230	4000 m2 dan 6 paket baleho untuk hari2 besar	3.230	0	0	0	0	8000 m2 dan 12 paket baleho untuk hari2 besar	8.985	biro humas

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Publikasi Media Elektronik	Paket Informasi yang berkualitas dan informatif agar masyarakat mengetahui hasil pembangunan , serta mengandung unsur promosi dan publikasi pembangunan daerah.		66 episode siaran langsung dan tunda 9 paket di media radio dan media online 576 kali advertorial dan galeri foto media online	7.712	12 bulan	8.500	12 bulan	8.500	Informasi Pembangunan di Media TV, Media Radio dan Media Online	3.482	Informasi Pembangunan di Media TV, Media Radio dan Media Online	7.358	24 bulan ; Informasi Pembangunan di Media TV, Media Radio dan Media Online	35.552	biro humas
			Publikasi Advetorial/iklan di media cetak	Paket Informasi yang berkualitas, informatif, dan penuh dengan pesan - pesan untuk masyarakat, agar masyarakat mengetahui hasil pembangunan melalui media		144 unit iklan 335 unit advertorial	5.636	311 advertorial	3.436	311 advertorial	3.436	60 advertorial	1.083,894	60 advertorial	1.530,915	1077 advertorial	15.122,810	biro humas

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				cetak														
			Publikasi galeri foto di media cetak	Paket informasi yang berkualitas dan informatif untuk masyarakat dalam bentuk gambar atau foto		492 unit galeri foto	3.814	12 bulan	3.500	12 bulan	3.500	1 Paket	1.769,577	1 Paket	3.000	12 bulan; 1 Paket	15.583,577	biro humas
			Publikasi Media cetak baleho dan spanduk	Informasi di media cetak luar ruangan (out door)								1 Kegiatan	1.121,297	1 Kegiatan	2.000	2 Kegiatan	3.121,297	biro humas
Mewujudkan Kebijakan Pemerintah terkait kesejahteraan rakyat	1. Meningkatkan Kualitas Penanganan masalah bidang sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi	1. Jumlah kebijakan tentang permasalahan Sosial. 2. Jumlah kebijakan tentang permasalahan	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	n/a	17%	53.345	38%	63.773	58%	64.647	79%	74.421	100%	75.461	100%	331.647	biro adm. Kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
	2. Meningkatkan ya Kualitas Penanganan masalah bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta permasalahan perlindungan anak dan narkoba.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penyediaan Jasa Prestasi Tim Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya pelayanan prima verifikasi bantuan Hibah dan Bantuan Sosial secara baik dan Profesional		100%	346			100%	346	100%	346	100%	346	100%	1.384	biro adm. kesra
		3. Jumlah Kebijakan tentang permasalahan Kesehatan dan KB																
		4. Jumlah Kebijakan tentang permasalahan Pemberdayaan Perempuan	PROGRAM PENINGKATAN GENDER DAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan gender dan kualitas hidup perempuan	n/a	22%	251	22%	0	48%	302	74%	302	100%	302	100%	1.157	biro adm. kesra
	3. Meningkatkan ya Kualitas Pendidikan dan pemahaman nilai-nilai Keagamaan	5. Jumlah Kebijakan tentang permasalahan perlindungan anak dan narkoba.																
		6. Jumlah penerima bantuan sarana prasarana ibadah																
		7. Jumlah peserta MTQ Nasional/Internasional yang berprestasi	Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana se Provinsi Riau	Rumusan Kebijakan Pemerintah Riau dan Program kerja di bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB		100%	151			100%	151	100%	151	100%	151	100%	604	biro adm. kesra
		8. Jumlah Mahasiswa penerima bantuan	Perempuan dan Keluarga Berencana se															

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
		pendidikan pada masyarakat kurang mampu	Provinsi Riau															
			Inventarisasi dan Evaluasi PERDA Responsif Gender	Kebijakan Produk Hukum yang responsif gender yang memihak pemberdayaan perempuan		100%	100			100%	151	100%	151	100%	151	100%	553	biro adm. kesra
			PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan perlindungan anak dan keluarga berencana	n/a	23%	1.012	23%	0	49%	1.112	74%	1.112	100%	1.112	100%	4.348	biro adm. kesra
			Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS bagi pegawai dilingkungan pemerintah Provinsi Riau	Meningkatnya pemahaman PNS tentang pencegahan dan penanggulang an HIV dan AIDS bagi pegawai di		100%	0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				lingkungan Pemerintah Provinsi Riau														
			Forum Tukar Pengalaman Remaja (GENRE)	Terlaksananya Forum Tukar Pengalaman Remaja (GENRE)		100%	462			100%	462	100%	462	100%	462	100%	1.848	biro adm. kesra
			Monitoring dan Evaluasi UKS (Unit Kesehatan Sekolah) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2014	Terdatanya perkembangan, pertambahan dan peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah se Kab/ Kota di Provinsi Riau		100%	250			100%	250	100%	250	100%	250	100%	1.000	biro adm. kesra
			Rakor Tim Pembina UKS se Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2014	Terwujudnya persamaan persepsi terhadap pengembangan dan pembinaan UKS di kabupaten/		100%	300			100%	300	100%	300	100%	300	100%	1.200	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Kota se Provinsi Riau														
			PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan perlindungan pemberdayaan perempuan	n/a	9%	127	9%	0	39%	427	70%	427	100%	427	100%	1.408	biro adm. kesra
			Penyuluhan bahaya Narkoba bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Terlaksananya Penyuluhan bahaya Narkoba bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau		100%	0			100%	150	100%	150	100%	150	100%	450	biro adm. kesra
			Monev Penanganan KDRT di Kab/kota se Provinsi Riau	Terlaksananya Monev Penanganan KDRT di Kab/kota se Provinsi Riau		100%	127			100%	127	100%	127	100%	127	100%	508	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Forum koordinasi Penyelenggaraan kerjasama Pencegahan dan pemulihan korban KDRT di Provinsi Riau	Terlaksananya Forum koordinasi Penyelenggaraan kerjasama Pencegahan dan pemulihan korban KDRT di Provinsi Riau		100%	0			100%	150	100%	150	100%	150	100%	450	biro adm. kesra
			PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA DAN PEMBINAAN UMAT BERAGAMA	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan bantuan peningkatan kualitas pemahaman dn pengamalan agama dan pembinaan umat beragama	n/a	4%	11.673	25%	66.623	50%	79.124	75%	78.959	100%	78.182	100%	314.561	biro adm. kesra
			Training Center (TC) Musabaqah Tilawatil Qur'an	Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat		100%	2.775			100%	2.775	0	0	0%	0	100%	5.550	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			(MTQ) Tingkat Nasional XXV	Nasional dengan adanya peningkatan kualitas Qori dan Qoriah Provinsi Riau														
			Training Center (TC) Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional	Peningkatan Kualitas Qori dan Qoriah dari Provinsi Riau Yang Bertanding MTQ Tingkat Nasional		0	0	0	0	0	0	45 org	1.300	45 org	1.200	90 org	2.500	biro adm. kesra
			Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional	Di ikut sertakan Qori dan Qoriah dari Provinsi Riau yang bertanding di Tingkat Nasional								45 org	2.500	45 org	2.500	91 org	5.000	biro adm. kesra
			Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional XXV	Terlaksana penyertaan kontingen MTQ Riau di Provinsi		100%	3.000			100%	3.000	100%	3.000	100%	3.000	100%	12.000	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Kepulauan Riau														
			Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama se Provinsi Riau	Meningkatnya pemahaman umat beragama tentang sosialisasi kerukunan umat beragama		100%	0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. kesra
			Sosialisasi Pelaksanaan Bazis di Lingkungan Pemprov Riau	Terwujudnya kesadaran PNS tentang sosialisasi kerukunan umat pengumpul zakat (UP2)		100%	0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. kesra
			Bimbingan Manasik Haji bagi Calon Jemaah Haji bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Terlaksananya manasik haji bagi calon jema'ah Haji PNS di lingkungan Pemerintah Prov. Riau		100%	272	200 Org	500	200 Org	500	200 Org	500	200 Org	500	800 Org	2.272	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pelatihan Tenaga Pengajar TPA/TPQ dan PDTA se Provinsi Riau	Terlaksananya keseragaman materi pembelajaran bagi anak didik pada TPA/TPQ dan PDTA se - Provinsi Riau		100%	0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. kesra
			Pelatihan dan Bimbingan pemuka masyarakat, pemuka agama, Da'i se Propinsi Riau	Meningkatnya kapasitas pemuka masyarakat, pemuka agama dalam penyampaian materi agama.		100%	0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. kesra
			Silaturahmi Pemerintah Provinsi Riau dengan Mubalihg, Tokoh Masyarakat dan Anak Yatim	Meningkatnya hubungan Silaturahmi Pemprov. Riau dengan Mubaligh, Tokoh Masyarakat dan adanya kepedulian Pemprov. Riau terhadap		100%	399	500 Org	300	500 Org	300		200	0	162,313	2000 Org	1.361,313	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Anak Yatim														
			Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah se Provinsi Riau	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga Penyelenggara Jenazah di Masyarakat Kab/Kota se Prov.Riau		100%	0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. kesra
			PHBI (Sosialisasi Pencegahan Aliran-Aliran Sesat / Sempalan)	Terwujudnya upaya Antisipasi bahaya aliran-aliran sesat yang berkembang dan pemahaman Agama Islam yang benar di Provinsi Riau.		100%	0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. kesra
			Bimbingan dan Pelatihan Khotib Muda pada Kabupaten/Kota	Meningkatnya ilmu pengetahuan khotib muda dan		100%	0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			se Provinsi Riau	pembekalan khotib muda sesuai ketentuan syarat dan rukun.														
			Pekan Bhakti Pemuda Lintas Agama se Provinsi Riau	Terlaksananya Pekan Bhakti Pemuda Lintas Agama Se Provinsi Riau		100%	0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. kesra
			Pengadaan Tenda, Kursi dan Sound System	Tersedianya Tenda dan Kursi untuk masyarakat		100%	0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. kesra
			Pengadaan Wirelees	tersedianya Wirelees untuk masyarakat		100%	0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. kesra
			Pengadaan karpet	Tersedianya karpet untuk masyarakat			0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. kesra
			Pengadaan Mesin Robin	Tersedianya Mesin Robin untuk		100%	0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				masyarakat														
			Pengadaan Jam	Tersedianya Jam untuk masyarakat		100%	0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. kesra
			Pengadaan Kelengkapan Untuk Rumah Ibadah	Tersedianya Kelengkapan Untuk Rumah Ibadah		100%	0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. kesra
			Pengadaan Tikar Sholat 100 Mmesjid Mukminin Sp Kualo Pkl Kerinci	Tersedianya Tikar Sholat 100 Mmesjid Mukminin Sp Kualo Pkl Kerinci		100%	0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. kesra
			Pengecatan Bangunan Komplek Mesjid Agung An Nur Provinsi Riau / Perencanaan dan Pengawasan	Terlaksananya Pengecatan Mesjid Agung An Nur Provinsi Riau		100%	1.026			100%	1.026	100%	1.026	100%	1.026	100%	4.104	biro adm. kesra
			Pembuatan Kubah Beton Bangunan Teras	Terciptanya pembuatan Kubah Beton		100%	204			100%	204	100%	204	100%	204	100%	816	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pendidikan Mesjid Agung An Nur Provinsi Riau / Perencanaan dan Pengawasan	Mesjid Agung An Nur														
			Pembuatan Tambahan kamar wudhu Mesjid Agung An-Nur Provinsi Riau / Perencanaan dan Pengawasan	Terlaksananya pembuatan tambahan kamar wudhu mesjid agung an nur		100%	158			100%	158	100%	158	100%	158	100%	632	biro adm. kesra
			Pembangunan Mesjid Raya Kec Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru / Perencanaan dan Pengawasan	Terlaksananya Pembangunan Mesjid Raya Kec Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru		100%	255			100%	255	100%	255	100%	255	100%	1.020	biro adm. kesra
			Lanjutan Pembangunan Mubaligh Center Riau Pekanbaru / Perencanaan dan Pengawasan	Terlaksananya Pembangunan Mubaligh Center Riau Pekanbaru		100%	1.535			100%	1.535	100%	1.535	100%	1.535	100%	6.140	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Rokan Hilir/ Perencanaan dan Pengawasan	Terlaksananya Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Rokan Hilir		100%	1.002			100%	1.002	100%	1.002	100%	1.002	100%	4.008	biro adm. kesra
			Pembangunan Gedung IPHI Kecamatan / Perencanaan dan Pengawasan	Terlaksananya pembangunan Gedung IPHI Kecamatan		100%	106			100%	106	100%	106	100%	106	100%	424	biro adm. kesra
			Pembangunan Masjid Raudatul Jannah Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir / Perencanaan dan Pengawasan	Terlaksananya pembangunan Masjid Raudatul Jannah Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir		100%	339			100%	339	100%	339	100%	339	100%	1.356	biro adm. kesra
			Pelatihan Da'i	Terlaksananya pelatihan da'i 2 (dua) angkatan, 60 orang selama 5 (lima) kali		100%	600			100%	600	100%	600	100%	600	100%	2.400	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Training Center (TC) Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional	Terlaksananya peningkatan kualitas Qori dan Qori'ah STQ Tingkat Nasional				20 Org qori dan Qori'ah	5.000	20 Org qori dan Qori'ah	5.000	20 Org qori dan Qori'ah	5.000	20 Org qori dan Qori'ah	5.000	80 Org qori dan Qori'ah	20.000	biro adm. kesra
			Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional	Terlaksananya kegiatan STQ tingkat Nasional				20 Org qori dan Qoriah	15.000	20 Org qori dan Qoriah	15.000	20 Org qori dan Qoriah	15.000	20 Org qori dan Qoriah	15.000	80 Org qori dan Qoriah	60.000	biro adm. kesra
			Kegiatan Aktifitas Keagamaan se Provinsi Riau tentang aliran Sempalan yang tersebar di Kab/Kota se Provinsi Riau	Terciptanya koordinasi aktifitas keagamaan				12 Kab/Kota	1.200	12 Kab/Kota	1.200	12 Kab/Kota	1.200	12 Kab/Kota	1.200	12 Kab/Kota	4.800	biro adm. kesra
			Penyelenggara n Safari Ramadhan	Terlaksananya pelaksanaan safari ramadhan se provinsi Riau				12 Kab/Kota	500	12 Kab/Kota	500		250		240,220	12 Kab/Kota	1.490,220	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Infentarisasi peninggalan sejarah Islam di Kab/Kota se Provinsi Riau	Terhimpunnya data-data peninggalan sejarah Islam di Provinsi Riau			12 Kab/Kota	500	12 Kab/Kota	500		100		100	12 Kab/Kota	1.200	biro adm. kesra	
			Riau berzikir bersempena dengan perayaan Ulang tahun Provinsi Riau	Terciptanya Masyarakat Riau yang agamis			1 Kegiatan	500	1 Kegiatan	500		200		450	4 Kegiatan	1.650	biro adm. kesra	
			Penyelenggaraan Sholat IED di Kantor Gubernur Riau	Meningkatnya silaturahmi Pemprov Riau dengan masyarakat melalui pelaksanaan ibadah Sholat IED			1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	100	3000 org	60	3000 org	80	2 Kegiatan ; 6000 org	340	biro adm. kesra	
			Tim Pemandu/Pembi mbing Haji Daerah (TPHD) Provinsi Riau	Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Riau dalam Pelayanan Haji			1 Kegiatan	1.000	1 Kegiatan	1.000	700	1.000	1 Kegiatan	500	4 Kegiatan	3.500	biro adm. kesra	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Makan Minum CJH Provinsi Riau Di Embarkasi Batam	Tersediannya Konsumsi untuk pelepasan dan kembalinya jemaah haji ke tanah air			1 Kegiatan	750	1 Kegiatan	750	0	0	0	0	2 Kegiatan	1.500	biro adm. kesra	
			Makan Minum Jemaah Haji Provinsi Riau di Embarkasi Batam				0		0		650		250		900	biro adm. kesra		
			Pembangunan Mesjid Raya Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru	Terwujudnya pembangunan Mesjid Raya di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru			1 Kegiatan	7.178	1 Kegiatan	7.178	1 Kegiatan	7.178	1 Kegiatan	7.178	4 Kegiatan	28.712	biro adm. kesra	
			Pembangunan Mesjid Raya Kab. Rokan Hilir	Terwujudnya pembangunan Mesjid Raya di Kab. Rokan Hilir			1 Kegiatan	30.821	1 Kegiatan	30.821	1 Kegiatan	30.821	1 Kegiatan	30.821	4 Kegiatan	123.284	biro adm. kesra	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pembangunan Gedung IPHI Kecamatan Bangko	Terwujudnya pembangunan gedung IPHI di Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir				1 Kegiatan	2.275	1 Kegiatan	2.275	1 Kegiatan	2.275	1 Kegiatan	2.275	4 Kegiatan	9.100	biro adm. kesra
			Pengadaan Kursi Dan Tenda Wirid Yasin Kab Pelalawan	Tersedianya Kursi Dan Tenda Wirid Yasin Kab Pelalawan				1 Kegiatan	800	1 Kegiatan	800	1 Kegiatan	800	1 Kegiatan	800	4 Kegiatan	3.200	biro adm. kesra
			Pengadaan Kursi 720 buah, tenda 12 buah untuk 12 kelompok wirid di Pekanbaru	Tersedianya Kursi 720 buah, tenda 12 buah untuk 12 kelompok wirid di Pekanbaru				1 Kegiatan	200	1 Kegiatan	200	1 Kegiatan	200	1 Kegiatan	200	4 Kegiatan	800	biro adm. kesra
			Koordinasi Bidang Keagamaan	Tersinkronisasinya Masalah Keagamaan								12 Kab/ Kota	200	12 Kab/ Kota	200	12 Kab/ Kota	400	biro adm. kesra
			PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan bantuan peningkatan	n/a	20%	300	40%	300	60%	300	80%	300	100%	300	100%	1.500	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			DAN AGAMA	kualitas pendiidkan dan agama														
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Ibadah, Pondok Pesantren dan TPA/MDA	Terdatanya perkembangan pertambahan, peningkatan rumah ibadah, Ponpes, dan TPA/MDA se Provinsi Riau		100%	300			100%	300	100%	300	100%	300	100%	1.200	biro adm. kesra
			PROGRAM BANTUAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SDM	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembinaan dan peningkatan SDM	n/a	21%	1.193	21%	0	47%	1.493	74%	1.493	100%	1.493	100%	5.672	biro adm. kesra
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Beasiswa	Terantau dan terevaluasinya penerima bantuan beasiswa S2, dan S3 dari Pemerintah		100%	0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. Kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Provinsi Riau														
			Koordinasi dan Implementasi bidang Kesejahteraan Rakyat	Terciptanya koordinasi dan implementasi bidang kesejahteraan rakyat antara Pemerintah Pusat, Pemprov dan Kabupaten/ Kota		100%	150			100%	150	100%	150	100%	150	100%	600	biro adm. kesra
			Monitoring, dan Evaluasi Panti Asuhan se Provinsi Riau	Termonitor dan terevaluasi kebutuhan prioritas 84 Panti Asuhan di Provinsi Riau		100%	300			100%	300	100%	300	100%	300	100%	1.200	biro adm. kesra
			Koordinasi Kegiatan Aktifitas Keagamaan se Provinsi Riau	Terlaksananya koordinasi kegiatan aktifitas keagamaan dalam		100%	165			100%	165	100%	165	100%	165	100%	660	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				mewujudkan kerjasama antara Pemprov Riau dengan Kab/Kota.														
			Optimalisasi Peran Panti Asuhan di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terciptanya Standar pengelolaan Panti Asuhan yang Profesional di Provinsi Riau		100%	0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. kesra
			Pengelolaan Asrama Pelajar/Mahasiswa Riau se Indonesia	Terwujudnya pengelolaan Asrama Pelajar aktifitas keagamaan dalam mewujudkan baik dan efisien		100%	278			100%	278	100%	278	100%	278	100%	1.112	biro adm. kesra
			Penyelenggaraan Safari Ramadhan	Terjalinnnya hubungan silaturahmi antara Pemprov Riau		100%	300			100%	300	100%	300	100%	300	100%	1.200	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				dengan pengurus/jamaah pada mesjid dan Mushalla se Provinsi Riau dengan Kab/Kota														
			Forum Pengembangan Bahasa Melayu (FORYU)	Terlaksananya Forum Pengembangan Bahasa Melayu (FORYU)		100%	0			100%	100	100%	100	100%	100	100%	300	biro adm. kesra
			PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial tenaga kerja dan transmigrasi	n/a	0%	0	25%	3.965	50%	3.965	75%	2.650	100%	2.675	100%	13.255	biro adm. kesra
			Penyusunan perumusan kebijakan di bidang sosial	Disahkannya kebijakan - kebijakan di bidang Sosial		0	0	1 kebijakan	250	1 kebijakan	250	0	0	0	0	2 kebijakan	500	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Penyusunan perumusan kebijakan di bidang sosial	Disahkannya Kebijakan- Kebijakan di Bidang Sosial		0	0	0	0	0	0	1 Pergub	200	1 Pergub	200	2 kebijakaan	400	biro adm. kesra
			Penyusunan perumusan bidang tenaga kerja dan Transmigrasi	Disahkannya kebijakan - kebijakan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0	0	1 kebijakan	250	1 kebijakan	250	0	0	0	0	2 kebijakaan	500	biro adm. kesra
			Penyusunan perumusan bidang tenaga kerja dan Transmigrasi	Disahkannya Kebijakan- kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0	0	0		0	0	1 Pergub	200	1 Pergub	200	2 kebijakaan	400	biro adm. kesra
			Rapat Koordinasi dan Implementasi Bidang Kesejahteraan Rakyat se Provinsi Riau	Menguatnya kerjasama antar Pemerintah Daerah				12 Kab/Kota	415	12 Kab/Kota	415	1 Kegiatan	350	1 Kegiatan	300	12 Kab/Kota ; 2 Kegiatan	1.480	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Koordinasi Bidang Sosial se Provinsi Riau	Menguatnya kerjasama antar Pemerintah Daerah				12 Kab/Kota	500	12 Kab/Kota	500	1 Kegiatan	200	1 Kegiatan	250	12 Kab/Kota ; 2 Kegiatan	1.450	biro adm. kesra
			Koordinasi Tenaga Kerja se Provinsi Riau	Menguatnya kerjasama antar Pemerintah Daerah				12 Kab/Kota	500	12 Kab/Kota	500	12 Kab/Kota	500	12 Kab/Kota	500	12 Kab/Kota	2.000	biro adm. kesra
			Koordinasi Transmigrasi se Provinsi Riau	Menguatnya kerjasama antar Pemerintah Daerah				12 Kab/Kota	500	12 Kab/Kota	500	12 Kab/Kota	500	12 Kab/Kota	500	12 Kab/Kota	2.000	biro adm. kesra
			Penyediaan jasa prestasi Tim verifikasi Hibah dan Bansos	Terlaksananya Proses Verifikasi Hibah dan Bansos				1 Kegiatan	600	1 Kegiatan	600	0	0	0	0	2 Kegiatan	1.200	biro adm. kesra
			Pelayanan dan Ketata Usahaan Biro	Terpenuhinya kebutuhan administrasi Kantor Biro Kesra				1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	300	4 Kegiatan	1.200	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Monitoring evaluasi dan pelaporan bidang sosial	Terdatanya dan Terevaluasinya jumlah Pelaporan bidang sosial				12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	300	1 Kegiatan	200	1 Kegiatan	200	12 Kab/Kota ; 2 Kegiatan	1.000	biro adm. kesra
			Monitoring evaluasi Bidang tenaga kerja dan transmigrasi	Terdatanya dan Terevaluasinya jumlah Pelaporan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi				12 Kab/Kota	350	12 Kab/Kota	350	1 dokumen	200	1 dokumen	225	12 Kab/Kota ; 2 dokumen	1.125	biro adm. kesra
			Koordinasi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi se Provinsi Riau	Menguatnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah								1 Kegiatan	200	1 Kegiatan	200	2 Kegiatan	400	biro adm. kesra
			PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kesehatan, pemberdayaan perempuan	n/a	0%	0	25%	7.233	50%	7.233	75%	5.260	100%	6.010	100%	25.736	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				dan KB														
			Penyusunan Perumusan Kebijakan dibidang Kesehatan dan KB	Terealisasi dan Terefasilitasi kesamaan Pandangan dan Persepsi untuk dapat mengesahkan dan menetapkan Perumusan Kebijakan Bidang Kesehatan dan KB di Provinsi Riau dalam bentuk Kebijakan			1 Kebijakan	250	1 Kebijakan	250	1	200	1	250	4 Kebijakan	950	biro adm. kesra	
			Penyusunan Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Terealisasi dan Terefasilitasinya Kesamaan Pandangan dan Persepsi untuk dapat Mengesahkan dan			1 Kebijakan	250	1 Kebijakan	250	1	200	1	200	4 Kebijakan	900	biro adm. kesra	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Menetapkan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Provinsi Riau														
			Penyusunan Perumusan Kebijakan bidang Perlindungan Anak dan Narkoba	Terealisasi dan Terfasilitasi Kesamaan Pandangan dan Persepsi untuk dapat Mengesahkan dan Menetapkan Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Anak dan Narkoba di Provinsi Riau dalam Bentuk Kebijakan			1 Kebijakan	250	1 Kebijakan	250	1	200	1	200	4 Kebijakan	900	biro adm. kesra	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Koordinasi Bidang Kesehatan dan KB se Provinsi Riau	Menguatnya Kerjasama antar pemerintah Daerah				12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	300	0	0	0	300	12 Kab/Kota	900	biro adm. kesra
			Koordinasi Bidang pemberdayaan Perlindungan Perempuan se Provinsi Riau.	Menguatnya Kerjasama antar pemerintah Daerah				12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	1.200	biro adm. kesra
			Koordinasi Bidang Perlindungan Anak dan Narkoba se Provinsi Riau.	Menguatnya Kerjasama antar pemerintah Daerah				12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	300	0	0	0	0	12 Kab/Kota	600	biro adm. kesra
			Forum Tukar Pengalaman Remaja (Genre)	Meningkatnya Komunikasi, Wawasan dan Pengetahuan serta Sikap Dalam Ajang Kumpul Remaja Pengelola PIK Remaja dan Mahasiswa se				1 Kegiatan	500	1 Kegiatan	500	1	300	1	400	4 Kegiatan	1.700	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Provinsi Riau														
			Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Pencegahan dan penanggulang an HIV dan AIDS Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau			1 Kegiatan	350	1 Kegiatan	350	0	0	0	0	2 Kegiatan	700	biro adm. kesra	
			Penyuluhan bahaya Narkoba bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Terwujudnya PNS yang bebas dari penggunaan Narkoba dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau			1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	300	4 Kegiatan	1.200	biro adm. kesra	
			Monitoring dan Evaluasi UKS Kab/Kota se Provinsi Riau	Terdatanya UKS yang terdapat di Kab/Kota se Provinsi Riau			12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	1.200	biro adm. kesra	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Monitoring dan Evaluasi Perda dan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Narkoba Kab/Kota se Prov. Riau	Terdatanya Perda dan Kasus kekerasan terhadap anak di Kab/Kota se Provinsi Riau				12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	1.200	biro adm. kesra
			Monitoring dan Evaluasi Perda dan Kasus Kekerasan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kab/Kota se Prov. Riau	Terdatanya Perda dan Kasus kekerasan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kab/Kota se Prov. Riau				12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	1.200	biro adm. kesra
			Monitoring dan Evaluasi Perda dan Kebijakan di Bidang Kesehatan dan KB Kab/Kota se Provinsi Riau	Terdatanya Perda dan kebijakan di Bidang Kesehatan Kab/Kota se Provinsi Riau				12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	300	0	0	0	0	12 Kab/Kota	600	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Forum Koordinasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lingkungan Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan di Provinsi Riau	Terwujudnya Forum Koordinasi penyelenggaraan kerjasama dan pencegahan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Lingkungan Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan di Provinsi Riau			12 Kab/Kota	400	12 Kab/Kota	400	12 Kab/Kota	400	12 Kab/Kota	400	12 Kab/Kota	1.600	biro adm. kesra	
			Pembuatan iklan layanan masyarakat tentang bahaya HIV / AIDS di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau	Terwujudnya Provinsi Riau yang minimum terhadap penyebaran HIV/AIDS			12 Kab/Kota	980	12 Kab/Kota	980	12 Kab/Kota	980	12 Kab/Kota	980	12 Kab/Kota	3.920	biro adm. kesra	
			Pembuatan iklan layanan masyarakat	Terwujudnya Provinsi Riau yang Madani			12 Kab/Kota	980	12 Kab/Kota	980	12 Kab/Kota	980	12 Kab/Kota	980	12 Kab/Kota	3.920	biro adm. kesra	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			tentang perlindungan anak di Kab/Kota se Provinsi Riau	dan daerah layak anak di Indonesia														
			Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Pilot Project Se- Provinsi Riau	Terciptanya Lembaga Swadaya (UKS) di Sekolah yang Mandiri dan Kreatif sebagai Pilot Project di Kab/Kota			12 Kab/Kota	573	12 Kab/Kota	573	1	300	1	500	2	1.946	biro adm. kesra	
			Koordinasi Penyelenggaraan kerjasama dan pencegahan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Kesepakatan Kebijakan Dalam Membentuk Forum Penanganan KDRT di Lingkungan Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan se- Provinsi Riau			12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	300	1	200	1	300	12 Kab/Kota	1.100	biro adm. kesra	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Bidang Perlindungan Anak dan Narkoba Se-Provinsi Riau	Terjalinnya hubungan kerjasama yang harmonis untuk menselaraskan kesamaan persepsi dalam menjalankan berbagai kebijakan Bidang Perlindungan Anak dan Narkoba di Provinsi Riau.							1	200	1	300	2	500	biro adm. kesra	
			Forum Pencegahan Bahaya Narkoba Bagi Siswa / Mahasiswa Provinsi Riau	Terlaksananya Forum Komunikasi tentang Pencegahan dan Penanggulang an Bahaya Napza bagi Siswa/Mahasi swa di							1	300	1	450	2	750	biro adm. kesra	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Provinsi Riau														
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau	Kesepakatan Kebijakan Dalam Membentuk Forum Penanganan KDRT di Lingkungan Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan se- Provinsi Riau							1	200	1	150,533	2	350,533	biro adm. kesra	
			Forum Koordinasi Pelaksanaan Kesetaraan Gender Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau	Meningkatnya Komunikasi, Wawasan dan Pengetahuan serta Sikap Dalam Ajang Kumpul Remaja Pengelola PIK Remaja dan Mahasiswa se Provinsi Riau							1	250	1	200	2	450,000	biro adm. kesra	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Forum Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Bagi PNS (ASN) Provinsi Riau	Meningkatnya Pengetahuan, Wawasan Untuk Pencegahan Bahaya HIV dan AIDS bagi PNS (ASN) di Provinsi Riau							1	300	1	450	2	750,000	biro adm. kesra	
			Koordinasi, Monitoring Evaluasi Pelaporan di Bidang Kesehatan dan KB Se Provinsi Riau	Menguatnya kerjasama antar pemerintah daerah di bidang Kesehatan dan Kb							1	200	1	192,003	2	392,003	biro adm. kesra	
			Rapat Koordinasi Tim Pembina dan Tim Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Kab/Kota Se- Provinsi Riau	Kesepakatan pelaksanaan UKS di kab/Kota.							1	350	1	400,000	2	750,000	biro adm. kesra	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN	Peresentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan pendidikan dan keagaamaan	n/a	0%	0	25%	2.848	50%	2.848	75%	1.898	100%	1.898	100%	9.492	biro adm. kesra
			Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan	Terfasilitasinya Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan di Provinsi Riau				1 Kegiatan	500	1 Kegiatan	500	1 Kebijakan Kepala Daerah	200	1 Kebijakan Kepala Daerah	200	2 Kegiatan ; 2 Kebijakan Kepala Daerah	1.400	biro adm. kesra
			Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Keagamaan	Terfasilitasinya Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan di Provinsi Riau				1 Kegiatan	500	1 Kegiatan	500	1 Kebijakan Kepala Daerah	200	1 Kebijakan Kepala Daerah	200	2 Kegiatan ; 2 Kebijakan Kepala Daerah	1.400	biro adm. kesra
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rumah Ibadah, Ponpes dan PDTA/MDTA dan TPA/TPQ Se-	Didapatnya data yang akurat mengenai Rumah Ibadah, Pondok Pesantren dan				1 Kegiatan	500	1 Kegiatan	500	12 Kab/ Kota	200	12 Kab/ Kota	200	2 Kegiatan ; 12 Kab/Kota	1.400	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Provinsi Riau	TPA/MDTA yang akan dibantu														
			Monitoring Kegiatan Magrib mengaji di Kab/Kota se Provinsi Riau	Terlaksananya magrib mengaji yang tersebar di Kab/Kota se Provinsi Riau				1 Kegiatan	500	1 Kegiatan	500	1 Kegiatan	500	1 Kegiatan	500	4 Kegiatan	2.000	biro adm. kesra
			Pengelolaan Asrama Pelajar / mahasiswa Riau se Indonesia	Jumlah asrama pelajar / mahasiswa di luar Provinsi Riau yang terinventarisasi				1 Kegiatan	348	1 Kegiatan	348	1 Kegiatan	348	1 Kegiatan	348	4 Kegiatan	1.392	biro adm. kesra
			Pendataan Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu (S1)	Terdatanya mahasiswa kurang mampu yang berada di Prov. Riau				12 Kab/Kota	250	12 Kab/Kota	250	12 Kab/Kota	250	12 Kab/Kota	250	12 Kab/Kota	1.000	biro adm. kesra
			Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan	Meningkatnya Komunikasi dengan seluruh Universitas				12 Kab/Kota	250	12 Kab/Kota	250	100 org	200	100 org	200	12 Kab/Kota ; 200 org	900	biro adm. kesra

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				dan Perguruan Tinggi dalam Rangka Memfasilitasi Bantuan PendidikanS1 Kurang Mampu se Provinsi Riau														
			Koordinasi Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GEMMAR MENGAJI) di Kab/Kota Se- Provinsi Riau	Terlaksannya Maghrib mengaji yang tersebar di 12 Kabupaten/Ko ta se Provinsi Riau							12 Kab/Kota	250	12 Kab/Kota	450	12 Kab/Kota	700	biro adm. kesra	
			Penyediaan Jasa Prestasi Tim Verifikasi Hibah dan Bansos	Terverifikasi , Terekomenda si dan Terealisasinya Pencairan Dana Hibah dan Bansos							12 Kab/ Kota	1000	12 Kab/ Kota	1000	12 Kab/ Kota	2.000	biro adm. kesra	
Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Hukum	1. Meningkatkan Kualitas Produk	1. Jumlah Produk Hukum	PROGRAM PENINGKATAN DAN	Persentase pencapaian pelaksanaan	n/a	11%	2.649	31%	4.703	54%	5.503	76%	4.369	100%	5.293	100%	22.517	biro hukum & HAM

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
dan HAM.	Hukum Provinsi dan Kab/Kota 2. Meningkatkan Kualitas Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Hukum 3. Meningkatkan Fasilitas Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Tersedianya Dokumentasi dan Naskah Hukum Daerah	Provinsi yang Telah di Harmonisasi 2. Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Diharmonisasi 3. Prosentasi Masyarakat yang Mendapat Penyuluhan Hukum 4. Jumlah Gugatan/Perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara di Pengadilan yang di Tangani 5. Jumlah Permasalahan HAM 6. Jumlah Produk Hukum yang di Publikasikan melalui JDIH dan CD 7. Jumlah	PENGEMBANGAN APARATUR	kegiatan peningkatan dan pengembangan aparatur														
			Pemberian Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Di Daerah Perbatasan Negara Tetangga	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Aturan Hukum				5 Kecamatan	270	5 Kecamatan	270	0	0	0	270	20 Kecamatan	810	biro hukum & HAM
			Penataan dan Pengolahan Bahan Pustaka pada Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Terlaksananya Inventarisasi, klasifikasi dan katalogisasi bahan pustaka				3000 Bahan Pustaka	350	3000 Bahan Pustaka	350	6000 buku/bahan pustaka	164,263	6000 buku/bahan pustaka	200	6.000 Bahan Pustaka ; 12.000 buku/bahan pustaka	1064,263	biro hukum & HAM
			Perencanaan Program/Kegiatan dan Administrasi Ketatausahaan Biro Hukum dan HAM	Jumlah Dokumen dalam Pelayanan Administrasi Ketatausahaan Biro Hukum				5 Dokumen	110	5 Dokumen	110	5 Dokumen	117,908	5 Dokumen	200	20 Dokumen	537,908	biro hukum & HAM

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
		Naskah Hukum Daerah yang diharmonisasi		dan Ham														
			Peningkatan Capacity Building Aparatur Biro Hukum dan Ham	Jumlah Program dan Kegiatan yang di fasilitasi				2 Aparatur/ 12 kab/ Kota	450	24 Aparatur	450	24 Aparatur	450	24 Aparatur	450	120 Aparatur	1.800	biro hukum & HAM
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pencapaian Pelaksanaan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	n/a	2%	800	25%	8.450	50%	9.150	75%	7.142	100%	7.830	100%	33.372	biro adm. Perekonomian & SDA, biro organisasi, biro hukum & HAM
			Monitoring dan Evaluasi Permasalahan HAM se Provinsi Riau Tahun 2013	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Permasalahan HAM se Provinsi Riau Tahun 2013		12 Kab/ Kota	100			12 Kab/ Kota	100	12 Kab/ Kota	100	12 Kab/ Kota	100	12 Kab/ Kota	400	biro hukum & HAM
			Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Se Provinsi Riau Tahun 2014	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Provinsi Riau		100 Orang	0			100 Orang	100	50 Aparatur se Provinsi Riau	156,522	50 Aparatur se Provinsi Riau	200	200 Orang ; 10 Aparatur se Provinsi	456,522	biro hukum & HAM

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				sebanyak 50 orang .											Riau			
			Harmonisasi dan Sinkronisasi Naskah MoU dan Kerjasama	Terwujudnya Perjanjian Kerja Sama Daerah yang telah diharmonisasi dan disinkronisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku		500 Mou	200			500 Mou	200	0	0	0	0	1000 Mou	400	biro hukum & HAM
			Sosialisasi HAM bagi pelajar SLTA Di Provinsi Riau Tahun 2014	Jumlah Siswa yang memahami teknis penyusunan dan perancangan MoU se Provinsi Riau		50 Siswa/ 10 Sekolah	350	50 Siswa/ 10 Sekolah	350	50 Siswa/ 10 Sekolah	350	50 Siswa/ 10 Sekolah	350	50 Siswa/ 10 Sekolah	350	250 Siswa/ 50 Sekolah	1.750	biro hukum & HAM
			Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyusunan Dan	Jumlah aparatur yang memahami teknis		47 Aparatur SKPD Prov Riau dan 12 Aparatur	0			47 Aparatur SKPD Prov Riau dan 12 Aparatur	150	47 Aparatur SKPD Prov Riau dan 12 Aparatur	150	47 Aparatur SKPD Prov Riau dan 12 Aparatur	150	47 Aparatur SKPD Prov	450	biro hukum & HAM

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Perancangan MoU Se Provinsi Riau Tahun 2014	penyusunan dan perancangan MoU se Provinsi Riau		Kab/ Kota				Kab/ Kota		Kab/ Kota		Kab/ Kota		Riau dan 12 Aparatur Kab/ Kota		
			Dokumentasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan (Penyebarluasan Perda Melalui Mass Media, Cakra Padat (CD))	Tersosialisasin ya Produk Hukum secara cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat dan pemakai informasi hukum				200 CD 400 Dokumen	200	200 CD 400 Dokumen	200	100 CD Perda, 100 CD Pegub dan 846 Dokumen (Perda, Pergub, SK)	99,086	100 CD Perda, 100 CD Pegub dan 846 Dokumen (Perda, Pergub, SK)	160	400 CD 800 Dokume n ; 200 CD Perda, 200 CD Pegub dan 1692 Dokume n (Perda, Pergub, SK)	659,086	biro hukum & HAM
			Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terlaksananya Pengelolaan Program JDIH Provinsi Riau				1 Website	150	1 Website	150	0	0	0	0	1 Website	300	biro hukum & HAM
			Pengembangan dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	Terlaksananya Pengelolaan PProgram JDIH PProvinsi Riau								100 Persen	130,340	100 Persen	200	100 Persen	330,340	biro hukum & HAM

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Hukum Se-Provinsi Riau															
			Monitoring dan Evaluasi Permasalahan HAM se Provinsi Riau Tahun 2015	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Permasalahan HAM se Provinsi Riau Tahun 2015				12 Kab/ Kota	100	12 Kab/ Kota	100	12 Kab/ Kota	100	12 Kab/ Kota	100	12 Kab/ Kota	400	biro hukum & HAM
			Monitoring dan Evaluasi Permasalahan HAM se Provinsi Riau	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Permasalahan HAM se Provinsi Riau Tahun 2016								12 kab/kota	69,25	12 kab/kota	120	12 kab/kota	189	biro hukum & HAM
			Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Se Provinsi Riau Tahun 2015	Terselenggaranya Rakor Panitia RANHAM sebanyak 45 orang yang terdiri dari Aparatur Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau				100 Orang	250	100 Orang	250	100 Orang	250	100 Orang	250	400 Orang	1.000	biro hukum & HAM

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Sosialisasi HAM bagi pelajar SLTA di Provinsi Riau Tahun 2015	Terselenggara nya Sosialisasi HAM bagi 50 Pelajar di 10 SLTA Kota Pekanbaru				500 Orang	350	500 Orang	350	500 Orang	350	500 Orang	350	2000 Orang	1.400	biro hukum & HAM
			Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RANHAM se Provinsi Riau	Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksana RANHAM se Provinsi Riau.				12 Kab/ Kota	350	12 Kab/ Kota	350	100 Persen	241,700	100 Persen	300	12 Kab/ Kota ; 100 Persen	1241,700	biro hukum & HAM
			Penguatan HAM di Provinsi Riau	Jumlah siswa peserta Penguatan HAM di SLTA di Provinsi Riau								500 Siswa SLTA dan Sederajat	253,295	500 Siswa SLTA dan Sederajat	300	1.000 Siswa SLTA dan Sederajait	553,295	biro hukum & HAM
			PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan penataan peraturan perundang-undangan	n/a	13%	4.570	35%	7.625	57%	7.535	78%	4.718	100%	5.740	100%	30.188	biro hukum & HAM, biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur	Terwujudnya peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan		800 Keputusan dan 60 Pergub	150	900 SK 60 Pergub	225	900 SK 60 Pergub	225	900 Kpts Gubernur dan 60 Peraturan Gubernur	127,554	900 Kpts Gubernur dan 60 Peraturan Gubernur	180	4400 SK 300 Pergub	907,554	biro hukum & HAM
			Pengkajian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau	Tersusun Ranperda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan		10 Ranperda	765	10 Ranperda	960	10 Ranperda	960	10 Ranperda	431,102	10 Ranperda	500	50 Ranperda	3.616,102	biro hukum & HAM
			Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Riau	Tersusun Rancangan Prolegda		1 Ranprolegda	160	1 Ran Prolegda	225	1 Ran Prolegda	225	1 Ran Prolegda	225	1 Ran Prolegda	225	5 Ran Prolegda	1.060	biro hukum & HAM
			Publikasi Peraturan Perundang-undangan (Penyebarluasan Perda Melalui Mass Media,	Tersebarluasnya informasi Hukum kepada masyarakat		200 CD 483 Dokumen	160			200 CD 483 Dokumen	160	200 CD 483 Dokumen	160	200 CD 483 Dokumen	160	800 CD 1932 Dokumen	640	biro hukum & HAM

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Cakra Padat (CD) Dan Web Site JDIH)															
			Pemberian Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Di Daerah Perbatasan Negara Tetangga	Terbinanya masyarakat di daerah perbatasan negara tetangga tentang hukum		9 Kecamatan	250			9 Kecamatan	250	5 Kecamatan (150 org)	151,210	5 Kecamatan (150 org)	200	18 Kecamatan ; 10 Kecamatan (300 org)	851,210	biro hukum & HAM
			Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau)	Tersedianya produk hukum daerah yang berkualitas		12 Kab/ Kota	300			12 Kab/ Kota	300	12 Kab/ Kota	300	12 Kab/ Kota	300	12 Kab/ Kota	1.200	biro hukum & HAM
			Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah (Evaluasi Rancangan	Terciptanya Peraturan Daerah Kab/kota yang mendukung		12 Kab/ Kota	350			12 Kab/ Kota	350	12 Kab/ Kota	350	12 Kab/ Kota	350	12 Kab/ Kota	1.400	biro hukum & HAM

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Peraturan Daerah dan Klarifikasi Peraturan Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau)	kepentingan umum														
			Mediasi dan Penanganan Perkara Perdata serta Tata Usaha Negara diluar Pengadilan maupun di Pengadilan	Jumlah perkara dan perdata dan tun yang dimediasi		10 perkara	425	10 perkara	425	10 perkara	425	0	0	0	0	30 perkara	1.275	biro hukum & HAM
			Penanganan Perkara Perdata Serta Tata Usaha Negara di Pengadilan	Terlaksananya Mediasi dan Penanganan Perkara Perdata serta Tata Usaha Negara diluar pengadilan maupun di pengadilan.								10 Perkara	197,432	10 Perkara	200	20 Perkara	397,432	biro hukum & HAM
			Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum Kab/ Kota Se Provinsi	Jumlah Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum Kab/		36 Aparatur Kab/ Kota 9 Aparatur	150	36 Aparatur Kab/ Kota 9 aparatur	150	36 Aparatur Kab/ Kota 9 aparatur	150	36 Aparatur Kab/ Kota 9 aparatur	150	36 Aparatur Kab/ Kota 9 aparatur	150	180 Aparatur Kab/ Kota 9	750	biro hukum & HAM

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Riau	Kota Se Provinsi Riau		Biro Hukum		Biro Hukum		Biro Hukum		Biro Hukum		Biro Hukum		aparatur Biro Hukum		
			Penyusunan Legal Opinion Penyelesaian permasalahan Hukum dan Pelatihan Peningkatan kapasitas pemahaman hukum bagi aparatur pemerintah se provinsi	terlaksananya Penyusunan Legal Opinion Penyelesaian permasalahan Hukum dan Pelatihan Peningkatan kapasitas pemahaman hukum bagi aparatur pemerintah se provinsi riau		2 Perkara 20 Dokumen 47 Aparatur SKPD Prov Riau dan 24 Aparatur Kab/ Kota	800	2 Perkara 20 Dokumen 47 Aparatur Prov Riau 24 Aparatur Kab/Kota	800	2 Perkara 20 Dokumen 47 Aparatur Prov Riau 24 Aparatur Kab/Kota	800	0	0	0	0	6 Perkara 60 Dokume n 141 Aparatur Prov Riau 24 Aparatur Kab/Kota	2.400	biro hukum & HAM
			Penyusunan Legal Opinion Penyelesaian Permasalahan Hukum dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemahaman Hukum bagi Aparatur Pemerintah Se	Tersusunnya Legal Opinion Penyelesaian Perkara Masalah Hukum dan Terlaksananya Pembekalan Hukum Aparatur Pemerintah								20 Dokumen dan 52 Aparatur	0	20 Dokumen dan 52 Aparatur	400	40 Dokume n dan 104 Aparatur	400	biro hukum & HAM

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Provinsi Riau	Provinsi Riau														
			Penyusunan Naskah akademik Ranperda Bantuan Hukum	Tersusunnya naskah akademik Ranperda Bantuan Hukum		1 Naskah	350			1 Naskah	350	1 Naskah	350	1 Naskah	350	4 Naskah	1.400	biro hukum & HAM
			Pemberian bantuan Hukum kepada masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pada 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau	Terlaksananya Pemberian bantuan Hukum kepada masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pada 12 Kab/ Kota se Provinsi Riau		2 Perkara/ Kab/ kota	0	12 Kab/Kota	400	12 Kab/Kota	400	2 Perkara/ Kab/ Kota	330,350	2 Perkara/ Kab/ Kota	400	12 Kab/Kota ; 4 Perkara/ Kab/ Kota	1.530,350	biro hukum & HAM
			Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah se	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi Pengendalian		100 Aparatur	450	100 Aparatur	450	100 Aparatur	450	48 Aparatur Kab/ Kota dan 47 Aparatur	239,702	48 Aparatur Kab/ Kota dan 47 Aparatur	300	300 Aparatur ; 96 Aparatur Kab/	1889,702	biro hukum & HAM

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Provinsi Riau	Grativikasi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau							Prov. Riau		Prov. Riau		Kota dan 94 Aparatur Prov. Riau			
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau	Terevaluasinya Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau		1 laporan 1 Rekomendasi	260	1 laporan 1 Rekomendasi	210	1 laporan 1 Rekomendasi	210	95 Persen	107,690	95 Persen	150	3 laporan 3Rekomendasi ; 95 Persen	937,690	biro hukum & HAM
			Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah (Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Klarifikasi Peraturan Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau) Wilayah I	Terevaluasinya Peraturan Perundang-Undangan di Kab/Kota Wilayah I				6 Kab/ Kota	255	6 Kab/ Kota	255	6 Kab/ Kota	112,794	6 Kab/ Kota	150	6 Kab/ Kota	772,794	biro hukum & HAM
			Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah (Evaluasi Rancangan	Terevaluasinya Peraturan Perundang-Undangan di Kab/Kota				6 Kab/ Kota	255	6 Kab/ Kota	255	6 Kab/ Kota	112,747	6 Kab/ Kota	150	6 Kab/ Kota	772,747	biro hukum & HAM

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Peraturan Daerah dan Klarifikasi Peraturan Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau) Wilayah II	Wilayah II														
			Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau) Wilayah I	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota di Wilayah I oleh Pemerintah Provinsi Riau			6 Kab/ Kota	160	6 Kab/ Kota	160	6 Kab/ Kota	90,254	6 Kab/ Kota	150	6 Kab/ Kota	560,254	biro hukum & HAM	
			Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (Pembinaan dan Pengawasan Peraturan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota di Wilayah I oleh			6 Kab/ Kota	160	6 Kab/ Kota	160	6 Kab/ Kota	91,541	6 Kab/ Kota	150	6 Kab/ Kota	561,541	biro hukum & HAM	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau) Wilayah II	Pemerintah Provinsi Riau														
			Sosialisasi Perda Bantuan Hukum	Sosialisasi Perda Bantuan Hukum				2 Perkara Kab/Kota	350	2 Perkara Kab/Kota	350	1 naskah	189,955	1 naskah	200	4 Perkara Kab/Kota ; 2 naskah	1089,955	biro hukum & HAM
			Temu Sadar Hukum Tahun 2015	Terselenggaranya Temu Sadar Hukum Tingkat Provinsi bagi 12 Kab/Kota				12 kab/kota	650	12 kab/kota	650	12 kab/kota	650	12 kab/kota	650	12 kab/kota	2.600	biro hukum & HAM
			Harmonisasi dan Sinkronisasi Naskah MoU dan Kerjasama	Terwujudnya Perjanjian Kerja Sama Daerah yang telah diharmonisasi dan disinkronisasi sesuai dengan Peraturan Perundangan				500 Mou	225	500 Mou	225	500 Mou	125,805	500 Mou	200	2000 Mou	775,805	biro hukum & HAM

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				yang berlaku														
			Penyelenggaraa n Bimbingan Teknis Penyusunan dan Perancangan MOU Se Provinsi Riau Tahun 2015	Terlaksananya penyelenggar aan Bimtek Penyusunan Rancangan MOU				60 Orang	225	60 Orang	225	60 Orang	225	60 Orang	225	240 Orang	900	biro hukum & HAM
			Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau.	Tersusunnya Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau 2017								1 Rancangan Program Pembentuk an Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2017	141,5 59	1 Rancangan Program Pembentuk an Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2018	200	2 Rancang an Program Pembent ukan Peratura n Daerah Provinsi Riau	341,5 59	biro hukum & HAM
			Fasilitasi Penyelesaian Kasus-kasus Hukum Pemerintah Provinsi Riau	Tersusunnya Proses Penyelesaian Kasus-kasus Pemerintahan Provinsi Riau								1 Dokumen	12,68 2	1 Dokumen	300	2 Dokume n	312,6 82	biro hukum & HAM

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pendataan dan Pembahasan Pengaduan Permasalahan Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi)	Pendataan dan pembahasan pengaduan permasalahan hukum diluar peradilan (litigasi)							100 Persen	168,927	100 Persen	200	100 Persen	368,927	biro hukum & HAM	
			Monitoring Pembinaan MoU Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Naskah MoU/Kerjasama Kab/Kota se-Provinsi Riau							100 Persen	109,473	100 Persen	200	100 Persen	309,473	biro hukum & HAM	
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau	Terevaluasinya Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau							95 Persen	119,087	95 Persen	200	95 Persen	319,087	biro hukum & HAM	
			Bimtek Penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan	Terwujudnya aparatur pemerintah yang handal dalam menyusun							50 Aparatur	79,939	50 Aparatur	150	100 Aparatur	229,939	biro hukum & HAM	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Gubernur	Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur														
			Fasilitasi Konsultasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau	Terciptanya Peraturan Daerah Kab/Kota yang Berkualiatas, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku							12 Kab/Kota	175,782	12 Kab/Kota	250	12 Kab/Kota	425,782	biro hukum & HAM	
			Rapat Koordinasi Peraturan Daerah Kab/Kota Se- Provinsi Riau	Jumlah Aparatur Rapat Koordinasi Peraturan Daerah Kab/ Kota Se Provinsi Riau							12 Aparatur Kab/ Kota Se Prov. Riau	112,140	12 Aparatur Kab/ Kota Se Prov. Riau	150	12 Aparatur Kab/ Kota Se Prov. Riau	262,140	biro hukum & HAM	
			Penyelesaian Permasalahan Hukum Terkait Aset Daerah	Telaksananya Penyelesaian Permasalahan Hukum Terkait Asset							1 Dokumen	641,760	1 Dokumen	641,760	2 Dokume n	1.283,519	biro hukum & HAM	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Daerah														
Mewujudkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan administrasi dan kebijakan pemerintah	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan	1. Jumlah Tamu Pemerintah Daerah yang terlayani 2. Jumlah distribusi surat masuk dan keluar 3. Jumlah SPM yang diterbitkan 4. Jumlah persetujuan verifikasi dokumen pertanggungjawaban 5. Jumlah Inventarisasi Rencana Kebutuhan Barang (RKB).	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pencapaian Pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	n/a	8%	630	31%	1.899	54%	1.899	77%	1.150	100%	1.050	100%	6.628	Biro Umum
	2. Meningkatkan Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	6. Jumlah jasa service telepon, air dan Listrik. 7. Jumlah Acara / Event / Resepsi Jamuan Tamu 8. Jumlah	Dukungan Jasa Administrasi dan Pelayanan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Jasa Administrasi dan Pelayanan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 Paket	630	100 Paket	399	100 Paket	399	0	0	0	0	300 Paket	1.428	biro umum
	3. Meningkatkan Tertib Administrasi kebutuhan barang Sekretariat Daerah		Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersediannya Dokumen Penatausahaan Keuangan Pada Sekretariat daerah Provinsi Riau								3 Dokumen	1000	3 Dokumen	1100	6 dokumen	2.100	biro umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
	4. Meningkatkan Peran Protokol dan Persandian	Kawat Masuk / SANDI	Inventarisasi Data Aset Daerah	Tersedianya buku Inventaris Aset Sekretariat Daerah Provinsi Riau							9 buku	356,096	9 buku	300	18 buku	656,096	biro umum	
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	n/a	12%	12.600	33%	20.955	55%	22.605	78%	17.650	100%	17.750	100%	91.560	biro adm. Pemerintahan umum, biro umum
			Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Terwujudnya Koordinasi dan Pelayanan yang Baik terhadap Penerimaan Tamu Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi		150 Kunjungan	4.458	150 Kunjungan	4.000	150 Kunjungan	4.000	200 Kunjungan	2.500	200 Kunjungan	2.500	950 Kunjungan	17.458	biro umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kualitas Pelayanan Kesehatan Pimpinan		100%	1.300			100%	1.300	100%	1.300	100%	1.300	100%	5.200	biro umum
			Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Daerah	Jumlaha Kegiatan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Daerah		45 org x 12 Bulan	992	45 org x 12 Bulan	1.100	45 org x 12 Bulan	1.100	12 bulan	1.100	12 bulan	1.200	135 org x 12 Bulan ; 12 bulan	5.492	biro umum
			Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga, Organisasi Sosial Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga, Organisasi Sosial Masyarakat dan Pemerintah.		200 x Acara	3.000	200 x Acara	3.000	200 x Acara	3.000	0	0	0	0	600 x Acara	9.000	biro umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga, Organisasi Sosial Masyarakat dan Pemerintah	Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi kerjasama daerah dengan lembaga, organisasi sosial masyarakat dan pemerintah							0,98	1.300	0,98	1.300	0,98	2.600	biro umum	
			Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Lainnya		100%	0	80 Kunjungan	2.200	80 Kunjungan	2.200	80 Kunjungan	2.200	80 Kunjungan	2.200	320 Kunjung an	8.800	biro umum
			Pelayanan Kepada Tamu - tamu Pemerintah Daerah	Jumlah Pelayanan akomodasi dan transportasi terhadap tamu- tamu Pemerintah		100%	2.500	100 Kedatangan	2.750	100 Kedatangan	2.750	100 Kedatangan	2.750	100 Kedatangan	2.750	400 Kedatan gan	13.500	biro umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan.	Terwujudnya Pelayanan Terhadap Pimpinan Yang Baik dan Optimal				2 Paket	2.150	2 Paket	2.150		2.500		2.500	4 Paket ;	9.300	biro umum
			Fasilitasi Pelayanan Rumah Tangga Gubernur	Terpenuhinya semua kebutuhan sarana dan prasara rumah tangga Gubernur Riau				1 Paket	2.000	1 Paket	2.000	1 Tahun	1.200	1 Tahun	1.200	2 Paket ; 2 Tahun	6.400	biro umum
			Fasilitasi Pelayanan Rumah Tangga Wakil Gubernur	Terpenuhinya semua kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga wakil gubernur riau				1 Paket	1.500	1 Paket	1.500	1 Tahun	1.000	1 Tahun	1.000	2 Paket ; 2 Tahun	5.000	biro umum
			Optimalisasi Fungsi Peran Aparatur dalam melayani tamu Pemerintah Provinsi Riau.	Meningkatnya pelayanan terhadap pimpinan dan tamu VVIP dan VIP				100 kedatangan	825	100 kedatangan	825		950		950	200 keda-tang-an ;	3.550	biro umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Gubernur	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan untuk Gubernur				10 Kali Check Up	715	10 Kali Check Up	715	1 Tahun	250	1 Tahun	250	20 Kali Check Up ; 2 Tahun	1.930	biro umum
			Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Wakil Gubernur	Terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap pimpinan				10 Kali Check Up	715	10 Kali Check Up	715		250		250	20 Kali Check Up ;	1.930	biro umum
			Pelayanan Kepada Tamu-tamu Pemerintah Daerah.	Pelayanan akomodasi dan trasportasi terhadap tamu-tamu Pemerintah Daerah								0,98	2000	0,98	2000	0,98	4.000	biro umum
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	n/a	17%	53.345	38%	63.773	58%	64.647	79%	74.421	100%	75.461	100%	331.647	biro humas, biro adm. Kesra, biro umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Informasi yang disampaikan		1000 materei, 604 kg paket 576 kg paket dokumen	1.684	1000 MATERAI 604 kg paket 576 kg paket dokumen	1.100	1000 MATERAI 604 kg paket 576 kg paket dokumen	1.100		2.034, 581		2.134, 581		8.053	biro umum
			Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		7 jenis, 27 unit	2.300	7 Jenis 27 Unit,	2.200	7 Jenis 27 Unit,	2.200	1	2.000	1	200	21 Jenis 81 Unit ; 2	8.900	biro umum
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makan dan minum lingkup Sekretariat daerah		1 Rumah Tangga x 12 Bulan	7.500	1 Rumah Tangga x 12 Bulan	2.100	1 Rumah Tangga x 12 Bulan	2.100	1	2.000	1	2.000	3 Rumah Tangga x 12 Bulan ; 2	15.700	biro umum
			Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Tersedianyan pemeliharaan untuk pelayanan administrasi perkantoran		80%	1.650	80%	1.870	80%	1.870	50 unit	68,005	50 unit	680,049	80% ; 100 unit	6.138,054	biro umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Penyediaan Perlengkapan dan Kelengkapan Acara/Upacara dan Resepsi Pimpinan	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Acara /Upacara dan Resepsi Pimpinan		8 Jenis Cara besar	4.991	8 Jenis Cara besar	5.500	8 Jenis Cara besar	5.500	0	0	0	0	24 Jenis Cara besar	15.991	biro umum
			Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Kelengkapan Acara/Upacara dan Resepsi Pimpinan	Tersedianya perlengkapan dan kelengkapan acara/upacara dan resepsi pimpinan								1	3.997,200	1	4.500	2	8.497,200	biro umum
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik Setda Provinsi Riau		175 Rekening x 12 Bulan, 1 paket	10.144	175 Rekening x 12 Bulan, 1 paket	13.658	175 Rekening x 12 Bulan, 1 paket	13.658	175 rekening x 12 bulan	16.000	175 rekening x 12 bulan	16.000	875 Rekening x 12 Bulan, 3 paket	69.460	biro umum
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik gedung kantor Pemerintah Provinsi Riau								1	1200	1	1400	2	2.600	biro umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah		3275 Kunjungan	17.606	3275 Kunjungan	13.933	3275 Kunjungan	13.933	3640 kunjungan	16.859	3640 kunjungan	17.859	17105 Kunjung an	80.190	biro umum
			Penyediaan Makanan dan Minuman Gubernur Riau	Tersedianya Makan dan Minuman Gubernur		1 Rumah Tangga x 12 Bulan	1.500	1 Rumah Tangga x 12 Bulan	4.000	1 Rumah Tangga x 12 Bulan	4.000	1 Tahun	3.900	1 Tahun	3.900	3 Rumah Tangga x 12 Bulan ; 2 Tahun	17.300	biro umum
			Penyediaan Makanan dan Minuman Wakil Gubernur Riau	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Wakil Kepala Daerah		1 Rumah Tangga x 12 Bulan	1.000	1 Rumah Tangga x 12 Bulan	3.250	1 Rumah Tangga x 12 Bulan	3.250	100 paket	3.200	100 paket	3.200	3 Rumah Tangga x 12 Bulan ; 200 Paket	13.900	biro umum
			Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretaris Daerah	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Sekretaris Daerah								100 paket	0	100 paket	0	200 Paket	0	biro umum
			Perjalanan Dinas Gubernur	Perjalanan dinas kepala Daerah Provinsi Riau		6 bulan	1.000	1 Tahun	1.518	1 Tahun	1.518	1 Tahun	1.800	1 Tahun	1.800	4 Tahun 6 Bulan	7.636	biro umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Perjalanan Dinas Wakil Gubernur	Perjalanan dinas wakil kepala daerah Provinsi Riau		6 bulan	1.000	1 Tahun	1.518	1 Tahun	1.518	3640 kunjungan	1.800	3640 kunjungan	1.800	2 Tahun 6 Bulan ; 7280 kunjungan	7.636	biro umum
			Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah	Perjalanan dinas Sekretaris Daerah Provinsi Riau		6 bulan	1.000	1 Tahun	1.518	1 Tahun	1.518	3065 kunjungan	1.800	3065 kunjungan	1.800	2 Tahun 6 Bulan ; 6130 kunjungan	7.636	biro umum
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor milik pemerintah provinsi riau				14 Lokasi	2.272	14 Lokasi	2.272	1	6.000	1	6.000	28 Lokasi ; 2	16.544	biro umum
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor di sekretariat daerah				1 Paket	750	1 Paket	750	1 Paket	950	1 Paket	1150	4 Paket	3.600	biro umum
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kebutuhan sekretaris				1 Paket	1.281	1 Paket	1.281	1 Paket	1.100	1 Paket	1.100	4 Paket	4.762	biro umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				daerah provinsi riau														
			Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik Bangunan kantor.			1 Paket.	1.677	1 Paket.	1.677	1 Paket.	1.677	1 Paket.	1.677	4 Paket.	6.708	biro umum	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			7 Paket	1.895	7 Paket	1.895	1 Paket	3.500	1 Paket	3.500	16 Paket	10.790	biro umum	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Adanya peralatan rumah tangga berupa: peralatan kantor, meubeler, penghias ruangan rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga lainnya			6 Paket	1.500	6 Paket	1.500	1 Paket	1.500	1 Paket	1.500	24 Paket	6.000	biro umum	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Penyediaan jasa Sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Jumlah Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kearsipan Digital di Lingkungan Setda Prov Riau				1 System.	660	1 System.	660	1 System.	660	1 System.	660	1 System.	2.640	biro umum
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	n/a	15%	936	25%	678	50%	1.614	75%	1.549	100%	1.549	100%	6.326	biro organisasi, biro umum, biro adm. Kemasy.
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya dana bagi pns yang akan mengikuti diklat, pelatihan bimbingan teknis kursus atau workshop yang diselenggarakan		100%	0	80 PNS	165	80 PNS	165	150 orang	200	150 orang	200	460 PNS	730	biro umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				an oleh instansi penyelenggara baik didalam maupun diluar daerah														
			Optimalisasi Fungsi Peran Aparatur dalam melayani tamu Pemerintah Prov.Riau Se Provinsi Riau	Jumlah Pelayanan tamu Pemerintah Prov.Riau Se Provinsi Riau		1 tahun	736			1 tahun	736	1 tahun	736	1 tahun	736	4 tahun	2.944	biro umum
			Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan Digital	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Kearsipan Digital di Lingkungan Setda Prov. Riau				120 PNS	413	120 PNS	413	120 PNS	413	120 PNS	413	480 PNS	1.652	biro umum
			Peningkatan kinerja aparatur pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah								150 orang	823	150 orang	850	300 orang	1.673	biro umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Sinkronisasi Tugas dan Fungsi Keprotokolan	Terciptanya Tugas dan Fungsi Keperotokolan								273,600		250		523,600	biro umum	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana & prasarana aparatur	n/a	1%	2.070	25%	83.198	50%	85.435	75%	33.320	100%	33.169	100%	237.192	biro umum, biro organisasi
			Pengamanan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah	Peningkatan fasilitas pengamanan jaring komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau		1 tahun	534	1 Jaringan Prov 12 Jaringan Kab/ Kota	770	1 Jaringan Prov 12 Jaringan Kab/ Kota	770	1	751	1	600	4 Jaringan Prov 12 Jaringan Kab/ Kota	3.425	biro umum
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepegawaian Setda	Jumlah Terfasilitasinya sarana dan Prasarana PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah		1 tahun	346			1 tahun	346	1 tahun	346	1 tahun	346	4 tahun	1.384	biro umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Provinsi Riau														
			Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Jumlah Pelayanan Administrasi Keggawaian PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau		1 tahun	700			1 tahun	700	1 tahun	700	1 tahun	700	1 tahun	2.800	biro umum
			Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan Digital di Lingkungan Setda Prov.Riau	Jumlah Pelayanan Kearsipan Digital di Lingkungan Setda Prov.Riau		1 tahun	0			1 tahun	700	1 tahun	700	1 tahun	700	1 tahun	2.100	biro umum
			Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Kearsipan Digital di Lingkungan Setda Prov.Riau	Jumlah Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kearsipan Digital di Lingkungan Setda Prov.Riau		1 tahun	491			1 tahun	491	1 tahun	491	1 tahun	491	1 tahun	1.964	biro umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasion al	Tersedianya kendaraan dinas/operasi onal jenis micro bus, jeep, pick up				100%	50.305	100%	50.305	1	0	1	0	100% ; 2	100.610	biro umum
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan.	Terpeliharanya rumah jabatan pemerintah provinsi riau				2 lokasi	3.743	2 lokasi	3.743	3 lokasi	3.700	3 lokasi	3.700	10 lokasi	14.886	biro umum
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas.	Terpeliharanya rumah dinas provinsi riau				7 Lokasi	2.202	7 Lokasi	2.202	1	1.900	1	1.900	14 Lokasi ; 2	8.204	biro umum
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Terpeliharanya gedung kantor pemerintah provinsi riau				5 Lokasi	8.288	5 Lokasi	8.288	1	8.000	1	8.000	10 Lokasi ; 2	32.576	biro umum
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al.	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasi onal pemerintah provinsi riau				230 Unit	5.551	230 Unit	5.551	1	3.500	1	3.500	460 Unit ; 2	18.102	biro umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan.	Terpeliharanya kendaraan jabatan pemerintah provinsi riau				45 Unit	1.347	45 Unit	1.347	1	1.300	1	1.300	90 Unit ; 2	5.294	biro umum
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Terpeliharanya peralatan kantor				8 Lokasi, 12 tempat, 9 lokasi, 1 lokasi	8.561	8 Lokasi, 12 tempat, 9 lokasi, 1 lokasi	8.561	1	9.500	1	9.500	16 Lokasi, 24 tempat, 18 lokasi, 2 lokasi ; 2	36.122	biro umum
			Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Rumah Dinas Jabatan Asisten II	Tersedianya Peggadaan AC, Pembuatan Gordyn, Pembuatan landscape, Pengadaan Lampu Hias dan bola lampu, Pemasangan kaca putih pada lubang peri-peri dan pengadaan sound				8 Unit, 4 paket, 1 set	150	8 Unit, 4 paket, 1 set	150	8 Unit, 4 paket, 1 set	150	8 Unit, 4 paket, 1 set	150	32 Unit, 16 paket, 4 set	600	biro umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				audio/studio pada Rumah Dinas Jabatan Asisten II Setda Provinsi Riau														
			Pengadaan Alat Drum Band	Tersedianya Pengadaan Alat Drum Band				1 Paket	300	1 Paket	300	1 Paket	300	1 Paket	300	4 Paket	1.200	biro umum
			Pengadaan Alat Drum Band dan Pakaian	Tersedianya Pengadaan Alat Drum Band dan Pakaian				1 Paket	970	1 Paket	970	1 Paket	970	1 Paket	970	4 Paket	3.880	biro umum
			Pengadaan AC Rumah Dinas Jabatan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Riau	Tersedianya AC Rumah Dinas Jabatan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Riau				8 Unit	72	8 Unit	72	8 Unit	72	8 Unit	72	32 Unit	288	biro umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pembangunan Gordyn Rumah Dinas Jabatan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Riau	Tersedianya Gordyn Rumah Dinas Jabatan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Riau				100%	150	100%	150	100%	150	100%	150	100%	600	biro umum
			Pembuatan Landscape Rumah Dinas Jabatan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Riau	Tersedianya Landscape Rumah Dinas Jabatan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Riau				100%	90	100%	90	100%	90	100%	90	100%	360	biro umum
			Pengadaan Lampu Hias dan Bola Lampu Rumah Dinas Jabatan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Tersedianya Lampu Hias dan Bola Lampu Rumah Dinas Jabatan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan				100%	75	100%	75	100%	75	100%	75	100%	300	biro umum

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Sekda Provinsi Riau	Sekda Provinsi Riau														
			Pemasangan Kaca Putih pada Lubang Peri-peri Rumah Dinas Jabatan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Riau	Tersedianya Kaca Putih pada Lubang Peri-peri Rumah Dinas Jabatan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Riau			100%	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%	60	biro umum	
			Pengadaan Sound Audio/studio Rumah Dinas Jabatan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Riau	Tersedianya Sound Audio/studio Rumah Dinas Jabatan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Riau			1 Set	110	1 Set	110	1 Set	110	1 Set	110	4 Set	440	biro umum	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			PROGRAM PELAYANAN UMUM	persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum	n/a	31%	4.285	31%	0	54%	3.201	77%	3.202	100%	3.202	100%	13.890	biro umum
			Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Jumlah Kualitas Pelayanan terhadap Pimpinan		100%	1.601			100%	1.601	100%	1.601	100%	1.601	100%	6.404	biro umum
			Fasilitasi Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Jumlah Kebutuhan sarana dan Prasarana Rumah Tangga Pimpinan		100%	2.684			100%	1.601	100%	1.601	100%	1.601	100%	7.487	biro umum
			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan disiplin aparatur	n/a	0%	0	25%	2.258	50%	2.258	75%	1.639	100%	1.716	100%	7.871	biro umum, biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu				1655 stel	1.400	1655 stel	1.400	1	1.016,400	1	1.016,400	6620 stel	4.832,800	biro umum
			Pengadaan Pakaian Dinas Gubernur	Pakaian Dinas Gubernur Beserta Kelengkapannya				100%	429	100%	429	1 tahun	311,268	1 tahun	350	100% ; 2 tahun	1519,268	biro umum
			Pengadaan Pakaian Dinas Wakil Gubernur	Pakaian dinas wakil gubernur beserta kelengkapannya				100%	429	100%	429	1 tahun	311,268	1 tahun	350	100% ; 2 tahun	1.519,268	biro umum
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah 2. Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	1. Prosentase SKPD yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran 2. Jumlah SKPD yang dilakukan Pembinaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pembuatan Data Base Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Riau	 Tersedianya data base Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Riau	 	 	 	 	 	 	 	100% 1 Dokumen	260 110	100% 1 Dokumen	301 121	100% 1 Dokumen	561 231	biro organisasi biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
	3. Penguatan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 4. Meningkatkan Pemantapan Road Map Reformasi Birokrasi	3. Jumlah Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah							100%	150	100%	180	100%	330	biro organisasi	
		4. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun dan diterapkan oleh SKPD Provinsi Secara Efektive	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									100%	939	100%	1015	100%	1954	biro umum, biro organisasi
		5. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun dan diterapkan oleh SKPD Kab/Kota Secara Efektive	Penataan Sistem Administrasi Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat PNS Otomatis	Persentase Penataan Sistem Administrasi Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat PNS Otomatis								100%	115	100%	135	100%	250	biro organisasi
		6. Jumlah Naskah Dinas Elektronik yang diterapkan	Pengadaan Atribut PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah	Jumlah Pengadaan Atribut PNS di lingkungan Sekretariat Daerah								632 Aparatur	105	632 Aparatur	125	632 Aparatur	230	biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
		oleh SKPD Provinsi 7. Jumlah Naskah Dinas Elektronik yang diterapkan oleh SKPD Kab/ Kota 8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang oleh SKPD Provinsi 9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang oleh SKPD Kab/Kota 10. Jumlah SKPD Provinsi yang Punya Kepatuhan Predikat yang Tinggi Terhadap SPP yang diterapkan	Pemeliharaan Sarana Absensi Elektronik PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase Pemeliharaan sarana Absensi Elektronik PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah							100%	45	100%	55	100%	100	biro organisasi	
	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur		Jumlah PNS Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau							632 Aparatur	674	632 Aparatur	700	632 Aparatur	1.374	biro organisasi		
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																biro organisasi	
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja		Peningkatan Nilai AKIP Pemerintah								B	320	B	352	B	672	biro organisasi	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
		oleh SKPD Provinsi 11. Jumlah SKPD Kab/Kota yang Punya Kepatuhan Predikat yang Tinggi Terhadap SPP yang diterapkan oleh SKPD Kab/Kota 12. Jumlah Analisis Jabatan ANJAB yang disusun oleh SKPD Provinsi 13. Nilai AKIP 14. Pengembangan Management Kinerja Organisasi 15. Jumlah SKPD yang melaksanakan 8 area perubahan	Pemerintah Provinsi Riau	Provinsi Riau														
	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Kinerja (LK)		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PENJA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Kinerja (LK) SETDA								3 Dokumen	100	3 Dokumen	110	3 Dokumen	210	biro organisasi	
	Pengukuran Kinerja SKPD		Jumlah Aparatur Pengukuran Kinerja SKPD								153 Aparatur	150	153 Aparatur	165	153 Aparatur	315	biro organisasi	
	Pembinaan Penerapan Manajemen Kinerja Se-Provinsi Riau		Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan penerapan manajemen kinerja SKPD se Provinsi Riau								12 Kab/Kota	150	12 Kab/Kota	165	12 Kab/Kota	315	biro organisasi	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Review Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Jumlah SKPD yang terbina							51 SKPD	80	51 SKPD	88	51 SKPD	168	biro organisasi	
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan aparatur	n/a	11%	2.649	31%	4.703	54%	5.503	76%	4.369	100%	5.293	100%	22.517	biro organisasi
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2014	Jumlah Dokumen yang tersusun dilingkungan Setda Provinsi Riau				1 Dokumen	500	1 Dokumen	525	1 Dokumen	550	1 Dokumen	575	4 Dokumen	2.150	biro organisasi
			Rapat Koordinasi Kelembagaan Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Terciptanya Kesamaan Visi, Misi dan Persepsi Terkait Dengan Kelembagaan dan Organisasi		65 Aparatur 12 Kab/Kota Dan Provinsi	230	65 Aparatur 12 Kab/Kota Dan Provinsi	250	65 Aparatur 12 Kab/Kota Dan Provinsi	250	0	0	0	0	195 Aparatur 12 Kab/Kota Dan Provinsi	730	biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota Se-Provinsi Riau	Terlaksananya kelembagaan OPD Kab/Kota Yang Efisien, Efektif, Rasional dan Proporsional		40 Aparatur 4 Kab/kota	200	12 Kab/ Kota	250	12 Kab/ Kota	250	12 Kab/ Kota	250	12 Kab/ Kota	250	48 Kab/ Kota	1.200	biro organisasi
			Penataan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Provinsi Riau	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Yang Sesuai Kebutuhan		77 UPT	150	0%	0	77 UPT	150	0%	0	77 UPT	150	77 UPT	450	biro organisasi
			Analisis dan Penyempurnaan Uraian Tugas SKPD Provinsi Riau	Adanya Uraian Tugas Yang Mendukung Pelaksanaan Tupoksi Bagi Aparatur di Lingkungan Pemprov Riau		47 SKPD	150	0%	0	47 SKPD	150	0%	0	47 SKPD	150	47 SKPD	450	biro organisasi
			Penyusunan 9 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau	Tersedianya Dokumen 9 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah		1 Dokumen	400			1 Dokumen	400	1 Dokumen	400	1 Dokumen	400	3 Dokume n	1.600	biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Provinsi Riau														
			Fasilitasi Pembinaan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Aparatur Dalam Pembinaan Standar Operasional Prosedur		50 Aparatur	100	50 Aparatur	150	50 Aparatur	200	50 Aparatur	200	50 Aparatur	200	250 Aparatur	850	biro organisasi
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pencapaian Pelaksanaan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	n/a	2%	800	25%	8.450	50%	9.150	75%	7.142	100%	7.830	100%	33.372	biro organisasi
			Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab/Kota Se Provinsi Riau	Terlaksananya pembinaan dan Monev OPD Kab/ Kota		12 Kab/ Kota	150			12 Kab/ Kota	150	12 Kab/ Kota	150	12 Kab/ Kota	150	12 Kab/ Kota	600	biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	n/a	15%	936	25%	678	50%	1.614	75%	1.549	100%	1.549	100%	6.326	biro organisasi
			Bimtek 5 Pilar Ketatalaksanaan se Provinsi Riau	Peningkatan Pengetahuan Aparatur dalam 5 Pilar ketatalaksanaan Kab/ Kota Se Provinsi Riau		12 Aparatur Kab/ Kota 47 Aparatur Prov. Riau	200			12 Aparatur Kab/ Kota 47 Aparatur Prov. Riau	200	12 Aparatur Kab/ Kota 47 Aparatur Prov. Riau	200	12 Aparatur Kab/ Kota 47 Aparatur Prov. Riau	200	48 Aparatur Kab/ Kota 188 Aparatur Prov. Riau	800	biro organisasi
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	n/a	13%	874	30%	1.150	49%	1.300	80%	2.100	100%	1.350	100%	6.774	biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	Tersusunnya Renstra Setda Provinsi Riau Tahun 2014-2018		1 Dokumen	100					1 Dokumen	250			2 Dokumen	350	biro organisasi
			Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)	Jumlah Dokumen Penetapan LAKIP Setda Provinsi Riau dan Penetapan Kinerja (PENJA) dan RKT Setda Provinsi Riau		3 Dokumen	174	3 Dokumen	300	3 Dokumen	350	3 Dokumen	400	3 Dokumen	400	15 Dokumen	1.624	biro organisasi
			Penyusunan IKU Sekretariat Daerah 2014-2018	Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda Provinsi Riau Tahun 2014-2018		1 Dokumen dan Pergub	150					1 Dokumen dan Pergub	150			2 Dokumen dan Pergub	300	biro organisasi
			Koordinasi dan sinkronisasi Program dan kegiatan Bidang Tatalaksana	Peningkatan Program Dan Kegiatan Bidang Tatalaksana		24 Aparatur Kab/ Kota 6 Aparatur Provinsi	100			24 Aparatur Kab/ Kota 6 Aparatur Provinsi	100	24 Aparatur Kab/ Kota 6 Aparatur Provinsi	100	24 Aparatur Kab/ Kota 6 Aparatur Provinsi	100	96 Aparatur Kab/ Kota 24 Aparatur	400	biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota											Provinsi			
			Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Riau	Tersusunnya indikator kinerja utama (IKU) Provinsi Riau		1 Dokumen dan Pergub	350					1 Dokumen dan Pergub	350			2 Dokumen dan Pergub	700	biro organisasi
			Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Aparatur dalam Peningkatan Pengukuran Kinerja				100 Aparatur	500	100 Aparatur	500	100 Aparatur	500	100 Aparatur	500	100 Aparatur	2.000	biro organisasi
			Rapat Koordinasi Pada setiap SKPD	Jumlah Biro dalm fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepegawaian SETDA				9 Biro	350	9 Biro	350	9 Biro	350	9 Biro	350	36 Biro	1.400	biro organisasi
			PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan penataan peraturan perundang-	n/a	13%	4.570	35%	7.625	57%	7.535	78%	4.718	100%	5.740	100%	30.188	biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				undangan														
			Validasi target pencapaian dan Integrasi SPM Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Validasi target pencapaian dan Integrasi SPM Provinsi Riau				1 Dokumen	750							750	biro organisasi	
			Fasilitasi Pembinaan Unit Pelayanan Publik se Provinsi Riau	Jumlah Aparatur yang dilakukan Pembinaan Unit Pelayanan Publik se Provinsi Riau				100 Aparatur	500							500	biro organisasi	
			Rakor Pelayanan Publik	Jumlah Aparatur yang mengikuti Rakor Pelayanan Publik				100 Aparatur	250							250	biro organisasi	
			PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN, TATALAKSANA	persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan	n/a	25%	950	25%	0	50%	950	75%	950	100%	950	100%	3.800	biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			DAN PELAYANAN PUBLIK	penataan kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik														
			Workshop Penyusunan Standar Pelayanan Publik Kab/ Kota Se Provinsi Riau	Jumlah Aparatur yang mampu menyusun Standar Pelayanan Publik Kabupaten/ Kota Se Provinsi Riau		24 Aparatur Kab/ Kota	150			24 Aparatur Kab/ Kota	150	24 Aparatur Kab/ Kota	150	24 Aparatur Kab/ Kota	150	96 Aparatur Kab/ Kota	600	biro organisasi
			Workshop Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah aparatur yang mampu menyusun standar pelayanan minimal dilingkungan pemerintah provinsi Riau		47 Aparatur Provinsi Riau	150			47 Aparatur Provinsi Riau	150	47 Aparatur Provinsi Riau	150	47 Aparatur Provinsi Riau	150	188 Aparatur Provinsi Riau	600	biro organisasi
			Validasi Target Pencapaian dan Integrasi Standar	Jumlah aparatur validasi target		204 Aparatur Kab/Kota,	650			204 Aparatur Kab/Kota,	650	204 Aparatur Kab/Kota,	650	204 Aparatur Kab/Kota,	650	816 Aparatur Kab/Kota	2.600	biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Riau	pencapaian dan integrasi SPM Provinsi Riau		20 SKPD Provinsi			20 SKPD Provinsi		20 SKPD Provinsi		20 SKPD Provinsi		, 20 SKPD Provinsi			
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana & prasarana aparatur	n/a	1%	2.070	25%	83.198	50%	85.435	75%	33.320	100%	33.169	100%	237.192	biro organisasi
			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Dokumen administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah				25 Dokumen	500	25 Dokumen	500	25 Dokumen	500	25 Dokumen	500	100 Dokumen	2.000	biro organisasi
			PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN	persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan	n/a	0%	0	25%	2.750	50%	2.750	75%	2.650	100%	2.665	100%	10.815	biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Fasilitasi Pembinaan Anjab se Provinsi Riau	Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan anjab				51 SKPD	550	51 SKPD	550	51 SKPD	550	51 SKPD	550	51 SKPD	2.200	biro organisasi
			Workshop Standar Kompetensi jabatan Provinsi	Jumlah Aparatur Workshop Standar Kompetensi jabatan Provinsi				100 Aparatur	550	100 Aparatur	550	100 Aparatur	550	100 Aparatur	550	400 Aparatur	2.200	biro organisasi
			Workshop Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Formasi Jabatan dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai	Jumlah Aparatur yang mengikuti workshop Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Formasi Jabatan dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai				100 Aparatur	450	100 Aparatur	450	100 Aparatur	450	100 Aparatur	450	400 Aparatur	1.800	biro organisasi
			Fasilitasi Pembinaan Analisis Beban Kerja, Peta	Jumlah SKPD yang dilakukan Pembinaan				51 SKPD	450	51 SKPD	450	51 SKPD	450	51 SKPD	450	51 SKPD	1.800	biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Jabatan, Formasi Jabatan dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai	Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Formasi Jabatan dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai														
			Rapat Koordinasi Kelembagaan Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Jumlah Aparatur pada Rapat Koordinasi Kelembagaan Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Riau				63 Aparatur 12 Kab/Kota Dan Provinsi	250	63 Aparatur 12 Kab/Kota Dan Provinsi	250		150		165		815	biro organisasi
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota Se-Propinsi Riau	Jumlah SKPD dalam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota Se-Propinsi Riau				12 Kab/ Kota	250	12 Kab/ Kota	250	12 Kab/ Kota	250	12 Kab/ Kota	250	12 Kab/ Kota	1.000	biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab/Kota Se Provinsi Riau	Jumlah Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)				12 Kabupaten/ Kota	250	12 Kabupaten/ Kota	250	12 Kabupaten/ Kota	250	12 Kabupaten/ Kota	250	12 Kabupat en/Kota	1.000	biro organisasi
			Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pembentukan Organisasi	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mengikuti Pembinaan Pemerintah Kab./Kota dalam Pembentukan Organisasi								12 Kabupaten/ Kota	150	12 Kabupaten/ Kota	165	12 Kabupat en/Kota	315	biro organisasi
			Pembinaan Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Formasi Jabatan dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai di Lingkungan	Jumlah SKPD dalam Pembinaan Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Formasi Jabatan dan Proyeksi								51 SKPD	150	51 SKPD	165	51 SKPD	315	biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pemerintah Provinsi Riau	Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemprov. Riau														
			Penyusunan Uraian Tugas SKPD dan UPT	Jumlah Dokumen Uraiaan Tugas SKPD dan UPT							1 Draft Pergub SKPD dan UPT	150	1 Draft Pergub SKPD dan UPT	165	1 Draft Pergub SKPD dan UPT	315	biro organisasi	
			Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota							12 Kabupaten/ Kota	150	12 Kabupaten/ Kota	165	12 Kabupat en/Kota	315	biro organisasi	
			Pembinaan Evaluasi Jabatan Se- Provinsi Riau	Jumlah SKPD Mengikuti Pembinaan Evaluasi Jabatan se Provinsi Riau							51 SKPD	150	51 SKPD	165	51 SKPD	315	biro organisasi	
			Pembinaan Standar Kompetensi Jabatan Se-									150		165		315	biro organisasi	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Provinsi Riau															
			Dukungan Koordinasi dan Fasilitasi Program Kerja Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	Jumlah Koordinasi dalam rangka mengikuti Program KerjaForum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)								100		110		210	biro organisasi	
			PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN	persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan penataan ketatalaksanaan	n/a	0%	0	25%	2.900	47%	2.550	75%	2.700	100%	2.850	100%	11.000	biro organisasi
			Peningkatan Penunjang Naskah Dinas Elektronik Biro Organisasi	Sistem Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Biro Organisasi				1 Sistem	500			0	0	0	0	2 Sistem	500	biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Fasilitasi Pembinaan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kota	Jumlah SKPD yang dilakukan Pembinaan Tata Naskah Dinas			51 SKPD Dan 12 Kab/ Kota	0	51 SKPD Dan 12 Kab/ Kota	450	51 SKPD Dan 12 Kab/ Kota	450	51 SKPD Dan 12 Kab/ Kota	450	51 SKPD Dan 12 Kab/ Kota	1.350	biro organisasi	
			Fasilitasi Pembinaan SOP Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur yang dilakukan Pembinaan SOP			2 Aparatur/ 12 Kab/ Kota	400	2 Aparatur/ 12 Kab/ Kota	450	2 Aparatur/ 12 Kab/ Kota	500	2 Aparatur/ 12 Kab/ Kota	550	8 Aparatur / 12 Kab/ Kota	1.900	biro organisasi	
			Standarisasi Peralatan kantor dan Pakaian dinas PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Standarisasi Peralatan kantor dan Pakaian dinas PNS			1 Dokumen	250	1 Dokumen	300	1 Dokumen	350	1 Dokumen	400	4 Dokume n	1.300	biro organisasi	
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro dilingkungan Sekretariat			1 Dokumen	500	1 Dokumen	500	1 Dokumen	500	1 Dokumen	500	4 Dokume n	2.000	biro organisasi	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Riau Tahun 2015	Daerah														
			Koordinasi dan sinkronisasi Program dan kegiatan Bidang Organisasi dan Tatalaksana	Jumlah Aparatur dalam Koordinasi dan sinkronisasi Program dan kegiatan Bidang Organisasi dan Tatalaksana				2 Aparatur/ 12 Kab/ Kota	500	2 Aparatur/ 12 Kab/ Kota	500	2 Aparatur/ 12 Kab/ Kota	500	2 Aparatur/ 12 Kab/ Kota	500	8 Aparatur / 12 Kab/ Kota	2.000	biro organisasi
			Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaa n Biro Organisasi				10 Dokumen	300	10 Dokumen	350	10 Dokumen	400	10 Dokumen	450	10 Dokume n	1.500	biro organisasi
			PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA															

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Peningkatan Penunjang Naskah Dinas Elektronik Biro Organisasi	Terlaksananya Sistem Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Biro Organisasi							1 Aplikasi	80	1 Aplikasi	82	Aplikasi	162	biro organisasi	
			Penyusunan SOP SKPD Provinsi Riau	Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang akan disusun/disesuaikan SOP-nya							5 SKPD Asistensi	200	5 SKPD Asistensi	220	5 SKPD Asistensi	420	biro organisasi	
			Pengembangan SOP Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Jumlah Pengembangan SOP Setda Provinsi Riau							9 Biro	150	9 Biro	165	9 Biro	315	biro organisasi	
			Penyusunan Standarisasi Harga dan Honorarium Untuk Keperluan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Standarisasi Harga dan Honorarium							1 Dokumen	380	1 Dokumen	418	1 Dokumen	798	biro organisasi	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pembinaan Pola Hubungan Kerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pembinaan Pola Hubungan Kerja SKPD							100 Aparatur	150	100 Aparatur	165	100 Aparatur	315	biro organisasi	
			PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi	n/a	0%	0	25%	2.000	50%	2.000	75%	2.000	100%	2.000	100%	8.000	biro organisasi
			Fasilitasi Pengembangan Budaya Kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah provinsi riau	Jumlah SKPD yang dilakukan Fasilitasi Pengembangan Budaya Kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah provinsi riau				51 SKPD	500	51 SKPD	500	51 SKPD	500	51 SKPD	500	51 SKPD	2.000	biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Peningkatan capacity Building Aparatur Biro Organisasi	Jumlah Aparatur dalam Peningkatan capacity Building				2 Apartur/ 12 Kab/ Kota	500	2 Apartur/ 12 Kab/ Kota	500	2 Apartur/ 12 Kab/ Kota	500	2 Apartur/ 12 Kab/ Kota	500	8 Apartur/ 12 Kab/ Kota	2.000	biro organisasi
			Workshop Reformasi Birokrasi Se- Provinsi Riau	Jumlah Aparatur yang mengikuti Workshop Reformasi Birokrasi Se- Provinsi Riau				100 Aparatur	350	100 Aparatur	350	100 Aparatur	350	100 Aparatur	350	400 Aparatur	1.400	biro organisasi
			Fasilitasi Pembinaan Reformasi Birokrasi Se- Provinsi Riau	Jumlah Aparatur dalam Pembinaan Reformasi Birokrasi Kab/ Kota Se- Provinsi Riau				12 Kab/ Kota	400	12 Kab/ Kota	400	12 Kab/ Kota	400	12 Kab/ Kota	400	12 Kab/ Kota	1.600	biro organisasi
			Rakor Pemantapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi	Jumlah Aparatur pada rakor Pemantapan Area Perubahan Reformasi				100 Aparatur	250	100 Aparatur	250	100 Aparatur	250	100 Aparatur	250	100 Aparatur	1.000	biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Birokrasi														
			Pengembangan Budaya Kerja Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah SKPD dalam Pengembangan Budaya Kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah provinsi riau								51 SKPD	150	51 SKPD	165	51 SKPD	315	biro organisasi
			Pembinaan Reformasi Birorasi Se- Provinsi Riau	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pembinaan Reformasi Birokrasi Se Provinsi Riau								102 Aparatur Provinsi Riau	150	102 Aparatur Provinsi Riau	165	102 Aparatur Provinsi Riau	315	biro organisasi
			Workshop Pembentukan Gusus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Se-	Jumlah Aparatur yang mengikuti Workshop pembentukan gugus tugas gerakan nasional								150 Aparatur	150	150 Aparatur	165	150 Aparatur	315	biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Provinsi Riau	revolusi mental (GNRM) se Provinsi Riau														
			Penyusunan Quik Wins Revolusi Mental	Dokumen quick win yang tersusun							1 Dokumen	100	1 Dokumen	110	1 Dokumen	210	biro organisasi	
			PROGRAM PELAYANAN PUBLIK	persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi	n/a	0%	0	0%	0	30%	1.500	63%	1.950	100%	2.350	100%	5.800	biro organisasi
			Validasi target pencapaian dan Integrasi SPM Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Validasi target pencapaian dan Integrasi SPM Provinsi Riau						1 Dokumen	750	1 Dokumen	850	1 Dokumen	900	3 Dokumen	2.500	biro organisasi
			Fasilitasi Pembinaan Unit Pelayanan Publik se Provinsi Riau	Jumlah Aparatur yang dilakukan Pembinaan Unit Pelayanan Publik se						100 Aparatur	500	100 Aparatur	550	100 Aparatur	600	300 Aparatur	1.650	biro organisasi

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Provinsi Riau														
			Rakor Pelayanan Publik	Jumlah Aparatur yang mengikuti Rakor Pelayanan Publik					100 Aparatur	250	100 Aparatur	300	100 Aparatur	350	300 Aparatur	900	biro organisasi	
			Fasilitasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dinilai					15 UPP	250	15 UPP	250	21 UPP	500	51 Unit	1.000	biro organisasi	
			Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik Kabupaten / Kota se Provinsi Riau	Jumlah Kab-Kota yang dilakukan pembinaan Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik Kabupaten/Kota se Provinsi Riau							12 Kab/Kota	132,805	12 Kab/Kota	146,086	12 Kab/Kota	279	biro organisasi	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Se- Provinsi Riau	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)							75 Aparatur	400	75 Aparatur	440	75 Aparatur	840	biro organisasi	
			Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Se- Provinsi Riau	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan Inovasi Pelayanan Publik							110 Aparatur se Provinsi Riau	200	110 Aparatur se Provinsi Riau	220	110 Aparatur se Provinsi Riau	420	biro organisasi	
			Pembinaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (SPP) SKPD Se- Provinsi Riau	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pembinaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (SPP) SKPD Provinsi Riau & Kab/ Kota se Provinsi Riau							80 Aparatur se Provinsi Riau	200	80 Aparatur se Provinsi Riau	220	80 Aparatur se Provinsi Riau	420	biro organisasi	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Penataan Sistem Aplikasi Pengaduan Pelayanan Publik	Jumlah Sistem Aplikasi Pengaduan Pelayanan Publik							1 Sistem	150	1 Sistem	165	1 Sistem	315	biro organisasi	
Mewujudkan Kebijakan Pemerintah terkait kemasyarakatan	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kesatuan bangsa dan politik	1. Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Kesatuan bangsa dan politik	PROGRAM OPTIMALISASI KERJASAMA PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIA N DENGAN MEWUJUDKAN KERJASAMA YANG BAIK ANTARA PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH PUSAT, SWASTA DAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan optimalisasi kerjasama pembangunan bidang perekonomian dengan mewujudkan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta dan masyarakat	n/a	8%	1.250	25%	2.530	50%	3.780	75%	3.780	100%	3.780	100%	15.120	biro adm. Kemasy.
	2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran Pemuda dan Olahraga	2. Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Kepemudaan																
	3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam Pemberda	3. Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Pemberdayaan Masyarakat.	Pembelian 1 Unit Mobil Operasional Untuk Sanggar	Tersedianya 1 Unit Mobil Operasional Untuk Sanggar				1 Unit	200	1 Unit	200	1 Unit	200	1 Unit	200	4 Unit	800	biro adm. Kemasy

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
	Masyarakat dan Komunitas Adat		Tuah Pesisir Kec Dumai Barat Jl. Batu Bintang Kota Dumai	Tuah Pesisir Kec Dumai Barat Jl. Batu Bintang Kota Dumai														
		Pengadaan 1 Unit Mobil Operasional Untuk Sanggar Serumpun Serai Kecamatan Medang Kampai Jl Dualim II Kota Dumai	Tersedianya 1 Unit Mobil Operasional Untuk Sanggar Serumpun Serai Kecamatan Medang Kampai Jl Dualim II Kota Dumai				1 Unit	200	1 Unit	200	1 Unit	200	1 Unit	200	4 Unit	800	biro adm. Kemasy	
		Pengadaan 1 Unit Mobil Operasional Untuk Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) Bestari Man Jl. Subang Banglas Selat Panjang Kab. Kep. Meranti	Tersedianya 1 Unit Mobil Operasional Untuk Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) Bestari Man Jl. Subang Banglas Selat Panjang Kab. Kep. Meranti				1 Unit	200	1 Unit	200	1 Unit	200	1 Unit	200	4 Unit	800	biro adm. Kemasy	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pengadaan 1 Unit Bus 24 Set (colt diesel) Pondok Pesantren Nurussalam Dumai (Yayasan Haji Abdul Hamid Riau) Jl. Panglima Jambul Kel. Tanjung Palas, Dumai	Tersedianya 1 Unit Bus 24 Set (colt diesel) Pondok Pesantren Nurussalam Dumai (Yayasan Haji Abdul Hamid Riau) Jl. Panglima Jambul Kel. Tanjung Palas, Dumai				1 Unit	830	1 Unit	830	1 Unit	830	1 Unit	830	4 Unit	3.320	biro adm. Kemasy
			Pengadaan Tenda dan Kursi Sanggar Salsabila Pekanbaru	Tersedianya Tenda dan Kursi Sanggar Salsabila Pekanbaru				1 pkt	200	1 pkt	200	1 pkt	200	1 pkt	200	4 pkt	800	biro adm. Kemasy
			Mobil Operasional Search And Rescue (SAR) Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam Riau)	Mobil Operasional Search And Rescue (SAR) Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam Riau)				1 Unit	350	1 Unit	350	1 Unit	350	1 Unit	350	4 Unit	1.400	biro adm. Kemasy

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Riau)														
			Pengadaan Ambulance Persatuan Kematian Masjid Nurulk Ikhsan RT. 03 RW 16 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru	Pengadaan Ambulance Persatuan Kematian Masjid Nurulk Ikhsan RT. 03 RW 16 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru			1 Unit	350	1 Unit	350	1 Unit	350	1 Unit	350	4 Unit	1.400	biro adm. Kemasy	
			Pengadaan Alat Sablon atau Advertising Yayasan Al Jabbar Riau	Tersedianya Alat Sablon atau Advertising Yayasan Al Jabbar Riau			100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	800	biro adm. Kemasy	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	n/a	15%	936	25%	678	50%	1.614	75%	1.549	100%	1.549	100%	6.326	biro organisasi, biro umum, biro adm. Kemasy.

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan SDM Biro Administrasi Kemasyarakat an				25 Orang	100	25 Orang	100	0	0	0	0	50 Orang	200	biro adm. Kemasy
			Peningkatan Capacity Building Aparatur Biro Administrasi Kemasyarakatan	Terselenggara nya In-house training dan Outbond Biro Administrasi Kemasyarakat an di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau								1	0	1	250	2	250	biro adm. Kemasy
			PROGRAM PEMBERDAYAA N FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAA N SOSIAL (PMKS)	persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan pemberdayaa n fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan	n/a	0%	0	25%	750	50%	750	75%	900	100%	1150	100%	3.550	biro adm. Kemasy

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			LAINNYA	sosial lainnya														
			Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat	Terlaksananya Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat			12 Kab./Kota	100	12 Kab./Kota	100	0	0	0	0	12 Kab./Kota	200	biro adm. Kemasy	
			Koordinasi dan Sikronisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat	Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Riau							1 Dokumen	250	1 Dokumen	200	2 Dokumen	450	biro adm. Kemasy	
			Komparasi Komunitas Adat Terpencil Provinsi Riau	Terlaksananya Kegiatan Komparasi Komunitas Adat Terpencil							1 Dokumen	0	1 Dokumen	200	2 Dokumen	200	biro adm. Kemasy	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Provinsi Riau														
			Penyusunan Kebijakan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat	Tersedianya Bahan penyusunan Kebijakan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat			1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	1 Dokumen	150	1 Dokumen	200	4 Dokumen	750	biro adm. Kemasy	
			Inventarisasi Komunitas Adat Terpencil pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Terdatanya Komunitas Adat Terpencil pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau			12 Kab./Kota	150	12 Kab./Kota	150	12 Kab./Kota	150	12 Kab./Kota	150	12 Kab./Kota	600	biro adm. Kemasy	
			Kajian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan di Provinsi Riau	Tersedianya Dokumen Kajian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan di Provinsi Riau			1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	0	0	0	0	2 Dokumen	400	biro adm. Kemasy	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Kajian Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan di Provinsi Riau	Tersusunnya Rancangan Kajian Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan							1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	2 Dokumen	400	biro adm. Kemasy	
			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat	Tersedinya Data Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil			12 Kab./Kota	100	12 Kab./Kota	100	1 Dokumen	150	1 Dokumen	200	12 Kab./Kota ; 2 Dokumen	550	biro adm. Kemasy	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	n/a	0%	0	25%	600	50%	600	75%	1110	100%	1080	100%	3.390	biro adm. Kemasy
			Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemuda dan Olahraga	Terlaksananya Koordinasi Bidang pemuda dan Olahraga			12 Kab./Kota	100	12 Kab./Kota	100	1 Dokumen	0	1 Dokumen	200	12 Kab./Kota ; 2 Dokumen	400	biro adm. Kemasy	

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Penyusunan Kebijakan Umum Bidang Pemuda dan Olahraga	Tersedianya Dokumen kebijakan Umum Bidang Pemuda dan Olahraga				1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	4 Dokumen	800	biro adm. Kemasy
			Penyusunan Kebijakan Umum Bidang Olahraga	Tersedianya Bahan Penyusunan kebijakan Umum Bidang Pemuda dan Olahraga								1 Dokumen	760	1 Dokumen	280	2 Dokumen	1.040	biro adm. Kemasy
			Kajian dan Pengembangan Wawasan tentang Kewirausahaan Pemuda di Provinsi Riau	Terlaksananya Kewirausahaan Pemuda di Prov Riau				1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	1 Dokumen	0	1 Dokumen	200	4 Dokumen	600	biro adm. Kemasy
			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga	Tersedianya data Bidang Pemuda dan Olahraga				12 Kab./Kota	100	12 Kab./Kota	100	1 Dokumen	150	1 Dokumen	200	12 Kab./Kota ; 2 Dokumen	550	biro adm. Kemasy

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pelayanan Ketatausahaan Biro Administrasi Kemasyarakatan	Terwujudnya Penatausahaa n dan pelayanan yang optimal							1 Dokumen dan informasi	0	1 Dokumen dan informasi	140	2 Dokume n dan informas i	140	biro adm. Kemasy	
			PROGRAM BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan bina ideologi dan wawasan kebangsaan	n/a	0%	0	25%	600	50%	600	75%	750	100%	900	100%	2.850	biro adm. Kemasy
			Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Terlaksananya Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik				12 Kab./Kota	100	12 Kab./Kota	100	12 Kab./Kota	100	12 Kab./Kota	100	12 Kab./Kot a	400	biro adm. Kemasy
			Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik								1	0	1	200	2	200	biro adm. Kemasy

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Penyusunan Kebijakan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Tersedianya Bahan Penyusunan Kebijakan Umum Bidang Kesatuan bangsa dan Politik				1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	1 Dokumen	300	1 Dokumen	200	4 Dokumen	900	biro adm. Kemasy
			Penyusunan Kebijakan tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan	Tersedianya Dokumen Kebijakan tentang pedoman Pemberian Tanda penghargaan Pembauran Kebangsaan				1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	4 Dokumen	800	biro adm. Kemasy
			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Tersedianya data Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik				12 Kab./Kota	100	12 Kab./Kota	100	1 Dokumen	150	1 Dokumen	200	12 Kab./Kota ; 2 Dokumen	550	biro adm. Kemasy
			Penguatan Forum Kordinasi Kapasitas Aparatur Pemerintah	Tersedianya dokumen IPOLEKSOSBUD dalam rangka								1 Paket	200	1 Paket	250	2 Paket	450	biro adm. Kemasy

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Daerah Terhadap IPOLEKSOSBUD	Penyusunan Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik														
			Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat	Meningkatnya jumlah generasi muda masyarakat dan forum yang memperoleh fasilitasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan							250 orang	400	250 orang	450	500 orang	850	biro adm. Kemasy	

Bab 6 **INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Indikator kinerja dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesainya kegiatan. Bertujuan untuk melakukan evaluasi apakah kegiatan bersangkutan memberikan manfaat terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perlu dicantumkan Indikator kinerja PD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD ditindaklanjuti atau dikawal didalam tiap-tiap Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Renstra PD.

Indikator Kinerja PD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, merupakan hal yang perlu diprioritaskan oleh setiap PD mengingat hal tersebut yang terkait langsung dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran Gubernur yang telah dituangkan dalam RPJMD.

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Opini BPK
2. Skor LPPD
3. Nilai akuntabilitas
4. Nilai Keterbukaan informasi
5. Nilai Reformasi Birokrasi

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Nilai akuntabilitas	CC	CC	CC	B	BB	BB	BB
3.	Skor LPPD	2,02	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	2,90
4.	Nilai Keterbukaan informasi	-	17,40	30,57	35,16	40,43	46,49	46,49
5.	Nilai Reformasi Birokrasi**	na	na	37,66	37,69	38,63	39,60	39,60

Bab 7 PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau ini mengacu pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019, sehingga diharapkan terjadi keselarasan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok fungsi Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Setda Provinsi Riau, merupakan panduan bagi unit kerja/Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan dibidang kesekretariatan daerah dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga seluruh unit kerja/Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau wajib mempedomani Renstra dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Renja.

Walaupun kurun waktu berlakunya Renstra Setda berakhir pada Tahun 2019, namun juga masih berlaku bagi acuan perencanaan kinerja pada masa transisi, sehingga berlaku juga sebagai acuan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2020 sebelum tersusunnya Renstra Tahun 2020-2025 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan visi dan misi pada RPJMD baru .

Selanjutnya untuk menjaga dan mengendalikan Renstra Setda Provinsi Riau agar selaras dengan dinamika perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, maka diperlukan review secara berkala. Untuk itu diperlukan suatu tim internal dan eksternal untuk melakukan evaluasi terhadap Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau apakah masih relevan sesuai dengan tuntutan dinamika perkembangan zaman atau tidak.

Kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras demi tersusunnya Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.